

PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Pedoman Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB) disusun sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melakukan penandaan anggaran TPB/SDGs serta Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu dalam menelaah dan memastikan ketepatan penandaan anggaran yang dilakukan oleh K/L.





Kementerian PPN/
Bappenas

PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KEMENTERIAN/ LEMBAGA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

2020

**PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**



Penyelarasan Akhir : Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc

Reviewer : Amalia Adininggar Widyasanti, Nina Sardjunani

Editor : Vivi Yulaswati, Josaphat Rizal Primana, Oktorialdi, Diani Sadia Wati, Maliki, Anang Noegroho Setyo Moeljono, Pungkas Bahjuri Ali, Amich Alhumami, Woro Srihastuti Sulistyanningrum, Tri Dewi Virgiyanti, Yahya Rachman Hidayat, Mahatmi Parwitasari Saronto, Leonardo Adypurnama, Muhammad Cholifihani, Mia Amalia, Medrilzam, Sri Yanti, Nur Hygiawati Rahayu, Prahesti Pandanwangi, Eka Chandra Buana

Tim Pendukung : Sanjoyo, Indriana Nugraheni, Rachman Kurniawan, Setyo Budiantoro, Ardhiantie, Diky Avianto, Tissa Riani, Khairanis Rahmanda Irina, Chiquita Abidin, Farhana Zahrotunnisa, Thas Saralah, Fitriyani Yasir, Sandra Pratiwi, Alimatul Rahim, Lendi Andita, Abdul Halim, Anita Wahyuni Yamin, Vernanda Fairuz, Fadlan Muzakki, M Robbi Qawi

Layout/Desain : Ongky Arisandi, Sanjoyo, Ardhiantie

Diterbitkan Oleh:

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Sesuai amanat Perpres No. 59 Tahun 2017, Pemerintah Pusat menyusun kembali dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMN 2020-2024.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga mengatur Kementerian/Lembaga untuk melakukan penandaan output ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran APBN, termasuk Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Penandaan TPB/SDGs dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan/ rincian output dan anggaran di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan intervensi pencapaian sasaran TPB/SDGs. Hal ini dilakukan untuk memastikan Sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dapat diinternalisasi di dalam proses perencanaan dan penganggaran di seluruh Kementerian/Lembaga.

Berbeda dari RAN periode sebelumnya, RAN TPB/SDGs 2020-2024 disusun dengan mengidentifikasi intervensi Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan tataran Rincian *Output* (RO). Identifikasi RO tersebut dituangkan dalam Matriks 2a Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Pusat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAN TPB/SDGs 2020-2024.

Dokumen RAN TPB/SDGs tersebut merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk K/L dalam melaksanakan berbagai intervensi/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs selama lima tahun ke depan. Untuk memastikan intervensi yang telah dituangkan dalam RAN TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran K/L setiap tahunnya, penandaan anggaran (*budget tagging*) menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Penandaan anggaran tidak hanya bermanfaat untuk membantu perhitungan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs setiap tahunnya, tetapi juga akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan dari pelaksanaan RAN TPB/SDGs dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pemantauan dan evaluasi eksisting di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu.

Pedoman Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB) disusun sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melakukan penandaan anggaran TPB/SDGs serta Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu dalam menelaah dan memastikan ketepatan penandaan anggaran yang dilakukan oleh K/L. Hasil penandaan anggaran akan digunakan sebagai basis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Rincian Output* (RO) K/L yang tertuang dalam RAN sehingga kinerja program dan anggaran yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dapat diukur secara reguler. Hasil evaluasi kinerja selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. Selanjutnya, pedoman ini akan dimutakhirkan secara periodik berdasarkan pembelajaran dari penerapannya.

Jakarta, Oktober 2020



Dr. Ir. Arifin Rudyanto, MSc

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas
Selaku Ketua Tim Pelaksana dari Tim Koordinasi Nasional TPB/ SDGs

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Landasan Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (TPB/SDGs) DI INDONESIA	4
2.1. Prinsip- Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	4
2.2. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia ..	5
2.3. Pengarusutamaan TPB/SDGs pada RPJMN 2020-2024	7
2.4. Capaian Utama TPB/SDGs	9
BAB III PENANDAAN ANGGARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (TPB/SDGs)	20
3.1. Tujuan Penandaan Anggaran.....	20
3.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	20
3.3. Penandaan Anggaran Pada <i>Level</i> / Rincian Output.....	25
3.4. Waktu dan Proses Penandaan TPB/SDGs	28
3.5. Identifikasi Rincian <i>Output</i> Yang Mendukung Pencapaian TPB/SDGs	32
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN	88
Lampiran 1. Tata Cara Penandaan Anggaran pada Penyusunan Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA Renja K/L.....	88
Lampiran 2. Daftar Rincian <i>Output</i> SDGs Menurut K/L.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Penandaan Anggaran dalam Sistem KRISNA.....	27
Tabel 2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Dalam Penandaan Anggaran TPB/SDGs	31
Tabel 3. Kriteria Identifikasi Rincian Output Berdasarkan Tujuan, Target, Indikator TPB/SDGs	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	7
Gambar 2. Kesesuaian RPJMN 2020-2024 dengan TPB/SDGs	8
Gambar 3. Struktur Rencana Kerja K/L dan Penandaan Anggaran.....	26
Gambar 4. Ilustrasi Penandaan Rincian Output Yang Mendukung TPB/SDGs	29
Gambar 5. Proses Penandaan dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa bulan September 2015, Kepala Negara dan perwakilan dari 193 negara telah menyepakati Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda ini merupakan rencana aksi untuk *People, Planet, and Prosperity* serta untuk penguatan perdamaian universal. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) berisikan 17 *Goals* dan 169 *Target* untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030.

TPB/SDGs merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs dan akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan dengan prinsip *No One Left Behind*. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). Selain itu TPB/SDGs juga melibatkan seluruh negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, dan kemitraan dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan dan mencapai TPB/SDGs. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjuk Kementerian PPN/Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah telah menyelaraskan SDGs dengan Nawacita sebagai visi pembangunan nasional serta mengarusutamakan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 serta selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN TPB. Pedoman Penyusunan RAN 2020-2024 dan Monitoring dan Evaluasi telah dikembangkan dari pedoman sebelumnya

dengan menggunakan *e-planning* yang terintegrasi dengan SDGs e-Monev serta terkoneksi dengan sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan e-Monev Bappenas. Oleh karena itu, penandaan anggaran (*tagging*) SDGs menjadi sangat penting agar SDGs e-Monev terkoneksi dengan Sistem KRISNA dan E-Monev Bappenas, sehingga pencapaian sasaran SDGs yang selaras dengan sasaran RPJMN dapat dimonitor dan dievaluasi secara akuntabel dan tepat waktu.

1.2. Tujuan

Pedoman Penandaan Anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melakukan penandaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran TPB pada tingkat keluaran kegiatan (rincian *output*) di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renja K/L tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L).

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan mengenai:

1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) serta pengarusutamaan TPB dalam RPJMN.
2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)
3. Proses identifikasi dan penandaan keluaran (rincian *output*) yang mendukung upaya pencapaian target dan indikator TPB/SDGs di dalam Rencana Kerja K/L.
4. Proses penelaahan rincian *output* yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu sesuai dengan lingkup tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
5. Proses monitoring dan evaluasi TPB/ SDGs yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait sesuai dengan lingkup tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkak Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1490);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470); dan
13. Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

BAB II

PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DI INDONESIA

2.1. Prinsip-Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5 P, yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

1. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat.
2. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang.
3. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam.
4. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan.
5. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Kelima prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 17 Tujuan yang terangkum dalam empat pilar yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rincian dari 17 tujuan tersebut yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Seluruh 17 tujuan tersebut kemudian dibagi lagi ke dalam tataran target/sasaran dan indikator. TPB/SDGs memiliki 169 target/sasaran dan 247 indikator global¹. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menerbitkan dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia untuk panduan definisi dan perhitungan data dari tiap-tiap indikator.

2.2. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tersebut mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Selain itu, melalui Perpres No. 59/2017 dibentuk pula Tim Koordinasi Nasional yang terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Kementerian PPN/Bappenas kemudian ditunjuk oleh Presiden sebagai Koordinator Pelaksana untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Sebagai amanah dari Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Pembuatan RAN dan RAD sistematisnya harus selaras dengan Dokumen Pedoman Penyusunan Renaksi TPB/SDGs yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak

¹ Jumlah Indikator global TPB/SDGs bisa berubah seiring dengan pengembangan indikator dari UNSTAT

langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

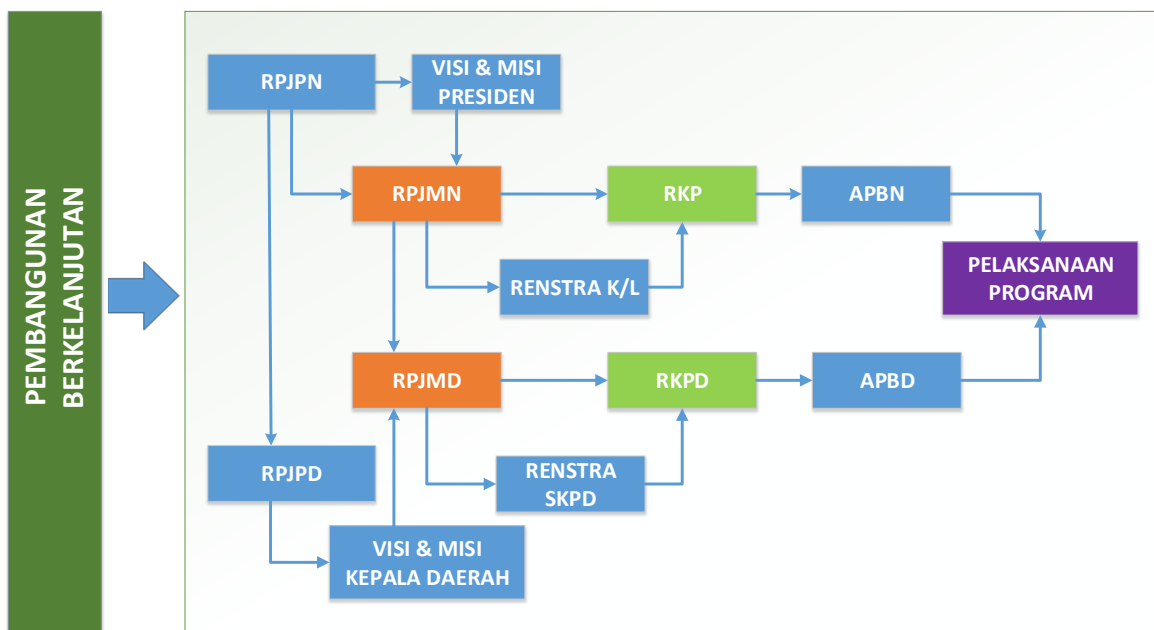
Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan rincian output yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Program dan kegiatan Pemerintah Pusat tersebut kemudian dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) khususnya pada Matrik 2a Rencana Aksi yang berisikan rincian program, kegiatan, dan rincian output kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk periode RAN TPB/SDGs 2020-2024, khusus penyusunan Matrik 2a RAN pemerintah pusat akan disinkronkan dengan sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat melalui Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran K/L (KRISNA) dan akan memanfaatkan fungsi penandaan anggaran.

Selain mengatur pada level perencanaan, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 juga mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAN maupun RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun nonpemerintah. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan ayat 4 menyatakan bahwa evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara lebih lanjut dijelaskan dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Pada RAN Pemerintah Pusat periode 2020-2024, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN TPB/SDGs juga akan dilakukan pada tataran program, kegiatan, dan keluaran (output) sesuai Renja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdapat pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). KRISNA merupakan sistem *e-planning* yang mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran ke dalam satu sistem tunggal dan terhubung dengan sistem e-monev. Dengan demikian proses pemantauan RAN TPB/SDGs terintegrasi dengan platform perencanaan dan anggaran nasional serta platform pemantauan dan evaluasi yang berbasis elektronik. Panduan pemantauan elektronik (e-monev) RAN TPB/SDGs akan disusun terpisah dari pedoman ini.

2.3. Pengarusutamaan TPB/SDGs pada RPJMN 2020-2024

TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 1.



Gambar 1. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

Butir-butir di dalam TPB/SDGs juga sejalan dengan visi misi RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. TPB/SDGs berarti juga melaksanakan visi dan misi yang terdapat dalam agenda pembangunan Indonesia, terutama yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kesesuaian RPJMN 2020-2024 dengan TPB/SDGs

Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 memiliki banyak kesesuaian dengan TPB/SDGs, yaitu:

- 1) SDM berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan Tujuan 1,2,3,4,5,
- 2) Karakter Bangsa, sesuai dengan Tujuan 4,
- 3) Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas, sesuai dengan Tujuan 8 dan 17,
- 4) Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan, sesuai dengan Tujuan 1 dan 10,
- 5) Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, sesuai dengan Tujuan 6,7, dan 9,
- 6) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, sesuai dengan Tujuan 16, dan
- 7) Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, sesuai dengan Tujuan 11,12,13,14,15

Pendekatan untuk menyelaraskan TPB/SDGs pada dokumen RPJMN dilakukan dengan mengidentifikasi target dan indikator TPB/SDGs berdasarkan panduan metadata indikator TPB/SDGs. Kemudian indikator tersebut dibandingkan dengan indikator di dalam dokumen RPJMN. Pemetaan indikator TPB/SDGs dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan definisi, metode kalkulasi, metode sumber pengumpulan data, penentuan disagregasi, serta frekuensi pengumpulan data dari tiap indikator tersebut. Pengarusutamaan seluruh 17 Tujuan TPB/SDGs juga telah dilakukan sebelumnya pada dokumen RPJMN 2015-2019. Sebesar 94 dari 169 target TPB/SDGs di tingkat global telah diarusutamakan ke dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan sementara, sebanyak 124 target telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Target-target tersebut telah selaras dengan visi, misi, dan program pemerintah serta sasaran pembangunan nasional.

2.4. Capaian Utama TPB/SDGs

Dalam melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia terus melakukan proses pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kinerja capaian TPB/SDGs di Indonesia. Pada tahun 2020 ini, telah diterbitkan Laporan TPB/SDGs tahun 2019 yang merupakan laporan tahunan kinerja TPB/SSGs pertama dari pemantauan dan evaluasi atas kemajuan dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya telah dicantumkan pada RAN TPB/SDGs 2017-2019. Di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia telah dua kali menyampaikan *Voluntary National Reviews* (VNR) pada tahun 2017 (sumber data capaian hingga 2016) dan 2019 (sumber data capaian hingga Maret 2019) pada *High-Level Political Forum on Sustainable Development* (HLPF SD) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa capaian 17 tujuan TPB/SDGs di Indonesia secara singkat:



Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

- Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional sebesar 14,15% pada tahun 2009 berhasil diturunkan menjadi 9,22 persen pada tahun 2019. Demikian pula, Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP USD 1,9 per kapita/hari) berhasil diturunkan secara signifikan menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2019 dari 18,43 persen pada tahun 2009.
- Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan bantuan untuk 9,8 juta orang pada tahun 2019 dengan anggaran mencapai 32,7 Triliun Rupiah untuk akses layanan dasar. Selain itu, masyarakat miskin dan rentan telah memperoleh akses air minum layak mencapai 61,15 persen pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 84,91 persen pada tahun 2019 serta akses sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 47,08 persen menjadi 66,57 persen pada kurun waktu yang sama.



Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

- Selama 4 tahun terakhir, ketahanan pangan nasional telah meningkat ditunjukkan dengan angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) telah menurun dari 10,73 persen pada 2015 menjadi 7,66 persen pada tahun 2019 serta Skala Pengalaman Ketidakamanan Pangan (FIES), juga menurun dari 8,66 persen pada 2017 menjadi 5,42 persen pada tahun 2019. Namun demikian, prevalensi *stunting* dan *wasting* pada anak balita masih cukup tinggi yaitu 27,7 persen *stunting* dan 7,4 persen *wasting* pada 2019.
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 81,4 (2014) menjadi 90,8 (2019).



Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

- Capaian utama dari Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, antara lain peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB), serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi sebesar 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015). Capaian Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menunjukkan penurunan sejak periode 1991 hingga tahun 2017. AKBa menunjukkan penurunan dari 40 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 32 pada tahun 2017.
- Kejadian Malaria di Indonesia berhasil dipertahankan di bawah 1 persen. Tren faktor risiko penyakit tidak menular seperti persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta belum dapat memenuhi target RPJMN 2019. Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun dan angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan penurunan.
- Fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat esensial terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun disamping itu *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan masih belum mencapai target RPJMN 2019.



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

- Pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang penting dalam membentuk sumberdaya manusia yang berdaya saing. Pendidikan diawali pada usia dini menunjukkan hampir semua anak usia 6 tahun memperoleh pelayanan pembelajaran terorganisir baik di tingkat Pra-sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) maupun di tingkat sekolah dasar. Selama 16 tahun terakhir antara tahun 2002 dan 2018, indikator ANAR anak usia 6 tahun mengalami perbaikan yang sangat pesat atau meningkat sebesar 36 persen.
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pendidikan menunjukkan tren yang positif baik pada pendidikan formal dan non-formal termasuk kursus. Selama periode 2009-2018, terjadi peningkatan yang cukup pesat yaitu sekitar 14 persen. Kesempatan pemuda untuk mendapatkan pendidikan formal/non-formal termasuk kursus telah setara antara perempuan dan laki-laki. Partisipasi pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah sebesar 30,28 persen (2019) dan menunjukkan peningkatan yang lambat dari 25,26 persen (2015). APK PT juga belum mampu memenuhi harapan sebesar 36,73 persen (2019). Namun demikian, pengukuran kualitas hasil pembelajaran berdasarkan PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa proporsi siswa yang dapat mencapai kompetensi minimal untuk matematika dan membaca masih rendah.
- Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan jika dilihat dari persentase guru yang sudah berkualifikasi S1/DIV. Persentase guru berkualifikasi di jenjang SD mengalami kenaikan 4,14 persen, dari 84,21 persen di tahun 2017 menjadi 88,35 persen di tahun 2018. Kenaikan juga terjadi di jenjang SMP, SMA, dan SMK.



Tujuan 5 Kesetaraan Gender

- Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tidak hanya terkait dengan SDG 5 tetapi juga terkait dengan pengukuran tujuan lain yang memiliki target spesifik pada masalah gender. Ringkasan ini menyajikan informasi terkait dengan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan serta kesempatan yang setara bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.
- Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

- Upaya pencegahan perkawinan anak belum mencapai target *Roadmap* SDGs tahun 2019 sebesar 10,59 persen. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun baru mencapai 10,82 persen (2019).
- Partisipasi perempuan di lembaga legislatif di tingkat nasional masih belum memenuhi kuota 30 persen sesuai dengan perundangan, meskipun menunjukkan tren yang meningkat dari 17,32 persen pada tahun 2014 menjadi 20,52 persen pada tahun 2019.



Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

- Pada tahun 2019, sebanyak 89,27 persen rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (Susenas BPS, 2019). Sementara itu, untuk kategori akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan belum memiliki baseline data pengukuran kualitas air minum. Perhitungan akses air minum aman dilakukan menggunakan estimasi perhitungan akses nasional sehingga didapatkan angka capaian akses aman sebesar 6,7 persen (Kualitas biologi Survei Kualitas Air/SKA 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kualitas fisik air minum berdasarkan Susenas BPS 2018)
- Akses terhadap layanan sanitasi layak (termasuk sanitasi aman) mengalami peningkatan dari 62,95 persen pada tahun 2015 menjadi 77,44 persen di tahun 2019, namun belum mencapai target sebesar 90 persen. Adapun untuk jumlah desa/kelurahan yang masih melaksanakan praktik-praktik *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah sebanyak 24.857 desa/kelurahan (Kementerian Kesehatan, 2019).



Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

- Konsumsi listrik nasional terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 konsumsi listrik nasional baru 910 kilowatt jam (kWh) per kapita. Kemudian meningkat menjadi 1.084 kWh/kapita pada tahun 2019. Peningkatan konsumsi listrik nasional ini selaras dengan kemajuan perekonomian nasional.
- Rasio elektrifikasi pada tahun 2014 sebesar 84,35 persen pada tahun 2019 menjadi 98,89 persen. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 96,60 persen. Upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan melalui penambahan jaringan melalui listrik pedesaan dan pendistribusian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).



Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

- Dalam rentang 2015-2019, Pemerintah telah berhasil menciptakan 11,88 juta lapangan kerja, melebihi target 10 juta lapangan pekerjaan.
- Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen (2019) dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,34 persen.
- Sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong perekonomian Indonesia, mengalami kemajuan yang baik. Menurut Laporan The Travel & Tourism Competitiveness Report yang dirilis WEF (*World Economic Forum*), peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik menjadi peringkat 40 di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017.
- Minat wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia makin meningkat, ditunjukkan data Desember 2019 mengalami kenaikan 1,88 persen dibanding jumlah kunjungan pada Desember 2018.



Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

- Infrastruktur mengalami berbagai kemajuan, seperti kondisi mantap jalan nasional mencapai target 98 persen pada tahun 2019 dari 89 persen pada tahun 2015; pembangunan jalan tol melebihi target 1.000 km kumulatif pada tahun 2019, yaitu 1.461 km dan jumlah bandar udara yang telah dibangun terus bertambah, yaitu 2 unit pada tahun 2015 menjadi 15 unit kumulatif pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.
- Infrastruktur TIK juga terus ditingkatkan untuk menunjang konektivitas digital, dimana proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband meningkat dari 93 persen pada tahun 2015 menjadi lebih dari 100 persen pada tahun 2019.
- Industri pengolahan non-migas, sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, pada tahun 2015 menyerap 13,5 persen tenaga kerja, dan terus meningkat menjadi 14,9 persen pada tahun 2019. Namun demikian, proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB turun dari 18,2 persen pada tahun 2015 menjadi 17,6 persen pada tahun 2019, dengan laju pertumbuhannya tidak dapat dipertahankan pada 5,1 persen seperti pencapaian pada tahun 2015, namun menurun menjadi 4,3 persen pada tahun 2019.
- Pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur memiliki dampak besar pada lingkungan, dan sudah ada kenaikan persentase perubahan emisi GRK dari 15,5 persen pada tahun 2015 menjadi 23,46 persen pada tahun 2019, namun belum mencapai target 26 persen pada tahun 2019.

- Peningkatan inovasi yang dihasilkan melalui riset, yang dapat menghasilkan penelitian dan inovasi terkait industri yang lebih ramah lingkungan dan infrastruktur yang mendukung konektivitas, juga terus diupayakan, dengan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB terus ditingkatkan dari 0,20 persen pada tahun 2015 menjadi 0,23 persen pada tahun 2019.



Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

- Kesenjangan terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio Gini dari 0,402 pada tahun 2015 menjadi 0,380 pada tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada angka kemiskinan, yang terus menurun dari 11,13 pada tahun 2015 menjadi 9,22 pada tahun 2019.
- Percepatan pembangunan desa menunjukkan hasil baik, dengan bertambahnya lebih dari 2.000 desa yang masuk kategori Desa Mandiri, serta lebih dari 5.000 Desa Tertinggal yang terentaskan.
- Namun, pembangunan di daerah tertinggal masih memerlukan upaya yang lebih besar lagi, masih ada 62 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal juga belum mencapai target yaitu dari 6,53 persen pada tahun 2015 menjadi 5,01 persen pada tahun 2018. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun dari 18,80 pada tahun 2015 menjadi 17,06 pada tahun 2019, namun laju penurunan ini masih relatif lambat.
- Pengurangan kesenjangan terus diupayakan dengan meningkatkan persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat dan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Anggaran belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat terus meningkat dari 1,7 persen (proporsi terhadap belanja Pemerintah Pusat) di tahun 2015 menjadi 12,3 persen pada tahun 2019, dan anggaran tersebut perlu terus ditingkatkan. Peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meningkat dari 6 persen pada tahun 2015 menjadi 41,43 persen pada tahun 2019 untuk pekerja formal dan meningkat dari 1 persen pada tahun 2015 menjadi 3,57 persen pada tahun 2019 untuk pekerja informal, namun angka pencapaian ini belum mencapai dari target.
- Selain itu, memastikan kesempatan yang sama dan kesetaraan hukum juga merupakan salah satu bentuk penurunan kesenjangan. Salah satu upaya dalam kesetaraan hukum adalah dengan memastikan kebijakan yang tidak memihak dan diskriminatif. Jumlah kebijakan yang diskriminatif berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut HAM internasional perlu menurun, namun jumlah kebijakan belum menurun dari 421 pada jangka waktu 2010-2016, menjadi 438 pada tahun 2019. Penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan berhasil mencapai target 89,99 persen di tahun 2019.



Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

- Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau baru mencapai 56,51 persen pada tahun 2019 yang dihitung berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan serta akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak. Sementara itu, aspek yang berkontribusi tertinggi terhadap rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni adalah tidak adanya akses sanitasi layak sebesar 11,64 persen.
- Sampah perkotaan yang tertangani sebesar 67,40 persen (KLHK, 2019). Sisa dari sampah tersebut tidak tertangani dan dibuang langsung ke lingkungan sehingga sangat berpotensi menimbulkan pencemaran.



Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

- Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan *the 10-Years Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns* di Indonesia. Sampai tahun 2020 telah terdapat 11 sektor kolaborasi tematik *quickwins* program SCP di Indonesia yaitu sektor industri, kehutanan, energi, pariwisata, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, komunikasi dan informasi, inovasi teknologi, keuangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
- Penerapan SNI ISO 14001 bagi perusahaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. SNI ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Selama kurun waktu 2009-2018 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 794 perusahaan (2009) menjadi 1.944 perusahaan (2018)².
- Produk ramah lingkungan yang teregister mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 23 produk yang telah diregister sebagai produk yang memenuhi ekolabel tipe I. Angka ini naik signifikan dari tahun 2016 hanya 4 produk. Demikian pula dengan ekolabel tipe II dari 18 produk tahun 2016 menjadi 27 produk di tahun 2019.

² <https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1>



Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

- Sampai dengan tahun 2019, capaian potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah sebesar 23,46 persen dari baseline akumulatif. Adapun untuk capaian penurunan emisi GRK tahunan pada tahun 2019 adalah sebesar 20,77 persen atau 401.822,53 ribu Ton CO₂e. Sementara intensitas Emisi GRK pada tahun 2019 adalah sebesar 420 ton CO₂e/miliar rupiah yang berasal dari implementasi seluruh sektor pembangunan rendah karbon.
- Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI mengalami penurunan dari 169,6 di tahun 2015 menjadi 130,4 pada tahun 2019. Sementara itu, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun fluktuatif. Pada tahun 2019, kerugian ekonomi akibat bencana sebesar 6,26 triliun rupiah (0,06 persen PDB). Adapun untuk jumlah korban yang meninggal dan hilang akibat bencana sebanyak 684 jiwa dan untuk korban yang terdampak dan mengungsi sebanyak 5.365.951 jiwa (2019).



Tujuan 14 Ekosistem Lautan

- Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014. Dengan penetapan ini, maka pemantauan WPP sebagai wilayah untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan secara seimbang.
- Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun dengan nilai tidak melebihi 80 persen dari total tangkapan lestari (*Maximum Sustainable Yield-MSY*). Pada tahun 2019 proporsi tangkapan jenis ikan masih berada pada kisaran nilai 56,6 persen, artinya tangkapan jenis ikan masih pada batas biologis yang aman.
- Selama kurun waktu 2015-2019 Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah luas kawasan konservasi perairan dari 17,30 juta ha (2015) dari target sebesar 16,5 juta ha di tahun 2015 menjadi 23,14 juta ha. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 20 juta Ha di tahun 2019. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang dalam rangka pemenuhan komitmen global dan didukung dengan komitmen pemerintah daerah menetapkan kawasan konservasi dalam rencana zonasi provinsi.



Tujuan 15 Ekosistem Daratan

- Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Sampai tahun 2018 proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 49,8 persen. Angka ini diprediksi akan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 50,6 persen.
- Selama kurun waktu 2015-2019, luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus mengalami peningkatan. Hasil capaian pada tahun 2019 cukup baik sebesar 84.067,08 Ha, meskipun masih di bawah target sebesar 100.000 Ha.
- Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada tahun 2018 mencapai 622.861,59 Ha. Luas capaian ini telah memenuhi target tahun 2019 sebesar 500.000 Ha.
- Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks *Management effectiveness Tracking Tool* (METT) minimal 70 persen terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mendapat nilai METT minimal 70 persen telah mencapai 255 KPA.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Selama tahun 2019, jumlah KPHK (konservasi) dan KPHL (lindung) telah memenuhi target sebanyak 106 KPHK (target 100), 190 KPHL (target 182) sedangkan capaian KPHP (produksi) tercatat 347 (target 340).
- Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi mengalami peningkatan yang signifikan mencapai penambahan 24 spesies (2019). Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 10 spesies.



Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh

- Akses Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan sebagai upaya untuk memberikan akses pada keadilan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan.
- Jumlah penerima akta kelahiran yang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, baik untuk kategori anak maupun untuk anak di bawah usia 5 tahun sebagaimana diukur oleh indikator global meningkat menjadi 76,65 persen (2019) dari 72,65 persen (2015).

- Dari sisi tata kelola, proporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang juga menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya.
- Upaya pemberantasan korupsi yang masih belum optimal terlihat dari tren capaian IPAK sebesar 3,70 (2019) yang belum mencapai target sebesar 4 di tahun 2019. Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan, dimana pada presentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi Baik dan persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik masih rendah dan belum mencapai target.
- Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian menunjukkan kecenderungan menurun. Selain itu isu kekerasan terhadap anak masih perlu perhatian khusus selain karena datanya masih perlu terus dikembangkan mengingat metodologi survei yang berubah juga upaya pencegahan yang harus terus ditingkatkan.
- Masih rendahnya keterwakilan perempuan yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pengambil keputusan di tingkat eksekutif dan di parlemen. Dari kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan di parlemen, tercatat pada tahun 2019, jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 20,52 persen, DPRD Provinsi sebesar 17,53 persen dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 15,27 persen. Tren capaian Indeks Demokrasi Indonesia perlu mendapat perhatian terutama pada aspek Indeks Lembaga Demokrasi maupun Indeks Kebebasan Sipil. Sedangkan pada aspek Indeks Hak-Hak Politik, terlihat adanya perbaikan dimana capaian pada tahun 2019 sebesar 70,71, melampaui target pencapaian yang telah ditetapkan di 2019 yaitu sebesar 68.



Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

- Mobilisasi sumber daya domestik merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan SDGs. Salah satunya bersumber dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB, dengan pencapaian yang belum signifikan yaitu sebesar 9,76 persen (2019) dari target >12 persen yang telah ditargetkan.
- Capaian ekspor nonmigas memiliki kecenderungan fluktuasi yang menurun sedangkan pencapaian target *Free Trade Agreement* lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.
- Indikator penting yang mendukung target jaringan konektivitas besar untuk menghubungkan seluruh penjuru negeri adalah tercapainya 100 persen pembangunan jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional, serta meningkatnya pengguna internet secara signifikan selama hampir 10 tahun terakhir yang telah mencapai 64,8 persen (2019) dari 17,6 persen (2010).

- Target terkait data statistik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang positif antara lain indikator terkait jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta terjadinya perbaikan manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah berkontribusi pada kepuasan pengguna data. Namun Indonesia masih belum dapat mencapai upaya dibangunnya *vital statistics registration* untuk mencatat kematian dan kelahiran.
- Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST) yang merupakan dua langkah terkombinasi Indonesia untuk lebih aktif dalam kerja sama pembangunan internasional terus meningkat komitmennya. Melalui KSST komitmen Indonesia diwujudkan dengan dukungan kepada negara-negara berkembang lain dalam menerapkan SDGs dan memastikan tidak ada seorangpun tertinggal di negara-negara mitra.

BAB III

PENANDAAN ANGGARAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan. Penandaan anggaran (*budget tagging*) merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan intervensi yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran. Berbeda dengan periode sebelumnya, mulai periode 2020-2024 RAN TPB/SDGs disusun dengan mengidentifikasi intervensi sampai dengan tataran rincian *output* K/L. Dengan demikian, penandaan anggaran tidak hanya bermanfaat untuk menghitung alokasi anggaran tetapi juga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan dari pelaksanaan RAN TPB/SDGs.

3.1. Tujuan Penandaan Anggaran

Penandaan anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) bertujuan untuk:

- (a) memastikan intervensi yang mendukung upaya pencapaian target dan indikator TPB/SDGs sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, dan
- (b) memastikan intervensi pencapaian TPB/SDGs mendapatkan pemantauan dan evaluasi yang sistematis untuk menilai kinerja pelaksanaan RAN TPB/SDGs setiap tahunnya.

3.2. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Peta jalan TPB/SDGs 2030 menetapkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia dalam upaya pencapaian target dan indikator TPB/SDGs. Arah kebijakan dan strategi tersebut juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dimana sebanyak 123 target TPB/SDGs telah diurutkan dalam dokumen tersebut. Arah kebijakan pencapaian untuk setiap Tujuan TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan TPB/SDGs 2030 adalah sebagai berikut:

(a) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan periode 2020-2024 dan 2025-2030 adalah: (1) perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas; (2) penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

(b) Tujuan 2 Menghapus Kelaparan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target menghapus kelaparan periode 2020-2024 adalah: (1) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, beragam, dan aman; (2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; dan (3) meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target menghapus kelaparan periode 2025-2030 adalah: (1) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, beragam, dan aman; (2) meningkatkan status gizi masyarakat; dan (3) meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian.

(c) Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kehidupan sehat dan sejahtera periode 2020-2024 dan 2025-2030 adalah: (1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; (2) penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); (3) memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah; (4) penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan; (5) peningkatan pengendalian penyakit; dan (6) penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(d) Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target pendidikan berkualitas periode 2020-2024 adalah: (1) mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif; (3) meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (4) meningkatkan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan; (5) meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini; (6) meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan; (7) meningkatkan pemenuhan Anggaran Pendidikan; (8) peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas; (9) penguatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (10) penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi; dan (11) pengembangan program studi inovatif yang sesuai kebutuhan pembangunan dan industri.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target pendidikan berkualitas periode 2025-2030 adalah: (1) mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif; (3) meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (4) meningkatkan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan; (5) meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini; (6) meningkatkan kesetaraan kualitas layanan pendidikan; (7) penguatan otonomi perguruan tinggi; (8) pengembangan proram studi inovatif yang sesuai kebutuhan pembangunan dan industri; dan (9) pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat unggulan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

(e) Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kesetaraan gender periode 2020-2024 adalah: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata; dan (2) penguatan pencegahan pernikahan anak.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kesetaraan gender periode 2025-2030 adalah: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata; dan (2) mengakhiri pernikahan anak.

(f) Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target air bersih dan sanitasi layak periode 2020-2024 adalah: (1) pencapaian akses air minum layak 100% dan akses air minum aman 15%; (2) dukungan pembiayaan pembangunan air minum layak sekitar 22 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024; dan (3) layanan sanitasi yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target air bersih dan sanitasi layak periode 2025-2030 adalah: (1) pencapaian akses air minum layak 100% dan akses air minum aman 43,15%; (2) dukungan pembiayaan pembangunan air minum layak sekitar 35,52 juta sambungan rumah (SR) tahun 2030; dan (3) peningkatan akses terhadap sanitasi aman.

(g) Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target energi bersih dan terjangkau periode 2020-2024 adalah: (1) memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; (2) meningkatkan kualitas BUMN di bidang ketenagalistrikan; (3) mendorong pemanfaatan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga, dan industri; (4) meningkatkan kualitas pasokan listrik; (5) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; (6) mengkaji pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; (7) mempercepat pemanfaatan panas bumi; (8) meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati; (9) meningkatkan potensi dan kualitas data Energi Baru dan Terbarukan; (10) meningkatkan efisiensi energi; dan (11) menciptakan iklim yang mendukung pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target energi bersih dan terjangkau periode 2025-2030 adalah: (1) meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; (2) meningkatkan pemanfaatan listrik untuk memenuhi kebutuhan energi final sektor transportasi, rumah tangga, dan industri (industri skala kecil, menengah, dan besar); (3) meningkatkan kualitas pasokan listrik; (4) memperkuat pemanfaatan aneka energi baru terbarukan; (5) mengembangkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN); (6) meningkatkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan; (7) mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk pengembangan energi baru dan terbarukan; (8) memperkuat pelaksanaan efisiensi energi; (9) menjaga stabilitas iklim yang mendukung pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi

(h) Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi periode 2020-2024 adalah: (1) percepatan transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, reindustrialisasi, dan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru; (2) peningkatan akses layanan keuangan bagi UMKM dan kewirausahaan; (3) peningkatan keahlian tenaga kerja untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (4) peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi periode 2025-2030 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan reformasi struktural melalui peningkatan produktifitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; (2) peningkatan pekerja produktif; dan (3) peningkatan keragaman wisata.

(i) Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target industri, inovasi, dan infrastruktur periode 2020-2024 adalah: (1) pengembangan industrialisasi; (2) pengembangan sub-sektor industri; (3) pengembangan SDM industri; (4) IPTEK dan inovasi pada bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan; (5) pengembangan *Research Power House*; (6) penciptaan ekosistem inovasi; dan (7) optimalisasi anggaran penelitian dan pengembangan (litbang).

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target industri, inovasi, dan infrastruktur periode 2025-2030 adalah: (1) pengembangan industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi; (2) pengembangan keahlian tenaga kerja industri ke arah industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi; (3) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya litbang yang lebih efektif dan efisien; (4) pengembangan ekosistem inovasi yang *advanced* dan terintegrasi; (5) pengembangan sistem anggaran dan insentif litbang; dan (6) pengembangan jangkauan *mobile broadband*.

(j) Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target berkurangnya kesenjangan periode 2020-2024 adalah: (1) menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada masyarakat miskin dan rentan; (2) meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan vokasi dan relevansi keahlian tenaga kerja; (3) memperkuat perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi; dan (4) menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, inklusif, dan bernilai tambah tinggi.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target berkurangnya kesenjangan periode 2025-2030 adalah: (1) menjaga stabilitas pertumbuhan yang memihak masyarakat miskin dan rentan serta menstimulasi pertumbuhan masyarakat kelompok menengah; (2) meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja yang kompleks dan bernilai tambah tinggi; dan (3) menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi.

(k) Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kota dan pemukiman yang berkelanjutan periode 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dari sisi permintaan, sisi pasokan dan *enabling environment*.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kota dan pemukiman yang berkelanjutan periode 2025-2030 adalah memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses pada hunian yang layak, aman dan terjangkau beserta layanan infrastruktur dasarnya dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

(l) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab periode 2020-2024 adalah peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab periode 2025-2030 adalah penguatan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

(m) Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target penanganan perubahan iklim periode 2020-2024 adalah penurunan emisi dan intensitas emisi dari sektor hutan, lahan, dan gambut, energi, pengelolaan limbah, transportasi, industri, *blue carbon*, dan pertanian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target penanganan perubahan iklim periode 2025-2030 adalah pembangunan rendah karbon sektor hutan, lahan, dan gambut, pertanian, pengelolaan limbah, transportasi, energi, *blue carbon*, industri, dan ekonomi.

(n) Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target ekosistem lautan periode 2020-2024 adalah: (1) peningkatan tata kelola perikanan; (2) revitalisasi praktik penangkapan ikan berkelanjutan; (3) penguatan tata kelola dan sinergi kelembagaan; (4) pemeliharaan kesehatan ekosistem dan dukungan pemanfaatan KKP; dan (5) pengembangan pembiayaan KKP jangka panjang yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target ekosistem lautan periode 2025-2030 adalah: (1) penguatan tata kelola perikanan; (2) implementasi penangkapan ikan bertanggung jawab dan berkelanjutan; (3) penguatan tata kelola dan sinergi kelembagaan; (4) pemeliharaan kesehatan ekosistem dan dukungan pemanfaatan KKP; dan (5) penyediaan pembiayaan KKP jangka panjang yang berkelanjutan.

(o) Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target ekosistem daratan periode 2020-2024 dan 2025-2030 adalah: (1) mengurangi laju deforestasi di Indonesia; dan (2) mengurangi laju degradasi hutan.

(p) Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh periode 2020-2024 adalah: (1) penguatan sistem anti korupsi; (2) penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik dan penguatan desentralisasi; (3) memperluas jangkauan layanan pencatatan akta kelahiran bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri; (4) meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan kelahiran; (5) memperkuat koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah; dan (6) mempercepat kepemilikan akta kelahiran untuk kelompok khusus.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh periode 2025-2030 adalah: (1) mengoptimalkan penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, dan penyelenggara negara; (2) pemantapan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, penguatan desentralisasi, dan peningkatan partisipasi politik warga; (3) meningkatkan efektivitas jangkauan layanan pencatatan akta kelahiran bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri; (4) memperkuat kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan kelahiran; (5) optimalisasi koordinasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah; dan (6) meningkatkan kepemilikan akta kelahiran untuk kelompok khusus.

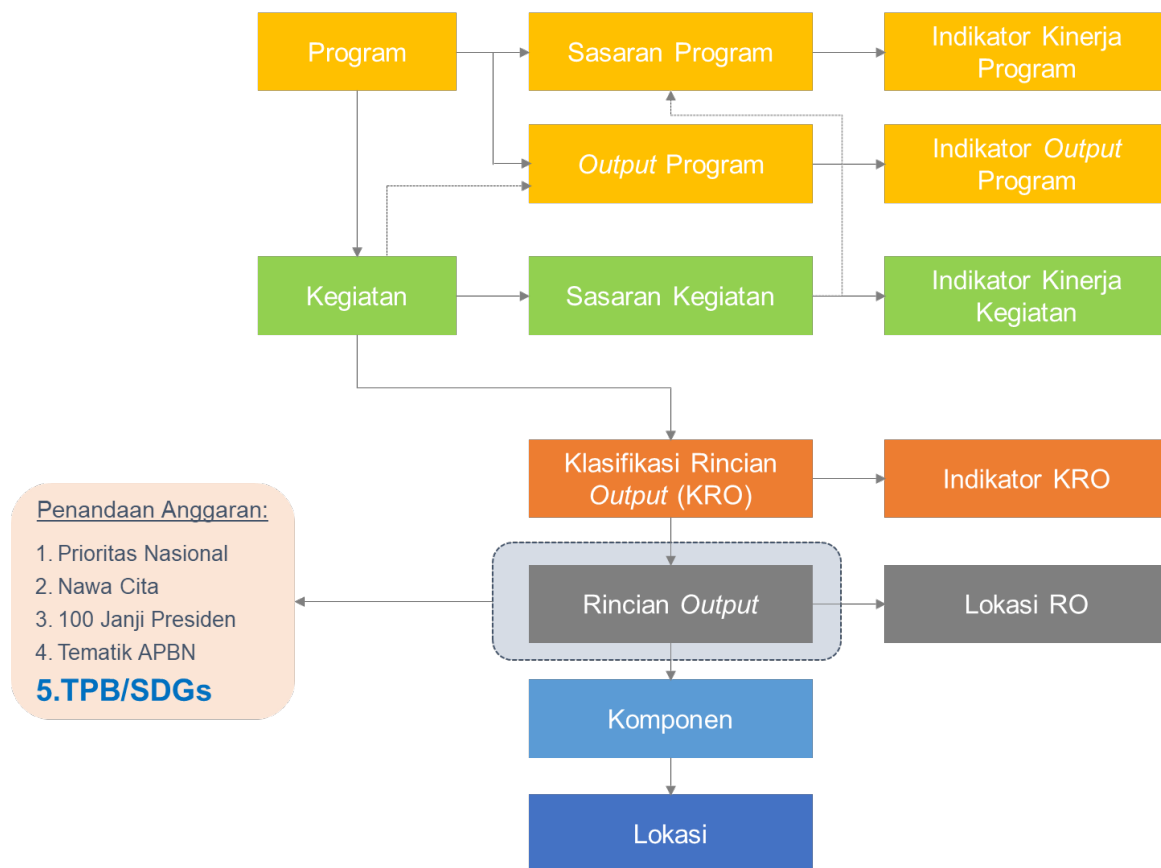
(q) Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kemitraan untuk mencapai tujuan periode 2020-2024 adalah: (1) optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan sistem administrasi dan regulasi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi; (2) pemerataan infrastruktur dan akses terhadap layanan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dan meningkatkan penyediaan layanan publik yang berbasis pada TIK; dan (3) mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri barang dan jasa Indonesia melalui pemanfaatan rantai produksi global dan perluasan produk serta pasar tujuan ekspor.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan target kemitraan untuk mencapai tujuan periode 2025-2030 adalah: (1) optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi; (2) pemantapan terhadap jaringan yang menjangkau pedesaan dan terus meningkatkan penyediaan layanan publik berbasis TIK; dan (3) mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri yang berkesinambungan melalui penciptaan daya saing yang didasarkan pada produk barang dan jasa Indonesia berbasis inovasi dan bernilai tambah tinggi.

3.3. Penandaan Anggaran Pada Level Rincian Output

Penandaan anggaran TPB/SDGs dilakukan pada *level* rincian *output* karena tingkatan ini mempunyai informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan memantau intervensi/aktivitas yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) kementerian/lembaga (K/L), beserta indikator capaiannya, besaran dana yang dialokasikan dan realisasinya. Hal ini akan memudahkan pelaksana penandaan anggaran untuk menelaah kesesuaian rincian *output* kegiatan dengan upaya pencapaian target dan indikator TPB/SDGs. *Level* rincian *output* yang ditandai berada di bawah kegiatan unit eselon II/direktorat Kementerian/Lembaga, sesuai dengan struktur data Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) pada aplikasi Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Rencana Kerja K/L dan Penandaan Anggaran

Definisi sesuai Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 4/Juklak/Sesmen/04/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

1. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program mencerminkan tugas dan fungsi K/L dan dapat digunakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja Eselon I.
2. **Sasaran Program** adalah hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi Program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas Unit Kerja Eselon I maka Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dapat dirumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam Program tersebut.
3. **Indikator Kinerja Program** adalah alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif.
4. **Output Program** merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/L untuk mendukung terwujudnya *outcome*.
5. **Indikator Output Program** adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (*Output*) Program.

6. **Kegiatan** adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran kegiatan. Kegiatan dapat bersifat Lintas Eselon I atau Lintas Eselon II dalam Eselon I yang sama.
7. **Sasaran Kegiatan** adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan.
8. **Indikator Kinerja Kegiatan** adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan.
9. **Klasifikasi Rincian Output (KRO)** adalah kumpulan atas keluaran (*output*) K/L (*Rincian Output – RO*) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
10. **Rincian Output (RO)** adalah keluaran (*output*) riil atau produk akhir yang sangat spesifik dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
11. **Komponen** adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
12. **Lokasi** adalah lokasi dilaksanakannya rincian *output* dan/atau lokasi penerima manfaat rincian *output*.

Dalam sistem KRISNA, terdapat beberapa pilihan untuk melakukan penandaan anggaran untuk beberapa kategori, yaitu Prioritas Nasional, Nawa Cita, Janji Presiden, Tematik APBN, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Proses penandaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dilakukan pada aplikasi KRISNA dengan memberikan tanda centang pada *level* rincian *output* dengan memilih salah satu tujuan dari 17 Tujuan SDGs kemudian memilih indikator yang relevan dengan intervensi/aktivitas pada rincian *output* tersebut.

Penandaan anggaran dilakukan pada *level* **Rincian Output (RO) Belanja K/L (APBN)**. Penandaan tidak termasuk Belanja Non K/L, dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maupun APBD.

Tabel 1. Kategori Penandaan Anggaran dalam Sistem KRISNA

No	Kategori
1	Prioritas Nasional
2	Nawa Cita
3	100 Janji Presiden
4	Tematik APBN
5	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ↳ Tujuan ↳ Indikator

3.4. Waktu dan Proses Penandaan TPB/SDGs

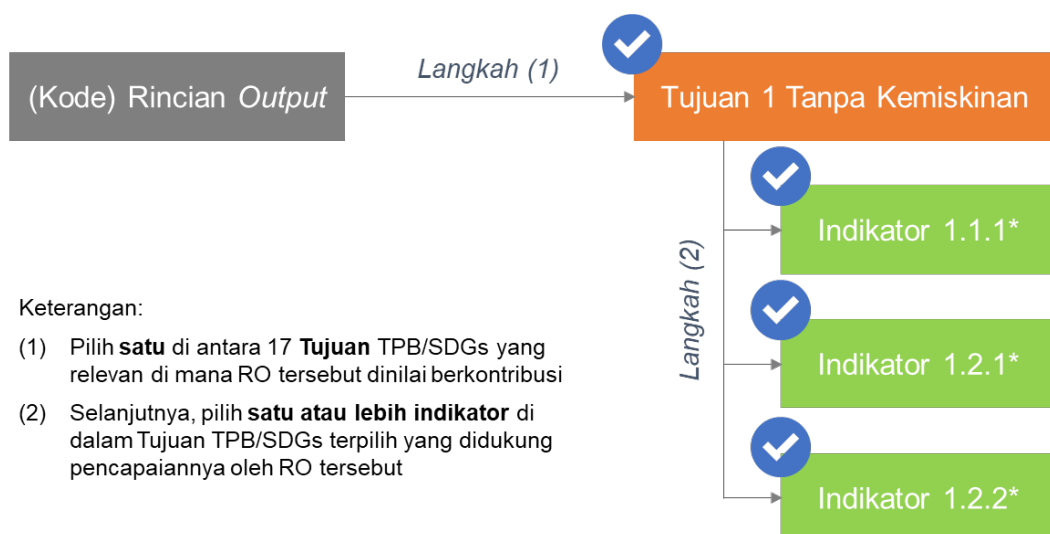
Pelaksanaan penandaan anggaran TPB/SDGs pada aplikasi Renja K/L (KRISNA) dan RKA K/L mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran tahunan (Gambar 3.2), dengan alur sebagai berikut:

1. Proses penandaan TPB/SDGs dimulai dengan identifikasi rincian *output* tahun berikutnya ($t+1$) yang relevan dalam mendukung pencapaian target dan indikator TPB/SDGs berdasarkan *self-assessment* K/L dan hasil evaluasi terhadap penandaan anggaran sebelumnya pada bulan Januari-Februari.
2. Hasil identifikasi rincian *output* K/L (*self-assessment*) selanjutnya akan dibahas pada pertemuan sosialisasi penandaan anggaran TPB/SDGs dan konfirmasi rincian *output* K/L yang akan dilaksanakan pada bulan Maret.
 - Pertemuan bertujuan untuk mengidentifikasi rincian *output* K/L baik yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian target dan indikator setiap Tujuan TPB/SDGs.
 - Proses pertemuan:
 - (a) arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang selaras dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun berikutnya ($t+1$) dan kebijakan penandaan anggaran TPB/SDGs (Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas);
 - (b) tata cara penandaan dalam aplikasi KRISNA (Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas);
 - (c) pemantauan dan evaluasi rincian *output* K/L yang telah dilakukan penandaan TPB/SDGs dalam e-monev Bappenas (Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan); dan
 - (d) penyampaian data identifikasi rincian *output* terkait TPB/SDGs oleh biro perencanaan dan/atau unit teknis K/L.
3. Penandaan anggaran tahun berikutnya ($t+1$) dilakukan oleh K/L pada aplikasi Renja K/L (KRISNA) pada bulan April sesuai hasil identifikasi rincian *output* K/L yang telah dibahas pada pertemuan konfirmasi dan kesepakatan *Trilateral Meeting I* Renja K/L.
 - Penandaan dilakukan oleh satker/unit teknis pengampu rincian *output* pada aplikasi KRISNA kemudian diverifikasi oleh biro perencanaan sebelum di-*submit* untuk ditelaah oleh direktorat sektor Kementerian PPN/Bappenas dan direktorat anggaran Kemenkeu.
4. Rincian *output* K/L yang telah dilakukan penandaan anggaran TPB/SDGs divalidasi/ditelaah kesesuaiannya oleh Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Anggaran Kemenkeu pada bulan Mei sesuai dengan jadwal penelaahan Renja K/L.
5. Hasil penandaan yang telah dilakukan pada Renja K/L selanjutnya akan ditarik secara otomatis sebagai bagian dari referensi penyusunan RKA K/L pada bulan Juni. Selain itu, K/L juga dapat melakukan *updating* penandaan pada aplikasi KRISNA dan RKA K/L sesuai kesepakatan *Trilateral Meeting II* Renja K/L (apabila terdapat perubahan).

6. Rincian *output* K/L yang telah dilakukan penandaan anggaran TPB/SDGs divalidasi/ditelaah kesesuaiannya oleh Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Anggaran Kemenkeu pada bulan Agustus sesuai dengan jadwal penelaahan RKA K/L.
7. *Updating* penandaan anggaran dapat dilakukan kembali pada bulan November (apabila terdapat perubahan setelah pembahasan DPR dan UU APBN), untuk selanjutnya ditelaah/divalidasi kembali sesuai jadwal penelaahan RKA K/L.
8. Data rincian *output* K/L yang dilakukan penandaan anggaran TPB/SDGs dapat dilakukan konfirmasi akhir pada bulan Desember pada saat pengesahan DIPA tahun berikutnya (t+1).
9. Hasil final penandaan anggaran TPB/SDGs pada Renja K/L (KRISNA) selanjutnya akan menjadi referensi untuk diunggah ke aplikasi e-monev Bappenas.
10. Hasil final penandaan anggaran TPB/SDGs pada RKA K/L akan menjadi referensi untuk diunggah ke SPAN dan SAKTI. Dengan demikian, data realisasi capaian rincian *output* dan pelaksanaan anggaran juga dapat dipantau dan diperoleh datanya dari aplikasi tersebut.

Selanjutnya, Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dibantu Sekretariat SDGs akan melakukan konsolidasi laporan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rincian *output* yang mendukung TPB/SDGs berdasarkan data realisasi capaian rincian *output* dan pelaksanaan anggaran yang di-*input* oleh K/L pada aplikasi pemantauan dan evaluasi tersebut di atas.

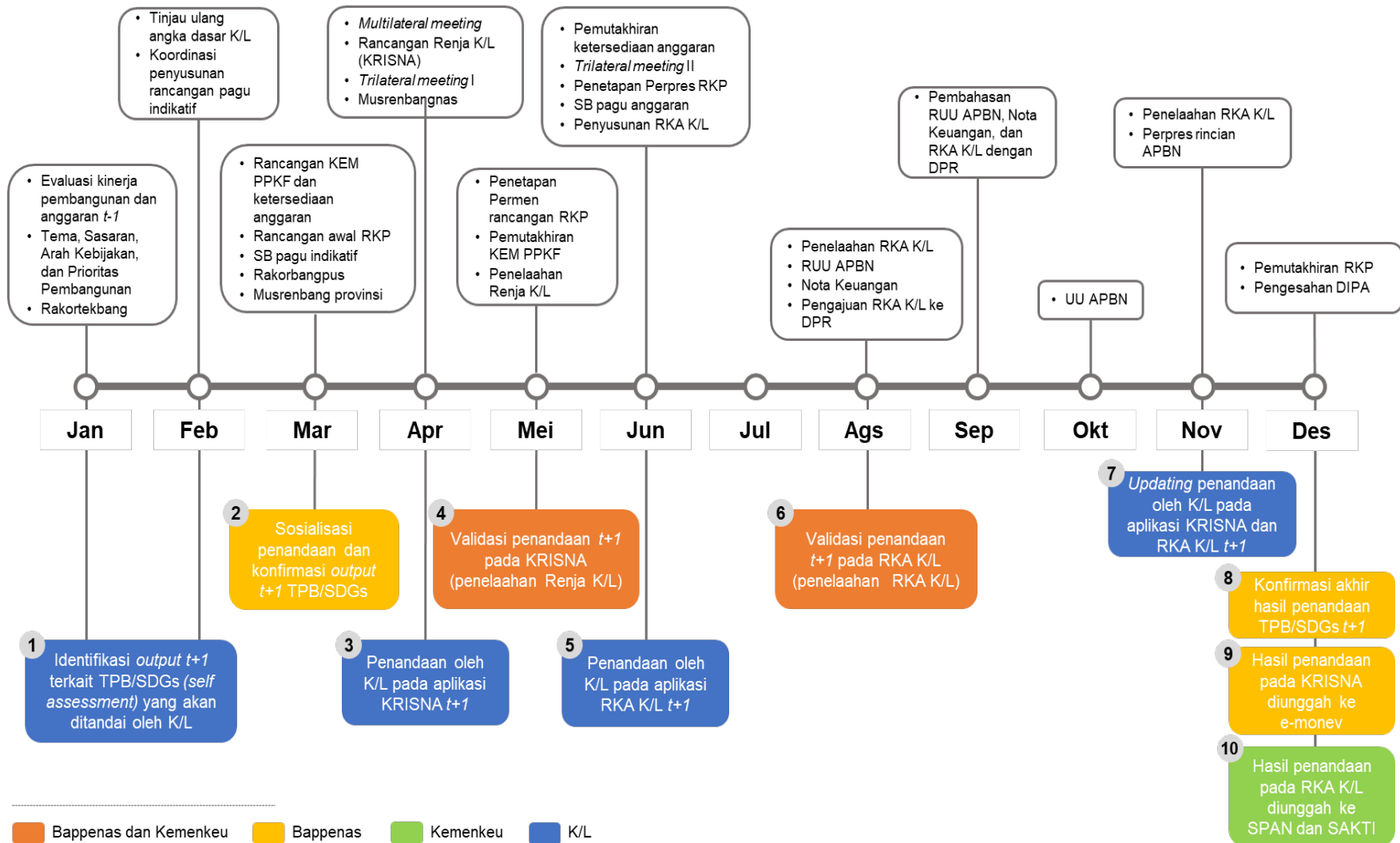
Satu rincian *output* hanya bisa dilakukan penandaan untuk **1 (satu) Tujuan TPB/SDGs** yang relevan. Selanjutnya, rincian *output* dapat ditandai untuk mendukung **lebih dari 1 (satu) indikator** dalam Tujuan TPB/SDGs tersebut.



Gambar 4. Ilustrasi Penandaan Rincian Output Yang Mendukung TPB/SDGs

Siklus Perencanaan dan Penganggaran
(PP 17 Tahun 2017)

Proses Penandaan Output K/L
Terkait TPB/SDGs



Gambar 5. Proses Penandaan dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Pembagian peran dan tanggung jawab di antara K/L, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkeu pada proses penandaan anggaran TPB/SDGs diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Dalam Penandaan Anggaran TPB/SDGs

K/L	Unit	Peran/Tanggung Jawab
Kementerian PPN/Bappenas	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dibantu Sekretariat SDGs	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan keseluruhan proses penandaan rincian <i>output</i> K/L yang mendukung TPB/SDGs.
	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sistem dan data terkait penandaan anggaran TPB/SDGs pada aplikasi KRISNA Mengkoordinasikan teknis penandaan anggaran pada aplikasi KRISNA.
	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penilaian alokasi pendanaan pembangunan
	Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penarikan data tagging pada aplikasi KRISNA dan RKA K/L sebagai referensi e-monev Mengkoordinasikan data capaian rincian <i>output</i> dan realisasi anggaran yang mendukung TPB/SDGs berbasis e-monev
	Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan program yang mendukung TPB/SDGs
	Direktorat sektor terkait	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kesesuaian substansi dan mengkoordinasikan penandaan anggaran TPB/SDGs oleh mitra K/L Melakukan penelaahan dan persetujuan penandaan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi KRISNA Melakukan validasi pemantauan dan evaluasi kinerja program mitra K/L yang terkait TPB/SDGs
Kemenkeu	Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinir kegiatan penandaan, pemantauan dan evaluasi anggaran untuk penyusunan APBN
	Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DJA	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kesesuaian substansi dan mengkoordinasikan penandaan anggaran TPB/SDGs oleh mitra K/L
	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan persetujuan anggaran dari mitra K/L pada aplikasi RKA-K/L.
	Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran mitra K/L terkait TPB/SDGs

K/L	Unit	Peran/Tanggung Jawab
	Bendahara Umum Negara, DJA	
	Direktorat Sistem Penganggaran, DJA	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sistem dan data terkait penandaan anggaran TPB/SDGs di RKA K/L dan di SMART
	Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran rincian <i>output</i> K/L yang mendukung TPB/SDGs pada OM-SPAN
	Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan, DJPb	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pengelolaan data realisasi anggaran rincian <i>output</i> K/L yang mendukung TPB/SDGs pada OM-SPAN
Kementerian/ Lembaga	Biro Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi penandaan anggaran TPB/SDGs oleh Satker terkait Melakukan validasi kesesuaian penandaan anggaran TPB/SDGs sebelum di-<i>submit</i> untuk ditelaah oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu Melakukan validasi data realisasi rincian <i>output</i> K/L dan realisasi anggaran sebelum di-<i>submit</i> untuk e-monev
	Unit Teknis (Satker)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penandaan anggaran TPB/SDGs untuk rincian <i>output</i> yang dinilai relevan pada aplikasi KRISNA dan RKA K/L Melakukan pemantauan dan evaluasi rincian <i>output</i> K/L dan menginput data realisasi pada e-monev dan SPAN

3.5. Identifikasi Rincian *Output* Yang Mendukung Pencapaian TPB/SDGs

Identifikasi rincian *output* kegiatan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dilakukan dengan menilai apakah rincian *output* kegiatan tersebut berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung pada upaya pencapaian target dan indikator TPB/SDGs yang relevan.

Identifikasi rincian *output* kegiatan dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- (a) Identifikasi mandiri (*self assessment*) oleh unit kerja dari masing-masing K/L terkait
- Self assessment* terhadap rincian *output* sebaiknya dilakukan oleh unit kerja pemilik rincian *output* yang mengerti secara detil tujuan dan aktivitas yang dilakukan pada masing-masing rincian *output* kegiatan.
 - Unit kerja melakukan *self assessment* berdasarkan informasi yang tercantum di dalam dokumen Renja K/L dari aplikasi KRISNA.
 - Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, setiap K/L dapat melaksanakan penandaan anggaran TPB/SDGs.

(b) Proses identifikasi oleh Kementerian PPN/Bappenas

- Identifikasi rincian *output* kegiatan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dibantu oleh Sekretariat SDGs berdasarkan pengetahuan teknis dan pemahaman direktorat sektor di Kementerian PPN/Bappenas.
- Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi rincian *output* kegiatan dan dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan Matriks 2A (Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Pusat) yang merupakan lampiran dari Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs tahun 2020-2024.
- Hasil identifikasi tersebut akan dikoordinasikan dan disepakati dengan K/L sebagai bagian dari finalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs tahun 2020-2024.
- Selanjutnya, daftar identifikasi rincian *output* K/L yang ada pada RAN TPB/SDGs dapat dijadikan acuan bagi K/L dalam melakukan penandaan anggaran.
- Daftar rincian *output* K/L dapat berkembang sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan dan juga hasil *self assessment* K/L.

Kedua proses identifikasi rincian *output* kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan referensi data dari Renja K/L (KRISNA). Kode rincian *output* di KRISNA merupakan referensi bagi kode yang ada di e-monev (Bappenas) serta RKA-K/L dan SPAN (Kemenkeu). Kode rincian *output* dalam sistem-sistem tersebut sama meskipun alokasi pendanaan dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian, rincian *output* dapat ditelusuri dan dimonitor perkembangan pelaksanaan dan realisasinya.

Untuk membantu proses *self assessment* identifikasi rincian *output* yang berkontribusi terhadap TPB/SDGs, unit kerja dapat mengacu pada tujuan dan sasaran nasional pelaksanaan pencapaian TPB sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Metadata Indikator TPB Edisi 2 tahun 2020-2024. Sesuai Metadata Indikator TPB Edisi 2, terdapat 135 target dan 283 indikator nasional yang harus diterjemahkan upaya pencapaiannya melalui berbagai intervensi yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk didalamnya Pemerintah Pusat melalui rincian *output* kegiatan K/L.

Tabel 3. Kriteria Identifikasi Rincian *Output* Berdasarkan Tujuan, Target, Indikator TPB/SDGs

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun		
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.	<ul style="list-style-type: none">• Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial• Pengembangan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial• Pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan sosial tunai bagi keluarga miskin dan rentan • Pemberian bantuan rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin • Pemberian bantuan sosial tunai bersyarat bagi keluarga miskin • Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) • Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan
	1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi keluarga miskin dan rentan • Pemberian bantuan sosial tunai bagi keluarga miskin dan rentan • Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan • Pembinaan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan • Edukasi program jaminan sosial pada pelaku usaha • Pengembangan desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja
	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi keluarga miskin dan rentan • Pembinaan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan • Edukasi program jaminan sosial pada pelaku usaha • Pengembangan desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja • Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan
	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja pada perusahaan • Edukasi program jaminan sosial pada pelaku usaha • Pengembangan desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan	1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen daerah dan penguatan kapasitas perencanaan air minum dan sanitasi • Kerjasama antardesa untuk pengelolaan air minum dan sanitasi

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi sarana pelayanan dasar • Penyediaan sarana air bersih di daerah tertinggal dan perbatasan
	1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan tanah ulayat • Inventarisasi penguasaan dan pemilikan tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mandiri • Pelaksanaan legalisasi tanah (sertipikat hak atas tanah) • Pelaksanaan redistribusi tanah
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dana bantuan kedaruratan • Peningkatan kapasitas pengelola infrastruktur darurat • Pendampingan dan penanganan korban dan pengungsi • Pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan bagi personil • Pemberian bantuan bagi korban bencana sosial • Pemberian bantuan logistik tanggap darurat bagi korban bencana alam
	1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pemenuhan kebutuhan logistik pasca bencana • Pelayanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan SDA
	1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SPM sub bidang Bencana • Penerapan pengurangan risiko bencana • Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana • Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana di tingkat daerah
	1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan • Pelayanan budaya sadar bencana • Pemenuhan SDM pelaksanaan diklat teknis dan simulasi di daerah
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan • Pemberian bantuan sosial tunai bagi keluarga miskin dan rentan •
	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan indikator <i>mandatory spending</i> di tingkat daerah • Pemenuhan penganggaran SPM di daerah

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan padi, jagung, padi kaya gizi (biofortifikasi), kawasan sereal lainya • Pengembangan kawasan kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, aneka kacang dan umbi lainya • Pengembangan kawasan sagu • Penyediaan benih ternak unggul dan bibit ternak unggul • Pengembangan ternak ruminansia potong, ternak ruminansia perah, ternak unggas dan aneka ternak • Pengembangan kawasan sayuran • Pengembangan kawasan pisang, manggis, jeruk, durian, mangga, dan buah lainya • Distribusi pangan • Pengembangan pertanian keluarga • Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan • Peningkatan diversifikasi pangan • Pengembangan pekarangan pangan lestari
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan	2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) • Pemberian makanan tambahan bagi balita kurus • Suplementasi gizi mikro pada balita • Pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal • Surveilans gizi • Pembinaan posyandu aktif • Koordinasi lintas program/lintas sektor pencegahan <i>stunting</i>
	2.2.2* Prevalensi <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan <i>stunting</i> • Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Fasilitasi dan pembinaan pengawasan kualitas air minum • Imunisasi dasar lengkap • Penyediaan obat gizi • Pengawasan fortifikasi pangan • Pengembangan desa pangan aman • Promosi pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan • Fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu • Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif • Penyebaran informasi publik terkait <i>stunting</i> • Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) • Penyediaan sarana air minum • Penyediaan akses sanitasi • Fasilitasi K/L dan daerah dalam upaya penurunan <i>stunting</i> • Pengembangan pekarangan pangan lestari <i>stunting</i> • Pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) • Riset dan pengembangan asesmen kecukupan gizi dan produk pangan untuk pencegahan <i>stunting</i> • Pemberian bantuan sosial tunai bersyarat untuk keluarga miskin • Pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan • Bimbingan perkawinan pra nikah terkait kesehatan dan gizi
	2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan padi, jagung, padi kaya gizi (biofortifikasi), kawasan sereal lainya • Pengembangan kawasan kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, aneka kacang dan umbi lainnya • Pengembangan kawasan sagu • Penyediaan benih ternak unggul dan bibit ternak unggul • Pengembangan ternak ruminansia potong, ternak ruminansia perah, ternak unggas dan aneka ternak • Pengembangan kawasan sayuran • Pengembangan kawasan pisang, manggis, jeruk, durian, mangga, dan buah lainnya • Distribusi pangan • Pengembangan pertanian keluarga

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan • Peningkatan diversifikasi pangan • Pengembangan pekarangan pangan lestari
	2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan intervensi suplementasi gizi • Peningkatan pengetahuan gizi masyarakat
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan produksi tanaman pangan • Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap • Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas petani/peternak/nelayan
	2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana pasca panen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan • Penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan • Sertifikasi profesi bidang pertanian • Pengembangan wirausaha muda pertanian
	2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian • Pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi dan jaringan irigasi • Pengembangan <i>food estate</i>
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.	
	2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan	2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan galur harapan unggul tanaman • Pengembangan galur/rumpun unggul/ harapan ternak dan Tanaman Pakan Ternak

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
<p>peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Konservasi, karakterisasi, dan dokumentasi sumber daya genetik pertanian, peternakan, dan perkebunan
	2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bibit ternak
<p>2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.</p>	2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	
	2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	
<p>2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat <i>the Doha Development Round</i>.</p>	2.b.1* Subsidi ekspor pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan ekspor bagi dunia usaha sektor industri agro Fasilitasi peningkatan ekspor produk industri berbasis agro
<p>2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar</p>	2.c.1* Indikator anomali harga pangan.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan data dan informasi pasokan dan harga pangan Distribusi pangan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
<p>komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.</p>		
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		
<p>3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</p>	<p>3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian • Pembinaan RS yang melaksanakan operasi <i>sectio caesaria</i> darurat • Penguatan Unit Transfusi Darah (UTD) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), dan jejaring pelayanan transfusi darah • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak • Penyediaan vaksin imunisasi rutin • Penyediaan vaksin baru • Peningkatan pengetahuan kesehatan masa kehamilan, persalinan, nifas, KB dan perawatan BBL pada ibu hamil • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik • Suplementasi gizi mikro pada anak balita • Pelatihan tenaga kesehatan transfusi darah di UTD dan BDRS • Imunisasi dasar lengkap pada bayi • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA • Fasilitasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan • Bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan
<p>3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p>	<p>3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.</p>	
<p>3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p>	<p>3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS • Deteksi dini penyakit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS)
	<p>3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit TB

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB • Deteksi dini terduga TB • Pembinaan surveilans <i>anti microbial resistance</i> (AMR) di RS
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyemprotan insektisida pada dinding rumah • Pengendalian vektor malaria • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria • Penemuan aktif surveilans migrasi malaria
	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	
	3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit hepatitis • Surveilans dan deteksi dini penyakit hepatitis
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan • Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis dan kecacingan • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit kusta • Surveilans dan deteksi dini penyakit kusta
	3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.		
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	
	3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi layanan upaya berhenti merokok • Advokasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) • Pengawasan label dan iklan produk tembakau
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus-gangguan metabolik, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kanker dan kelainan darah • Promosi peningkatan literasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui berbagai media • Pemberdayaan kelompok masyarakat Germas • Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kesehatan kerja • Pelatihan kesehatan olahraga bagi tenaga kesehatan • Promosi makanan dan minuman sehat nusantara
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular • Pelayanan terpadu penyakit tidak menular (PTM)
	3.4.2 Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	
	3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan verifikasi penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis • Pelayanan pasca rehabilitasi • Penyediaan fasilitas dan pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah, komponen masyarakat • Pembentukan dan operasionalisasi unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) • Operasionalisasi lembaga rehabilitasi • Pemenuhan SPM lembaga rehabilitasi • Pelaksanaan program rehabilitasi 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan
	3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan peredaran dan penjualan produk minuman beralkohol 	
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen/kesepahaman kab/kota dalam kesehatan reproduksi • Bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB untuk provinsi • Fasilitasi pengelolaan SDM lini lapangan untuk provinsi • Bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan untuk provinsi • Bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk provinsi • Penyediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) • Integrasi rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak
	3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1.000 perempuan di kelompok umur yang sama.	
	3.7.2.(a) <i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang	3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk keluarga miskin dan rentan • Pembinaan FKTP yang memiliki sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
	3.8.1.(a) <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.	
	3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan RSUD yang memenuhi SPA sesuai standar • Pembinaan puskesmas dan RS di DTPK yang memenuhi SPA sesuai standar • Pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak • Pengembangan jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>
	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1 Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	
	3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	
	3.9.3 Angka kematian akibat keracunan.	
3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi layanan upaya berhenti merokok • Advokasi penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) • Pengawasan label dan iklan produk tembakau
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya,	3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan vaksin imunisasi rutin • Penerapan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi kab/kota
	3.b.2* <i>Total Official Development Assistant (ODA)</i> untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan penguatan di bidang kesehatan serta obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)
	3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar • Penggunaan obat sesuai FORNAS di RS • Penyediaan <i>buffer</i> obat dan perbekalan kesehatan program pelayanan kesehatan dasar

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
menyediakan akses obat bagi semua.		
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim • Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu • Pendayagunaan dokter spesialis • Pendayagunaan dokter pasca <i>internship</i> • Pendayagunaan tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes di fasyankes pemerintah
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1* Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB/wabah • Penyelidikan epidemiologi/investigasi penyakit potensial KLB/wabah • Surveilans dan deteksi dini penyakit potensial KLB/Wabah • Tindakan pengendalian pada KLB/wabah • Layanan kekarantina kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)
	3.d.2 Persentase infeksi aliran darah akibat organisme antimikroba-resisten terpilih/tertentu.	
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua		
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan asesmen hasil pendidikan • Pengembangan model penilaian pendidikan • Pengembangan perangkat pembelajaran • Pengembangan kurikulum yang berkompeten • Pengembangan model pembelajaran pendidikan • Pengembangan sistem informasi kurikulum dan perbukuan • Pembinaan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum • Penerapan kurikulum di sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah, lembaga pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus • Pengembangan buku umum dan buku pendidikan • Pengembangan minat baca
	4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
	4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan program afirmasi • Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan • Penataan guru dan tenaga kependidikan • Pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) • Pemberian bantuan sarana prasarana/ fasilitas pendidikan • Pemberian beasiswa • Pemberian bantuan lembaga pendidikan
	4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan • Peningkatan komitmen/kesepahaman dalam pelayanan kesehatan balita • Peningkatan kemitraan bidang PAUD dan <i>parenting</i> • Penyelenggaraan PAUD dengan pendekatan Holistik Integratif • Pembinaan peningkatan kapasitas untuk lembaga/mitra PAUD • Pendampingan satuan PAUD Penggerak • Penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku di satuan PAUD • Fasilitasi peningkatan pencapaian perkembangan anak untuk satuan PAUD • Fasilitasi penjaminan mutu satuan PAUD • Pemberian bantuan sarana pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) • Pemberian bantuan anak usia dini berkebutuhan khusus • Pembinaan afirmasi satuan PAUD • Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
	4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan kecakapan kerja bagi anak usia sekolah yang tidak sekolah • Pendidikan kecakapan wirausaha bagi anak usia sekolah yang tidak sekolah • Pengembangan lembaga kursus dan pelatihan berstandar industri • Pengembangan kurikulum SMK sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja (IDUKA) • Pembangunan dan revitalisasi SMK • Pelatihan peningkatan kualitas hidup bagi remaja dan perempuan dewasa • Pembinaan pendidikan kesetaraan bagi satuan pendidikan • Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pesantren

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana lembaga pendidikan keagamaan
	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi gedung dan sarana perguruan tinggi vokasi • Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan vokasi • Bantuan pendanaan PTN-BH • Bantuan Operasional Kopertais, Ma'had Aly, dan perguruan tinggi keagamaan • Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan bahan belajar berbasis TIK untuk pembelajaran (konten dan aplikasi) • Pengembangan model media pendidikan berbasis TIK • Penerapan TIK untuk e-pembelajaran di satuan pendidikan • Pengembangan perangkat pembelajaran
	4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) • Pemberian bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) • Penyelenggaraan program pendidikan inklusif • Pembinaan <i>Community Learning Center</i> (CLC) • Pemberian beasiswa unggulan • Pemberian beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) • Pemberian beasiswa afirmasi bagi mahasiswa • Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA) • Pemberian beasiswa S3 untuk dosen • Pemberian beasiswa prodi langka • Fasilitasi daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan keaksaraan
	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan	4.7.1 Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
<p>keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.</p>	
<p>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</p>	<p>4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan peralatan pendidikan • Pemberian bantuan sekolah di daerah 3T • Pemberian bantuan peningkatan mutu UKS/M • Pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah • Pemberian bantuan peningkatan kualitas pendidikan
	<p>4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak di daerah • Fasilitasi daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan • Pendidikan karakter dan ekstrakurikuler • Penguatan pemahaman moderasi beragama • Pemberian bantuan pengembangan madrasah inklusif
<p>4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi,</p>	<p>4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing kemitraan negara berkembang (KNB)

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.		
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi untuk guru dan tenaga kependidikan • Sertifikasi guru • Beasiswa guru • Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan		
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan kesetaraan gender • Penyusunan NSPK peningkatan kualitas hidup perempuan • Kebijakan peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) • Pelaksanaan Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) • Perumusan kebijakan perlindungan hak perempuan • Penyusunan NSPK bidang perlindungan hak perempuan • Pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO • Bimbingan teknis perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga dan rentan bagi SDM unit layanan • Bimbingan teknis perlindungan hak perempuan pekerja dan TPPO bagi SDM unit layanan • Fasilitasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan • Fasilitasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis perlindungan khusus anak dari kekerasan
	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus • Fasilitasi daerah dalam peningkatan kapasitas penyedia layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan • Penanganan komprehensif bagi AMPK • Perumusan kebijakan bidang pengasuhan dan lingkungan • Fasilitasi dalam sinergi program peningkatan partisipasi keluarga dalam PPPA • Pemberian bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga • Pemberian asistensi rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang/korban tindak kekerasan
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi daerah dalam pencegahan perkawinan anak • Fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu • Pemberian bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga
	5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik,	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>grand design</i> peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dan pengambilan keputusan • Fasilitasi peningkatan indeks PUG bagi K/L bidang politik dan hukum • Fasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
ekonomi, dan masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas • Fasilitasi PUG di bidang ekonomi
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	<p>5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.</p> <p>5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen/kesepahaman kab/kota dalam kesehatan reproduksi • Bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB untuk provinsi • Bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan untuk provinsi • Bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk provinsi • Fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu • Integrasi rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	<p>5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.</p> <p>5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan legalisasi tanah (sertipikat hak atas tanah)
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan saluran telekomunikasi (<i>ducting</i>) bersama • Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi (Palapa Ring, BTS/<i>Last mile</i>) • Penyediaan kapasitas satelit • Penyediaan akses internet
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan	5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dan informasi gender • Fasilitasi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan • Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di daerah

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua		
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum • Pembangunan, Peningkatan, dan Perluasan SPAM • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM • Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dan daerah • Peningkatan komitmen dan kapasitas provinsi • Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Sarana Air Minum • Fasilitasi kab/kota dalam Pengawasan Sarana Air Minum (SAM)
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi • Penyediaan SPALD-T Skala Kota/Regional, Skala regional, dan skala pemukiman • Penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi • Fasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi • Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah
	6.3.2. (a) Kualitas air permukaan sebagai air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku • Pemantauan Kualitas Air Otomatis dan Pengelolaan data dan informasi • Fasilitasi Pemantauan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA • Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan • Pemantauan Penurunan Muka Tanah dan cekungan air tanah • Pemutakhiran Data Eksplorasi dan Data Konservasi Cekungan Air Tanah
	6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku	
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan	6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan prasarana air baku • Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.	6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS • Penyusunan perencanaan, program, dan penganggaran pengelolaan SDA • Pengelolaan sistem data dan informasi sumber daya air • Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
	6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan • Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua		
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1* Rasio elektrifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi • Pengelolaan Ketenagalistrikan
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.	
	7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	7.1.2. (b) Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1* Bauran energi terbarukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi • Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi • Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global	7.3.1* Intensitas energi primer.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
sebanyak dua kali lipat.		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.	7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan (dalam watt perkapita).	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua		
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB per kapita	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan Internasional Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Pengembangan Perwilayahan Industri Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	8.1.1.(a) PDB per kapita	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi Pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan kemitraan usaha • Pengembangan kawasan <i>be creative district</i> (BCD) • Penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra • Penguatan kapasitas layanan usaha • Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi • Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan • Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan • Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan • Pengembangan Bisnis UKM Jasa • Digitalisasi Penguatan Produk Usaha Mikro • Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM • Penguatan Kapasitas Usaha • Perkuatan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro • Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja • Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Pelatihan Vokasi Industri • Penumbuhan Wirausaha • Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu • Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro • Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro • Inkubasi Calon Wirausaha • Pendampingan, Pengawasan, Penyuluhan dan Peningkatan SDM Koperasi • Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
	8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil • Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha • Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro • Perkuatan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan • Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
<p>8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i>, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.</p>	<p>8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penyuluhan
<p>8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</p>	<p>8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penerapan Pengupahan • Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja • Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
	<p>8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja • Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
	<p>8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Pelatihan Vokasi Industri • Penumbuhan Wirausaha • Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu • Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro • Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro • Inkubasi Calon Wirausaha • Pendampingan, Pengawasan, Penyuluhan dan Peningkatan SDM Koperasi • Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi • Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bidang Industri • Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK • Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) • Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata • Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif • Komunikasi Pemasaran • Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania) • Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah) • Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)
	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	
	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran Ekonomi Kreatif • Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan • Promosi Wisata Minat Khusus • Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran • Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) • Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	
	8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil • Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha • Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro • Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro • Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan • Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.	8.b.1 Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi		
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan	9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.	
	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.	<ul style="list-style-type: none"> • Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian • Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
<p>manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p>	9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	
	9.1.2.(a) Jumlah bandara.	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
<p>9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p>	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri berbasis perkebunan • Pengembangan industri berbasis hortikultura • Pengembangan industri berbasis tanaman obat • Pengembangan industri berbasis kehutanan • Pengembangan industri Kemaritiman • Pengembangan industri kimia, farmasi dan logam • Pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi • Kepastian hukum berusaha dan investasi • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil • Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil • Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro • Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika • Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri • Pengembangan Perwilayahan Industri • Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur • Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang • Standardisasi dan Pengendalian Mutu • Peningkatan Pelayanan Kalibrasi • Peningkatan Pelayanan Sertifikasi • Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri
	9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Vokasi Industri • Pendidikan Tinggi Vokasi Industri • Pendidikan Menengah Kejuruan Industri
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk • Pengembangan Bisnis UKM Produk • Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos • Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil • Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha • Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan • Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
	9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industry.	
	9.4.1 (b) Intensitas emisi sektor industri.	
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Inovasi Perguruan Tinggi, serta Pengabdian Masyarakat (BOPTN) • Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan • Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat • Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan • Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.		<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
	9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek • Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti
	9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian • Peningkatan kualitas lulusan PT
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1.(a) Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil • Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil • Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro • Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro • Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika • Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika • Penyelenggaraan Atase Perdagangan • Pengembangan Produk Ekspor • Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan • Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional • Perundingan Perdagangan Jasa • Perundingan Perdagangan Multilateral • Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN • Perundingan Perdagangan Bilateral • Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional • Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar • Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor • Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor • Pengembangan Promosi dan Citra • Kerja Sama Pengembangan Ekspor • Pengembangan Promosi Indonesia <i>Trade Promotion Center (ITPC)</i>
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.		
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan AntarNegara		
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* Koefisien Gini.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial • Penyelenggaraan Program Sembako • Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	
	10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Desa • Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar • Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna • Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan • Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan • Penataan sistem pelayanan administrasi desa • Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa • Peningkatan Penyuluhan • Pembangunan Sarana Prasarana Desa • Pengembangan Usaha Ekonomi Desa • Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan • Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan • Pembangunan Desa dan Perdesaan • Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal • Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Pengelolaan Perikanan Tangkap • Penyediaan Akses Rumah Layak Huni • Penyelenggaraan Sanitasi Yang Layak • Penyelenggaraan Air Minum Yang Layak • Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus • Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi • Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi • Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka • Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif • Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I
	10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri	
	10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal		

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II • Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha • Penumbuhan Wirausaha • Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro • Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro • Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi
<p>10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.</p>	<p>10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM • Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
	<p>10.3.1.(a) Indeks Kebebasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW • Fasilitasi Pengawasan
	<p>10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Komunikasi Masyarakat • Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah • Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
	<p>10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
<p>10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</p>	<p>10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD
	<p>10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
<p>10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.</p>	<p>10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik</p> <p>10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri • Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri • Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat • Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Sosial dan Budaya • Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional
	<p>10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan		
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Swadaya Baru • Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya Usaha • Fasilitasi Pelayanan Jasa rumah swadaya • Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI dan MBR/Pekerja • Pembangunan rumah khusus
11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan fasilitas keselamatan jalan • Pembangunan sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan • Pembangunan Sistem ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya • Pengembangan Kawasan yang Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasinya • Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api
	11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA • Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan • Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kawasan Konservasi • Pameran Wisata Destinasi Prioritas • Pengembangan Ruang dan Sarana Kreatif • Pembangunan dan Pengelolaan Museum • Pelestarian Karya Budaya dan Cagar Budaya
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pengelola infrastruktur darurat • Pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat • Pendampingan dan penanganan korban dan pengungsi • Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan
	11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan logistik dan peralatan PB • Pengendalian Logistik dan Peralatan PB
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sistem Persampahan skala regional, kota, dan kawasan • Pengelolaan Sistem Persampahan Berbasis Masyarakat • Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah • Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah • Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA • Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah
	11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang tertangani dengan pengelolaan yang baik	
	11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Data dan Informasi Kualitas Udara • Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara
	11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
	11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Tindak Pidana Umum • Pembinaan Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli • Pemberdayaan Potensi Keamanan • Penguatan Peran Bhabinkamtibmas
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya • Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial	11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengembangan data, informasi, rekomendasi dan layanan geologi

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
<p>jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>.</p>	<p><i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rekomendasi Mitigasi Bencana • Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana • Pengembangan Peta Kawasan Rawan Bencana • Pengelolaan Meteorologi BMKG • Penyelenggaraan Pengelolaan DAS • Peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS • Pengelolaan Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ <i>Real Time</i>
	<p>11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintahan daerah • Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah • Pembinaan kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat • Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan • Penyusunan Dokumen desain Pengendalian banjir • Pembangunan <i>engineering service project</i> • Peningkatan Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan • Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
<p>11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.</p>	<p>11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan standardisasi pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan
<p>Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan</p>		
<p>12.1 Melaksanakan the 10-Year <i>Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns</i>, dengan semua negara mengambil tindakan,</p>	<p>12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan pedoman standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan • Penyusunan dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.		
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1.(a) Indeks sampah makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah Pengurangan timbulan sampah nasional • Penanganan timbulan sampah nasional • Peningkatan fasilitas untuk pengurangan sampah
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan untuk Pengurangan dan penghapusan limbah B3 dan limbah medis • Penyediaan fasilitas pengujian limbah B3 • Penelitian dan pembinaan masyarakat untuk mengelola limbah B3 dan limbah medis
	12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	
	12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan konsumsi bahan perusak ozon
	12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan • Pengelolaan limbah medis • Pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu wilayah Sumatera • Pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu wilayah Papua • pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu wilayah Kalimantan • pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu wilayah Jawa Timur • Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah pengurangan timbulan sampah nasional • Penanganan timbulan sampah nasional • Pembangunan infrastruktur penanganan dan pengolahan sampah • Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan	12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan industri hijau • Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri • Penyusunan dan penerapan Standar Industri Hijau (SIH)
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1* Tingkatan (<i>degree</i>) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen rancangan standar (SNI dan Standar Khusus) • Penyusunan dokumen penerapan standar • Penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa • Penyusunan dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	
	12.7.1.(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan LH
	12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen penerapan standar • Penyusunan dokumen strategi pelaksanaan pencapaian sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan <i>sustainable tourism practices</i> di destinasi branding dan prioritas • Fasilitasi pelaksanaan <i>Sustainable Tourism Observatory (STO)</i> • Pembentukan manajemen krisis kepariwisataan
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya ,	12.c.1* Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan energi ramah lingkungan dan konservasi energi • Pengelolaan anggaran untuk energi ramah lingkungan dan konservasi energi
	12.c.1.(a) Jumlah Subsidi EBT sebagai persentase dari PDB	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak		
Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pengelola infrastruktur darurat • Pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan • Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat • Pendampingan dan penanganan korban dan pengungsi • Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan
	13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi • Penyusunan Rekomendasi Mitigasi Bencana • Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana • Pengembangan Peta Kawasan Rawan Bencana • Pengelolaan Meteorologi BMKG • Penyelenggaraan Pengelolaan DAS • Peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS • Pengelolaan Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ <i>Real Time</i>
	13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah • Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah • Pembinaan kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat • Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen desain Pengendalian banjir • Pembangunan Engineering service project • Peningkatan Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan • Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
<p>13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional</p>	<p>13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) dan <i>National Communications</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Data Pemantauan Aksi Mitigasi • Pemuktahiran dan Verifikasi Data Inventarisasi GRK
	<p>13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM • Pengelolaan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi • Restorasi lahan gambut • Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Penyusunan kajian dan standar industri hijau • Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau • Penyelenggaraan forum campaign dan penguatan Industri Hijau • Pengelolaan Sistem Persampahan • Rehabilitasi kawasan mangrove • Pembangunan Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh
	<p>13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)</p>	
	<p>13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)</p>	
<p>13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim</p>	<p>13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan • Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup
<p>13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada <i>the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua</p>	<p>13.a.1.(a) Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Perencanaan Perubahan iklim

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh <i>the Green Climate Fund</i> melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.		
Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan		
14.1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1.(a) Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Sampah Laut dan <i>Coastal Clean Up</i> • Pemantauan Kualitas Air Laut • Pengendalian pencemaran pesisir dan laut di pelabuhan • Penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan 14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan wilayah perairan laut yang memiliki dokumen perencanaan ruang laut • Pemulihan fungsi ekosistem lokasi pesisir dan laut • Rehabilitasi hutan mangrove/pantai • Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai • Peningkatan kapasitas kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove • Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) oleh lembaga
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data dan/atau Informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI • Pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.		
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang operasional • Operasionalisasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil • Pengembangan jejaring, kemitraan/kerjasama, dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut • Perlindungan dan/atau pelestarian keanekaragaman hayati perairan • Inisiasi, penetapan, dan pengelolaan cagar biosfer baru secara efektif dan efisien dalam rangka mencegah kehilangan kehati
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan • Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional • Fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha • Peningkatan kapasitas kelembagaannya bagi Kelompok Usaha Bersama
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>)	14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bantuan premi asuransi nelayan • Fasilitasi kredit bagi nelayan perikanan tangkap

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi diversifikasi usaha bagi keluarga nelayan
	14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.	
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari <i>"The future we want"</i> .	14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (<i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i>).	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan hubungan kerjasama luar negeri bidang kelautan dan perikanan

Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keaneekaragaman Hayati

15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan informasi penatagunaan kawasan hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis Penanaman/pengkayaan pada hutan produksi
	15.1.2.(a) Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang memiliki nilai esensial. Penetapan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati penting.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan	15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Penetapan Kawasan Hutan Peningkatan kapasitas SDM LHK di tingkat tapak Operasi pengamanan kawasan hutan Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.		
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan kerusakan lingkungan • Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan hutan
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan informasi keanekaragaman hayati • Rekomendasi kebijakan penetapan konservasi alam
	15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan	
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1* Indeks Daftar Merah (<i>Red-list index</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi luas kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL • Pengembangan entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati • Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar • Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau Terluar Indonesia : Primary • Perlindungan dan/atau pelestarian keanekaragaman hayati perairan terancam punah
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1* Kerangka kerja legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati • Pengembangan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk	15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kasus tindak pidana LHK sampai dengan P21

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup • Peningkatan kapasitas PPNS LHK
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1* Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing <i>invasive</i> (JAI).	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan sistem informasi perkarantina • Penyusunan kebijakan teknis karantina hewan dan keamanan hayati hewani • Penyusunan kebijakan teknis karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati • Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi target 2 dari Rencana Strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan entitas pemanfaatan keanekaragaman hayati • Pengembangan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan	15.b.1.(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.		
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	15.c.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kasus tindak pidana LHK sampai dengan P21 • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup • Peningkatan kapasitas PPNS LHK
Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Tindak Pidana Umum • Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli • Pemberdayaan Potensi Keamanan • Penguatan Peran Bhabinkamtibmas
	16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan almatsus (alat material khusus) • Pemenuhan almatsus (Sumber PHLN dan PDN) • Kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi • Pengamanan gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi
	16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Tindak Pidana Umum • Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli • Pemberdayaan Potensi Keamanan • Penguatan Peran Bhabinkamtibmas
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Tindak Pidana Umum • Penanganan Tindak Pidana Terorisme • Penanganan Tindak Pidana Narkoba • Penanganan Tindak Pidana Siber • Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli • Pemberdayaan Potensi Keamanan • Penguatan Peran Bhabinkamtibmas
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan	16.2.1 (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi daerah dalam pengasuhan berbasis hak anak • Fasilitasi daerah dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) • Fasilitasi daerah dalam pengembangan daycare ramah anak

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
penyiksaan terhadap anak.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan kelembagaan KLA • Fasilitasi daerah dalam peningkatan kualitas keluarga • Pelatihan tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan bagi korban ktp/A dan TPPO
	16.2.1 (b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) • Fasilitasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan • Fasilitasi daerah dalam bimbingan teknis tentang perlindungan khusus anak dari kekerasan • Fasilitasi daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus • Fasilitasi daerah dalam peningkatan kapasitas penyedia layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan • Penanganan yang komprehensif bagi AMPK
	16.2.2 (a) Jumlah korban perdagangan manusia dalam satu tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan kebijakan PHP pekerja dan TPPO • Koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG dan perlindungan perempuan pekerja dan TPPO • Advokasi dan KIE bagi K/L terkait kebijakan PHP pekerja dan TPPO • Penyediaan informasi hasil pelaksanaan kebijakan PHP pekerja dan TPPO • Bimbingan teknis bagi SDM unit layanan dalam perlindungan hak perempuan pekerja dan TPPO • Pelatihan tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dan TPPO
	16.2.3 (a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak di daerah
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1 (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tingkat Polres sesuai SPM yang terintegrasi secara <i>online</i> • Peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Pemenuhan SPM SPKT tingkat Polsek

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
	16.3.1 (b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan hukum litigasi • Bantuan hukum nonlitigasi
	16.3.1 (c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian perkara peradilan umum melalui pembebasan biaya perkara di wilayah • Penyelesaian perkara peradilan umum melalui sidang diluar gedung pengadilan • Pos Bantuan Hukum • Pelayanan bantuan hukum di lingkungan peradilan TUN • Penyelesaian perkara peradilan tata usaha negara melalui pembebasan biaya perkara • Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama melalui pembebasan biaya perkara • Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama melalui sidang di luar gedung • Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
	16.3.2 (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif
	16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan aksi HAM dalam RAN HAM • Verifikasi dan akreditasi OBH di wilayah • Integrasi <i>database</i> pengelolaan penanganan pelanggaran HAM • Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri • Peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan konstitusi
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1 (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan zona intergitas WBK/WBBM • Pembangunan zona integritas • Pelaksanaan survei penilaian integritas • Monitoring implementasi strategi nasional pencegahan korupsi • Peningkatan zona integritas wilayah • Evaluasi WBK/WBBM
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi peraturan dan pedoman mengenai pembayaran atas beban APBN • Pembinaan pelaksanaan anggaran
	16.6.1 (a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi peraturan dan pedoman mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah • Komunikasi dan edukasi penyusunan LKKL dan LKBUN

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
	16.6.1 (b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah
	16.6.1 (c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	<ul style="list-style-type: none"> Asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah di wilayah Evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di wilayah Penyusunan rekomendasi Tim RB nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas
	16.6.2 (a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	<ul style="list-style-type: none"> Review (pemetaan) sektor layanan strategis Integrasi data dan informasi sektor pelayanan publik strategis dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Standardisasi proses bisnis sektor pelayanan publik strategis Penyelesaian pengaduan pelayanan publik Perumusan kesepakatan replikasi inovasi pelayanan publik Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Pelaksanaan survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat Pelaksanaan survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan rumah pintar Pemilu Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas Penyusunan <i>grand design</i> peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif dan pengambilan keputusan Fasilitasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum
	16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi peningkatan indeks PUG pada K/L bidang politik dan hukum Fasilitasi daerah mitra dalam peningkatan indeks PUG

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
	16.7.2 (a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol • Bantuan keuangan ke partai politik • Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah • Perumusan kebijakan bidang politik dalam negeri • Publikasi informasi
	16.7.2 (b) Indeks Kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan rumah pintar Pemilu
	16.7.2 (c) Indeks Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum • Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas • Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana • Publikasi informasi • Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif • Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil <i>Piloting</i> • Pendidikan politik masyarakat di daerah • Peningkatan kapasitas pengurus ormas • Pengawasan netralitas ASN
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1 (a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam SMU PBB • Kerja sama multilateral terkait isu keamanan internasional • Kerja sama multilateral terkait isu senjata pemusnah massal dan konvensional • Kerja sama multilateral terkait isu penanggulangan kejahatan lintas negara • Kerja sama multilateral terkait isu terorisme • Kerjasama multilateral dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM • Kerjasama multilateral dalam rangka penanganan isu kemanusiaan • Kerjasama multilateral terkait isu pembangunan ekonomi dan keuangan • Kerjasama multilateral terkait isu lingkungan hidup • Kerjasama multilateral terkait isu perdagangan • Kerjasama multilateral terkait isu komoditas • Kerjasama multilateral terkait isu kekayaan intelektual • Kerja sama multilateral terkait isu sosial budaya • Kerja sama multilateral terkait isu organisasi internasional negara berkembang

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi keanggotaan tidak tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB • Kerja sama ASEAN dengan mitra wicara dan organisasi regional/ internasional • Perumusan prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Aspasaf • Perumusan prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa
<p>16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</p>	<p>16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan akta kelahiran • Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) • Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak • Fasilitasi K/L dalam pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak • Fasilitasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak sipil dan informasi layak anak
	<p>16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah</p>	
	<p>16.9.1 (b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun</p>	
<p>16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p>	<p>16.10.1 (a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pengaduan masyarakat terhadap kasus pers dan layanan saksi ahli pers • Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers
	<p>16.10.1 (b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak korban • Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM • Penanganan perkara pelanggaran HAM • Mediasi perkara pelanggaran HAM • Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat • Pengamatan situasi atas pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dan hak sipil dan politik masyarakat Papua
	<p>16.10.1 (c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan perangkat standar pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan • Perumusan rekomendasi mekanisme penanganan dan pencegahan konflik terhadap perempuan di Aceh dan Maluku (<i>Centre of Peace</i>) • Perumusan rekomendasi penguatan mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban pelanggaran HAM • Penyusunan konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
		<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut terhadap rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan
	16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan NSPK pengelolaan bidang komunikasi publik Diseminasi informasi di wilayah 3T melalui mitra strategis Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik
	16.10.2 (a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah
	16.10.2 (b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian sengketa informasi publik
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan <i>Paris Principles</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen organisasi Komnas HAM Pengelolaan keuangan Komnas HAM
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1 (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan standar norma dan pengaturan HAM Tindak lanjut rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban Adopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja dalam kebijakan/ regulasi pemerintah daerah
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan		
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	<ul style="list-style-type: none"> Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>Core Tax Administration System</i>) Intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak dan perluasan barang kena cukai Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tarif cukai HT • Penguatan kelembagaan penerimaan negara • Penyempurnaan regulasi PNBP • Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP • Peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) • Pengembangan pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP • Pengembangan PNBP-<i>earmark</i> untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru • Penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi • Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah • Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	17.2.1.(a) Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerjasama pembangunan internasional
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
<p>17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</p>	<p>17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan utang yang produktif dan efisien
<p>17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</p>	<p>17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga</p> <p>17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan infrastruktur TIK • Fasilitas pendukung transformasi digital • Pemanfaatan infrastruktur TIK
<p>17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi</p>	<p>17.8.1* Persentase pengguna internet</p>	

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.		
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	<p>17.9.1.(a) Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST</p> <p>17.9.1.(b) Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi sektor swasta dalam KSST • Peningkatan Kerjasama pembangunan internasional • Penciptaan manfaat ekonomi dari kerjasama pembangunan internasional • Peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas • Penguatan Citra positif Indonesia dalam pergaulan Internasional • Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan Global • Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik • Penguatan kepemimpinan di dunia internasional • Peningkatan diplomasi maritim, perdamaian, kemanusiaan, dan kerja sama ekonomi dalam upaya pengaruh Indonesia di tatanan internasional
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i>	17.10.1.(a) Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) • Peningkatan efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan diplomasi ekonomi
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa • Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor • Pengelolaan impor • Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif • Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global • Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta	17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan

Tujuan/Target	Indikator	Intervensi
dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, persiapan dan transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta dan masyarakat • Pengoptimalisasian dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. • Peningkatan inovasi pendanaan pembangunan
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta • Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data • Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM • Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik • Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia • Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.
	17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	
	17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi	
	17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>) • Pembentukan Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB • Percepatan cakupan administrasi kependudukan • Integrasi sistem administrasi kependudukan
	17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	
	17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	
	17.19.2(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).	

Melalui *self assessment*, apabila suatu rincian *output* teridentifikasi ditujukan atau relevan dengan upaya pencapaian target dan indikator di atas, maka rincian *output* tersebut dapat

dikategorikan berkontribusi terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs dan K/L selanjutnya dapat melaksanakan penandaan anggaran TPB/SDGs.

Perlu dipahami bahwa nomenklatur intervensi yang ada pada Tabel 3.3. berbeda dengan nomenklatur rincian *output* kegiatan pada struktur perencanaan dan penganggaran. Intervensi pada tabel adalah segala aktivitas yang mendukung pencapaian target dan indikator TPB/SDGs baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak tertutup kemungkinan **terdapat intervensi selain yang tersebut di atas yang dapat berkontribusi dalam upaya pencapaian TPB/SDGs.**

BAB IV

PENUTUP

Penandaan anggaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan upaya untuk memastikan intervensi yang mendukung pencapaian target dan indikator TPB/SDGs yang telah dituangkan di dalam Peta Jalan TPB/SDGs 2030 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan. Penandaan anggaran juga akan memudahkan identifikasi rincian *output* serta besaran alokasi anggaran untuk setiap intervensi kementerian/lembaga (K/L) yang ditujukan untuk pencapaian target dan indikator TPB/SDGs.

Kontribusi dan peran aktif K/L sangat penting dalam mengidentifikasi rincian *output* terkait pencapaian TPB/SDGs dan dalam melakukan penandaan pada aplikasi KRISNA. Demikian juga dengan peran aktif Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Anggaran di Kementerian Keuangan untuk memastikan ketepatan rincian *output* K/L yang dilakukan penandaan dan meningkatkan kepatuhan K/L dalam melakukan penandaan anggaran TPB/SDGs. Pedoman ini diharapkan dapat membantu proses penandaan anggaran TPB/SDGs. Hasil dari proses penandaan selanjutnya akan digunakan sebagai basis dalam pemantauan dan evaluasi untuk menilai kinerja tahunan dari program/kegiatan pemerintah pusat dalam pencapaian target dan indikator TPB/SDGs.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tata Cara Penandaan Anggaran pada Penyusunan Renja K/L dalam Sistem Informasi KRISNA Renja K/L

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sarana dan Prasarana

Personal Computer (PC), Laptop, atau Smartphone yang terhubung dengan internet

2. Akses

Username dan password untuk dapat mengakses sistem informasi KRISNA

3. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung yang diperlukan pada saat proses *input* atau penelaahan dalam sistem informasi KRISNA (informasi RO, target volume, alokasi, serta ToR dan RAB sesuai hasil kesepakatan *trilateral meeting* penyusunan Renja dan RKA K/L).

4. Pemahaman Proses

Pemahaman terhadap seluruh regulasi dan aturan dalam melakukan proses *input* atau penelaahan dalam sistem informasi KRISNA.

TAMPILAN DEPAN SISTEM INFORMASI KRISNA

Pengguna mengakses portal melalui alamat: <http://krisna.systems>

Kementerian PPN/BAPPENAS Kementerian Keuangan Kementerian PAN RB Kementerian Dalam Negeri

KRISNA 3.0
KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN

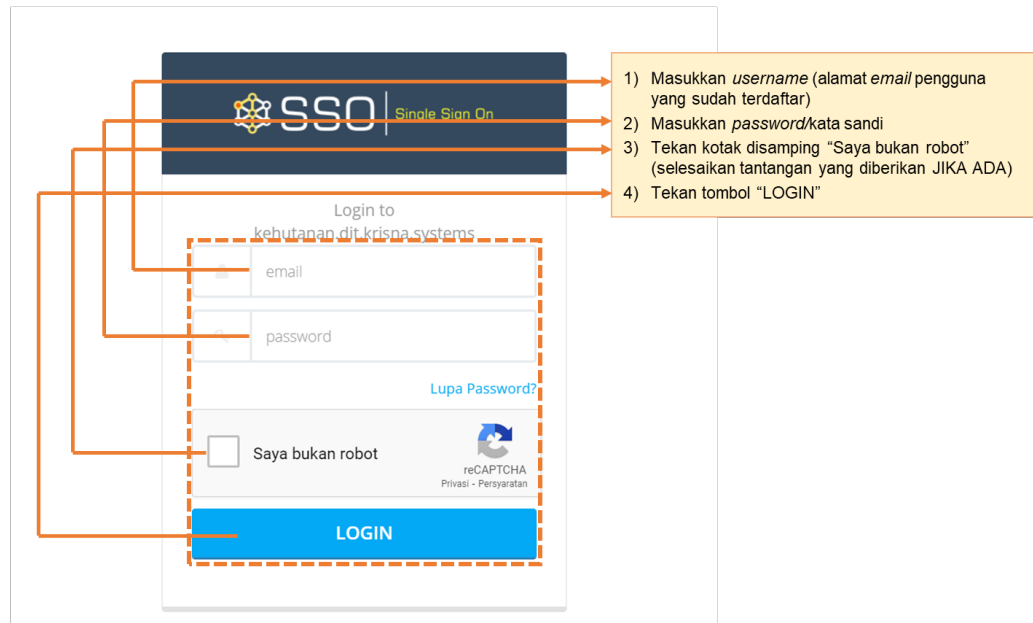
Kementerian/Lembaga
Pilih Portal

KUNJUNGI PORTAL

Langkah selanjutnya:
1) Memilih portal "Kementerian/Lembaga" (atau Kementerian PPN/Bappenas atau Kementerian Keuangan bagi penelaah)
2) Memilih salah satu Kementerian/Lembaga terkait pada portal
3) Tekan tombol "Kunjungi Portal"

@krisna_systems Sistem Informasi Krisna

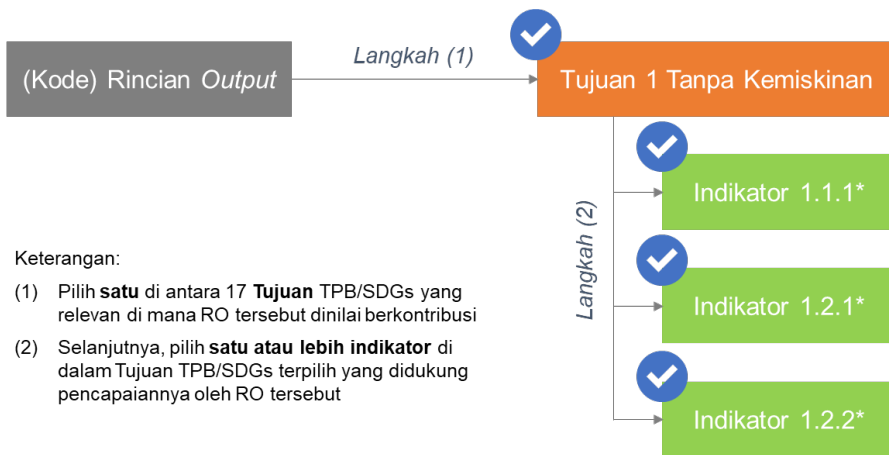
LOGIN ATAU MASUK KE SISTEM INFORMASI KRISNA



Langkah Selanjutnya:

1. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan laman untuk penyusunan Renja K/L. Perhatikan Tahun Anggaran Renja K/L.
2. Pilih menu program dan kegiatan pada dashboard.
3. Daftar program K/L akan muncul secara berurutan sesuai dengan kode program. Pilih salah satu program K/L.
4. Daftar kegiatan K/L akan muncul secara berurutan sesuai dengan kode kegiatan. Pilih salah satu kegiatan K/L.
5. Daftar Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) akan muncul. Pilih salah satu KRO.
6. Daftar Rincian *Output* (RO) akan muncul secara berurutan sesuai dengan kode RO. Klik gambar berbentuk *gear* dan pilih menu ubah.
7. List *tagging* akan muncul. Silahkan pilih *tagging* SDGs, pilih/klik salah satu Tujuan (*goal*) yang didukung oleh RO tersebut, kemudian klik indikator (bisa lebih dari satu) yang didukung oleh RO tersebut.

Satu rincian *output* hanya bisa dilakukan penandaan untuk **1 (satu) Tujuan TPB/SDGs** yang relevan. Selanjutnya, rincian *output* dapat ditandai untuk mendukung **lebih dari 1 (satu) indikator** dalam Tujuan TPB/SDGs tersebut.



Keterangan:

- (1) Pilih **satu** di antara 17 **Tujuan** TPB/SDGs yang relevan di mana RO tersebut dinilai berkontribusi
- (2) Selanjutnya, pilih **satu atau lebih indikator** di dalam Tujuan TPB/SDGs terpilih yang didukung pencapaiannya oleh RO tersebut

The screenshot shows the 'RINCIAN OUTPUT' interface. The main table lists two entries:

NO	KODE #	NOMENKLATUR RINCIAN OUTPUT #	ALOKASI 2022	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	SATUAN	STATUS	PENELAHAH
1	6274.QDC.101	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Yang Diberdayakan	55.564.269,0					Orang	pending-add	X, ✓, 🔒
2	6274.QDC.102	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Yang Diberdayakan	7.370.000,0					Orang	pending-add	X, ✓, 🔒

Below the table, there is a '# Dynamic Tagging' button. A modal window titled 'ADD DYNAMIC TAGGING' is open, showing a 'Tagging list' with the following items:

- 01 - SDGs
- 01.01 - goal1
- 01.01.01 - indikator1
- 02 - Stunting
- 03 - Inflasi
- 04 - KEREN

Text next to the modal: "Tagging list berisi semua level Dynamic Tagging, yaitu Cluster, Goal, dan Indikator. User dapat memilih multiple tagging". The modal has 'Tutup' and 'Simpan' buttons.

8. Setelah seluruh pengisian selesai, jangan lupa klik "simpan". Data akan tersimpan sesuai hasil *input*.

Lampiran 2. Daftar Rincian Output SDGs Menurut K/L

Kementerian/Lembaga: 005. Mahkamah Agung (MA)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
005.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (TA 2020)	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.001	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku Utara	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.002	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Banten	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.003	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bangka Belitung	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.004	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Gorontalo	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.005	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Barat	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.007	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Tengah	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.008	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.009	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Timur	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.010	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Banda Aceh	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.011	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Utara	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.012	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sumatera Barat	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.013	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Riau	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
1049.QBA.014	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi	Tujuan 16 (16.3.1.(c))		

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		1049.QBA.015	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Palembang	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.016	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Lampung	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.017	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Barat	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.018	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.019	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Selatan	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.020	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Timur	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.021	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Utara	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.022	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tengah	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.023	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.024	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Tenggara	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.025	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Maluku	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.026	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Denpasar	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.027	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Barat	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.028	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Nusa Tenggara Timur	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.029	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Papua	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.030	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Bengkulu	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.031	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
1059	Peningkatan manajemen peradilan Tata Usaha Negara	1059.QBA.001	Pengguna Layanan yang dilayani bantuan hukum di Lingkungan Peradilan TUN	Tujuan 16 (16.3.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		1059.QBA.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1053.QBA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
		1053.QBA.003	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Tujuan 16 (16.3.1.(c))
005.WA Program Dukungan Manajemen				
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I	1077.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	1078.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	5258.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	5259.TAK.001	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Tujuan 16 (16.5.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 006. Kejaksaan Republik Indonesia

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
006.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1109	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	1109.PEF.001	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	Tujuan 16 (16.3.2.(a))
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	1103.QAA.004	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Tujuan 16 (16.3.3.(a))
006.WA Program Dukungan Manajemen				
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitas Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	1083.TAK.001	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI	Tujuan 16 (16.5.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 010. Kementerian Dalam Negeri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
010.CM Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa				
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	6139.FBA.037	Fasilitasi Penyusunan RAD AMPL	Tujuan 1 (1.4.1*)
		6139.UBA.001	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar bidang Sanitasi	Tujuan 1 (1.4.1*), Tujuan 12 (12.8.1.(b))
		6139.UBA.013	Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Tujuan 1 (1.4.1*)
		6139.UBA.014	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	Tujuan 1 (1.4.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6139.UBA.015	Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman	Tujuan 1 (1.4.1*)
		6139.UBA.016	Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)	Tujuan 1 (1.4.1*)
		6139.UBA.017	Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)	Tujuan 1 (1.4.1*)
		6139.UBA.011	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan <i>stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		6139.UBA.023	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis hak	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5 (5.6.1*, 5.6.2*)
		6139.UBA.024	Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Tujuan 5 (5.c.1*)
		6139.UBA.008	Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda	Tujuan 6 (6.1.1*)
		6139.UBA.009	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas	Tujuan 6 (6.1.1*)
		6139.UBA.010	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi	Tujuan 6 (6.1.1*)
		6139.UBA.011	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (kab/kota)	Tujuan 6 (6.2.1*)
		6139.UBA.012	Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi	Tujuan 6 (6.2.1*)
		6139.UBA.014	Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Tujuan 6 (6.5.1*)
		6139.UBA.020	Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		6139.UBA.015	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
1244	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	1244.AEC.002	Desa yang telah bekerjasama antar desa dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	Tujuan 1 (1.4.1*)
		1244.FBB.004	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Tujuan 10 (10.1.1.(b))
		1244.FBB.004	Penguatan kelembagaan pemerintah desa	Tujuan 10 (10.1.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana	Tujuan 1 (1.5.3*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		6136.UBA.004	Penerapan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah	Tujuan 1 (1.5.3*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		6136.UBA.005	Daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan tanggap darurat	Tujuan 1 (1.5.3*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/ Layanan, dan Barang Milik Daerah	6141.UBA.002	Daerah yang Memenuhi Indikator <i>Mandatory Spending</i>	Tujuan 1 (1.a.2*)
		6141.UBA.004	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	Tujuan 1 (1.a.2*)
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	1248.FAC.004	Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional	Tujuan 10 (10.1.1.(b))
		1248.UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Tujuan 17 (17.1.1.(a))
1283	Pembinaan inovasi daerah	1283.UBA.003	Penerapan pilot project inovasi daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
1241	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1241.UBA.001	Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	1237.PEC.015	Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP	Tujuan 12 (12.b.1.(a))
		1237.UBA.002	Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Tujuan 17 (17.1.1.(a))
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	3991.UAE.001	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil <i>review</i> Kemendagri	Tujuan 17 (17.1.1.(a))
010.CP Program Tata Kelola Kependudukan				
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1271.UBA.002	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*), Tujuan 17 (17.19.2.(b))
		1271.UBA.008	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	Tujuan 16 (16.9.1*, 16.9.1.(a), 16.9.1.(b))
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	1269.QAA.004	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f)), Tujuan 16 (16.9.1*, 16.9.1.(a), 16.9.1.(b))
010.CR Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
6145	Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	6145.QDC.002	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	Tujuan 16 (16.7.2.(a))
		6145.QEI.001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	Tujuan 16 (16.7.2.(a))
		6145.UBA.001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Tujuan 16 (16.7.2.(a))
		6145.PBC.001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Tujuan 16 (16.7.2.(a))
		6145.QDC.001	Pendidikan Politik masyarakat di Daerah	Tujuan 16 (16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
		6145.QDD.002	Kapasitas Pengurus Ormas	Tujuan 16 (16.7.2.(b), 16.7.2.(c))

Kementerian/Lembaga: 011. Kementerian Luar Negeri

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
011.12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolanan dan Kekonsuleran (TA 2020)				
1341	Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	1341.004	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (TA 2020)	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))
		1341.005	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI (TA 2020)	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))
011.AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik				
6028	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat	6028.QAA.001	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))
		6028.BAH.003	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))
4439	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Perwakilan RI	4439.QAA.001	Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))
011.09 Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional (TA 2020)				
1335	Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Hukum dan Perjanjian Sosial dan Budaya	1335.001	Hukum dan Perjanjian di Bidang Sosial Budaya	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))
011.AM Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional				
6030	Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional	6030.AEC.003	Kesepakatan Hukum dan Perjanjian di Bidang Sosial dan Budaya	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
011.AK Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri				
6021	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral	6021.AEB.051	Partisipasi Aktif Indonesia dalam SMU PBB	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.053	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.054	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Senjata Pemusnah Massal dan Konvensional	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.055	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.056	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Terorisme	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.057	Kerjasama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.058	Kerjasama Multilateral dalam Rangka Penanganan Isu Kemanusiaan	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.059	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.060	Kerjasama Multilateral Terkait Isu Lingkungan Hidup	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.061	Kerjasama Multilateral terkait isu Perdagangan	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.062	Kerjasama Multilateral terkait isu Komoditas	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.063	Kerjasama Multilateral terkait isu Kekayaan Intelektual	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.064	Kerja Sama Multilateral terkait Isu Sosial Budaya	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.AEB.065	Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Organisasi Internasional Negara Berkembang	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
		6021.PEB.067	Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB Optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan HAM PBB	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
6020	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN	6020.AEB.001	Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
011.AA Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional				
6024	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	6024.AEB.001	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Aspasaf	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
6025	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Amerika dan Eropa	6025.AEB.001	Prakarsa/rekomendasi pada forum intra kawasan dan antar kawasan Amerika dan Eropa	Tujuan 16 (16.8.1.(a))
6026	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	6026.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bantuan Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 013. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
013.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM				
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	1607.ABD.001	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(b))
		1607.ABD.002	Rekomendasi Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat secara Non Yudisial	Tujuan 10 (10.3.1.(b))
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	5255.ABD.002	Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(b))
1606	Kerja Sama HAM	1606.PBD.003	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RAN HAM	Tujuan 16 (16.3.3.(a))
013.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
4841	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	4841.QBA.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Tujuan 16 (16.3.1.(b))
		4841.QBC.001	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Tujuan 16 (16.3.1.(b))
		4841.PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Tujuan 16 (16.3.3.(a))
013.WA Program Dukungan Manajemen				
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	1563.TAK.001	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	1564.TAK.001	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	1565.TAK.001	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	1566.TAK.001	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	1567.TAK.001	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	1567.TAK.001	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	Tujuan 16 (16.5.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 015. Kementerian Keuangan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
015.CB Program Pengelolaan Belanja Negara				
4778	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4778.FAD.007	Nota Keuangan APBN/P	Tujuan 10 (10.4.1.(a)), Tujuan 12 (12.c.1*)
015.CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko				
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6212.BMB.003	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	Tujuan 16 (16.6.1*)
		6212.FAL.001	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Tujuan 16 (16.6.1*)
		6212.BMB.002	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Tujuan 16 (16.6.1.(a))
		6212.FAH.003	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	Tujuan 16 (16.6.1.(a))
015.CE Program Kebijakan Fiskal				
4771	Kegiatan Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4771.AAC.001	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPSP	Tujuan 17 (17.1.1*)
4773	Pengelolaan Pembiayaan Syariah	4773.PAC.937	Kajian perubahan PP terkait pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi pemerintah	Tujuan 17 (17.4.1*)
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	5135.001	Rekomendasi Posisi Indonesia dalam Pertemuan Internasional di Forum Regional dan Bilateral <i>- 055 Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular</i>	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	4762.ABA.003	Rekomendasi kebijakan dan strategi diplomasi terkait ekonomi pembangunan internasional	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	4764.ABA.006	Pelaksanaan Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
015.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara				
4790	Kegiatan Perumusan Kebijakan Administratif	4790.AAH.004	Peraturan Menteri Terkait Pengelolaan Penerimaan	Tujuan 17 (17.1.1*)
6208	Kebijakan Perumusan Kebijakan Administratif	6208.AAG.001	Peraturan Menteri Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	Tujuan 17 (17.1.1*)
015.14 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (TA 2020)				
1723	Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	1723.002	Penyaluran Hibah	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
015.WA Program Dukungan Manajemen				
6389	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	6389.FAM.002	Perjanjian Penyaluran Hibah	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 018. Kementerian Pertanian

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	1761.CAI.611	Kawasan Kedelai	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1761.RAI.612	Kawasan Ubi Kayu	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1761.RAI.613	Kawasan Ubi Jalar	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1761.CAI.614	Kawasan Kacang Tanah	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1761.CAI.615	Kawasan Kacang Hijau	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1761.CAI.618	Kawasan Aneka kacang dan Umbi Lainnya (Ha)	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	1762.RAI.621	Kawasan Padi	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1762.RAI.622	Kawasan jagung	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1762.RAI.625	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a), 2.2.1*, 2.2.2*)
		1762.CAI.626	Kawasan Serealia Lainnya	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1777.RAI.006	Kawasan Sagu	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1785.PDA.001	Benih Ternak Unggul	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1785.PDA.002	Bibit Ternak Unggul	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1785.QEH.002	Ternak ruminansia potong	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1785.QEH.003	Ternak ruminansia perah	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1785.QEH.004	Ternak unggas dan aneka ternak	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1771.CAI. 014	Kawasan Sayuran Lainnya	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	5886.CAI.010	Kawasan Pisang	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		5886.CAI.011	Kawasan Manggis	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		5886.CAI.016	Kawasan Jeruk	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		5886.CAI.017	Kawasan Buah Lainnya	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5886.RAI.012	Kawasan Durian	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		5886.RAI.013	Kawasan Mangga	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
1814	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1814.QDD.001	Pangan yang terdistribusi	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a), 2.c.1*)
		1814.BMA.001	Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan	Tujuan 2 (2.c.1*)
1815	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1815.QDD.001	Pertanian keluarga	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1815.BMA.003	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
1816	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1816.BDD.001	Diversifikasi pangan	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1816.QDD.001	Pekarangan Pangan Lestari	Tujuan 2 (2.1.1*, 2.1.2*, 2.2.2.(a))
		1816.QDD.002	Pekarangan pangan lestari <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1795.PBR.002	Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
018.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5885.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5885.RAG.002	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	5887.RAG.010	Sarana Pascapanen Hortikultura	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5887.RAG.011	Sarana Pengolahan Hortikultura	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5887.RBK.010	Prasarana Pascapanen Hortikultura	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5887.RBK.011	Prasarana Pengolahan Hortikultura	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	5891.RAG.001	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
		5891.RBK.001	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
018.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1810.PDI.001	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
5892	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	5892.QDD.001	Wirasahawan Muda Pertanian	Tujuan 2 (2.3.1.(a))
018.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	4584.SDA.508	Sumber Daya Genetik yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Tujuan 2 (2.5.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4585	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	4585.DDA.508	Sumber Daya Genetik Peternakan yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Tujuan 2 (2.5.1*)
		4585.DDA.536	Sumber Daya Genetik Perkebunan yang Terkonservasi, Terkarakterisasi dan Terdokumentasi	Tujuan 2 (2.5.1*)
		4585.SDA.502	Galur Harapan Tanaman	Tujuan 2 (2.5.1*)
		4585.DDA.522	Bibit Ternak	Tujuan 2 (2.5.2*)
018.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian				
1747	Fasilitasi Bantuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Pertanian	1747.AEC.102	Jumlah kegiatan KSST Bidang Pertanian	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 019. Kementerian Perindustrian

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
019.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
6045	Kegiatan Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro	6045.ABI.001	<i>Business Plan</i> Industri IVO/ILO (<i>Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil</i>) sebagai bahan baku Industri <i>Greenfuel/B100</i>	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*)
		6045.ABI.002	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) dan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> yang disusun untuk pembangunan <i>Pilot Plant</i> Industri IVO/ILO (<i>Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil</i>) sebagai bahan baku Industri <i>Greenfuel/B100</i>	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*)
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6056.BDI.001	Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKFT	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	6058.BDI.001	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
		6058.BDI.002	Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6058.BDI.003	Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan Apparel	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro	6044.BDI.001	Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro	6049.BDI.001	Industri yang diberikan Fasilitas Peningkatan Ekspor	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro	6051.BDI.001	Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yg dilakukan pendampingan penerapan industry 4.0	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
		6051.BDI.002	Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6068.BDI.001	Industri yang terfasilitasi melalui <i>Export Coaching</i> Dalam Rangka Peningkatan Ekspor	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	6070.BDI.001	Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
		6070.BDI.002	Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan dan <i>Center of Excellence</i>	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
		6070.BDI.003	Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a), 9.b.1, 9.b.1.(a))
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	6071.BDI.011	IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6071.BDI.013	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6071.BDI.016	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6071.BDI.018	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6071.BDI.022	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6071.BDI.024	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6071.BDI.010	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a)), Tujuan 9 (9.3.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6071.BDI.015	Wirausaha Industri Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan Yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a)), Tujuan 9 (9.3.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6071.BDI.021	Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a)), Tujuan 9 (9.3.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6071.BDI.032	IKM yang mendapatkan fasilitas promosi dan pendampingan pembiayaan KUR	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a)), Tujuan 9 (9.3.2*)
		6071.BDD.001	Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitas	Tujuan 9 (9.3.1*)
		6071.BDD.002	Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka yang mendapat Fasilitas	Tujuan 9 (9.3.1*)
		6071.BDD.003	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas	Tujuan 9 (9.3.1*)
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri	6074.BDH.001	Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6074.BDH.002	Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a)), Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
6073	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri	6073.BDH.002	Peningkatan kemitraan dalam <i>Global Value Chain</i>	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		6073.ABK.004	<i>Industrial Intelligence</i> dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
6078	Pengembangan Industri Hijau	6078.ABK.002	Kajian Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri	Tujuan 12 (12.4.2*)
		6078.BDI.001	Fasilitas Sertifikasi Industri Hijau	Tujuan 12 (12.6.1*, 12.6.1.(a)), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6078.BIC.001	Hasil Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Tujuan 12 (12.6.1*, 12.6.1.(a)), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.BKB.001	Hasil Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau	Tujuan 12 (12.6.1*, 12.6.1.(a)), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.ABK.001	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.ABK.003	Kajian Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.AFA.001	Rancangan Standar Industri Hijau	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.AEB.001	Forum Campaign Penerapan Standar Industri Hijau	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.AEB.002	Forum Penghargaan Industri Hijau	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6078.AEB.003	Forum Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
019.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
4957	Pelatihan Vokasi Industri	4957.ADI.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten yang Tersertifikasi	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.2.2*)
		4957.DCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.2.2*)
		4957.BDC.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri	4958.DAG.001	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.2.2*)
		4958.DAG.002	Mahasiswa dan Lulusan Program D I dan D II Berbasis Kompetensi	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.2.2*)
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	4959.DAG.001	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.2.2*)
019.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
6080	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri	6080.DDB.001	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri agro (PRN Industri Agro)	Tujuan 9 (9.5.1*)
		6080.DDB.002	Teknologi yang dikembangkan bidang teknologi industri KFTLMATE (PRN Industri KFTLMATE)	Tujuan 9 (9.5.1*)

Kementerian/Lembaga: 020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
020.FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi				
6346	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	6346.PBS.412	Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b)), Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.PBS.514	Titik Pemantauan Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6346.ABS.307	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi dan Kebencanaan Geologi	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.ABS.308	Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana Geologi	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.ABI.007	Rancang Bangun dan Uji Coba Peralatan Monitoring Gunungapi	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.PBS.201	Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.PBS.202	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.PBS.206	Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.ABS.203	Rekomendasi Teknis Mitigasi Bencana Geologi (Erupsi Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami dan Gerakan Tanah)	Tujuan 11 (11.b.1*)
		6346.ABS.204	Sosialisasi dan Informasi Mitigasi Bencana Geologi	Tujuan 11 (11.b.1*)
6346.ABS.309	Data dan Informasi Hasil Penyelidikan, Penelitian, Pengembangan Metode dan Analisis Laboratorium Kebencanaan Geologi	Tujuan 11 (11.b.1*)		
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi	6347.PBI.401	Cekungan Air Tanah yang Dipantau	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6347.PBI.502	Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6347.ABI.401	Jumlah Data Eksplorasi Air Tanah yang dimutakhirkan	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6347.ABI.503	Data Konservasi Cekungan Air Tanah Jakarta yang dimutakhirkan	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6347.PBI.401	Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
		6347.PBI.005	Mitigasi Bencana Geologi untuk Penataan Ruang	Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
020.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan				
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6353.QEG.002	Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL)	Tujuan 7 (7.1.1*, 7.1.1.(a))
		6353.BEG.001	PLT EBT (Revitalisasi)	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6353.BEG.002	PLTS Penunjang Tugas Teknis K/L	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6353.QEG.001	PLTS <i>Rooftop</i>	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6353.QEG.001	PLTS Atap	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6353.BEG.003	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Tujuan 7 (7.3.1*)
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan	6350.PBI.008	Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	Tujuan 7 (7.1.1*, 7.1.1.(a))
		6350.PBI.007	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	Tujuan 7 (7.1.1*, 7.1.1.(a))
		6350.PBI.005	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	Tujuan 7 (7.1.1*, 7.1.1.(a))
		6350.PBI.006	Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	Tujuan 7 (7.1.1*, 7.1.1.(a))
		6350.PBI.010	Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik (IPL) pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	Tujuan 7 (7.1.1*, 7.1.1.(a))
		6350.PBI.001	Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Tujuan 12 (12.a.1*)
		6350.PBJ.001	Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Tujuan 12 (12.c.1*), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
6349	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	6349.QEG.003	Infrastruktur Jaringan gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	Tujuan 7 (7.1.2.(a), 7.1.2.(b))
		6349.xxx.xxx	Layanan Perencanaan, Pengadaan dan Pengawasan Infrastruktur Migas (KPBUM)	Tujuan 7 (7.1.2.(a), 7.1.2.(b))
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	6352.PBI.003	Wilayah Panas Bumi yang Ditawarkan	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.PBI.004	Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.QIA.003	Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.QIA.002	Monitoring TKDN bidang Aneka EBT	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.QIA.001	Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.PBI.001	Volume Biofuel untuk Domestik	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.ABI.002	Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Bioenergi	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6352.ABI.001	Pengembangan Biomassa dan Biogas	Tujuan 7 (7.2.1*, 7.b.1*), Tujuan 12 (12.a.1*)
		6352.PDA.001	Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	Tujuan 7 (7.3.1*), Tujuan 12 (12.c.1*), Tujuan 13 (13.2.2.*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		6352.AEF.001	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Tujuan 7 (7.3.1*)
		6352.BIC.001	Manajemen Energi Lembaga	Tujuan 7 (7.3.1*)
		6352.PBI.002	Penurunan Intensitas Energi Final	Tujuan 7 (7.3.1*)
		6352.QIC.001	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	Tujuan 12 (12.c.1*), Tujuan 13 (13.2.2.*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
020.JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara				
6305	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	6305.ABI.004	Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b), 12.4.2*)

Kementerian/Lembaga: 022. Kementerian Perhubungan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
022.GA Program Infrastruktur Konektivitas				
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	4643.RBA.001	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Sumatera Selatan termasuk supervisi	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4643.RBA.002	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4643.RBA.003	Pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4643.RBA.004	Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4643.RBA.005	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4643.RBA.006	Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
4641	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	4641.RBA.010	Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	Tujuan 9. (9.1.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4641.RBA.011	Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor - Sukabumi	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.012	Pembangunan Jalur Ganda KA Mojokerto - Sepanjang	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.013	Peningkatan Jalur KA Lintas Araskabu - Siantar	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.014	Peningkatan Jalur KA R42 Lintas Lahat - Lubuklinggau Segmen Bungamas - Lubuklinggau	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.015	Peningkatan Jalur KA antara Serang - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.016	Peningkatan Jalur KA Lintas Bandung - Banjar	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.017	Peningkatan Jalur KA Lintas Banjar - Kroya	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.018	Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.019	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Cikarang - Stasiun Cikampek	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.020	Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Bandung dan Ciroyom	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.021	Penggantian Sistem Persinyalan Stasiun Yogyakarta - Stasiun Lempuyangan	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.022	Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.023	Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.035	Jabodetabek <i>Railway Capacity Enhancement Phase I</i>	Tujuan 9. (9.1.1.(c))
		4641.RBA.011 4641.RBA.012 4641.RBA.013 4641.RBA.014 4641.RBA.015 4641.RBA.016 4641.RBA.017 4641.RBA.018 4641.RBA.019 4641.RBA.021 4641.RBA.023	Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan	Tujuan 11 (11.2.1.(a), 11.2.1.(b))
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4645.RBE.001	Bandar Udara Baru	Tujuan 9 (9.1.2.(a))
		4645.RBE.002	Bandara Wamena (<i>Major Project</i>)	Tujuan 9 (9.1.2.(a))
		4645.RBE.003	Bandara Ilaga (<i>Major Project</i>)	Tujuan 9 (9.1.2.(a))
		4645.RBE.004	Bandara Tanah Merah (<i>Major Project</i>)	Tujuan 9 (9.1.2.(a))
		4645.RBE.005	Bandar Udara	Tujuan 9 (9.1.2.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	4637.RBP.022	Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)	Tujuan 9 (9.1.2.(b))
		4637.RBP.024	Pelabuhan Sungai (Prioritas Nasional)	Tujuan 9 (9.1.2.(b))
		4637.RBP.026	Pelabuhan Danau (Prioritas Nasional)	Tujuan 9 (9.1.2.(b))
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	4660.RBD.001	Fasilitas Pelabuhan Laut Prioritas Nasional	Tujuan 9 (9.1.2.(c))
		4660.RBD.003	Pengembangan Pelabuhan Seba - Kab. Sabu Raijua	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4660.RBD.008	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arwala - Kab. Maluku Barat Daya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
1960	Pelayanan Transportasi Udara	1960.QAH.006	Jembatan Udara di Papua	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4654	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	4654.RBE.002	Pembangunan Bandar Udara Baru Mentawai	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.012	Pengembangan Bandar Udara Wamena	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.013	Pengembangan Bandara Illaga	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.051	Pengembangan Bandara Dekai (Nop Goliat Dekai)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.052	Pengembangan Bandara Oksibil	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.074	Pengembangan Bandara Sinak	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.070	Pengembangan Bandara Kiwirok	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.082	Pengembangan Bandara Elelim	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.077	Pengembangan Bandara Bilorai	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.007	Pembangunan Bandara Sobaham	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.017	Pengembangan Bandara Inanwatan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.028	Pengembangan Bandara Anggi	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.029	Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4654.RBE.049	Pengembangan Bandara Raja Ampat	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.050	Pengembangan Bandara Babo	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.069	Pengembangan Bandara Kambuaya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.073	Pengembangan Bandara Rendani	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.010	Pembangunan Bandara Nabire Baru	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.035	Pengembangan Bandara Timika	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.053	Pengembangan Bandara Numfor	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.018	Pengembangan Bandara Lapter Towe Hitam	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.014	Pengembangan Bandara Tanah Merah	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.019	Pengembangan Bandara Kimaam	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.030	Pengembangan Bandar Udara Ewer	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.031	Pengembangan Bandar Udara Kapi	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.076	Pengembangan Bandara Mopah	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.078	Pengembangan Bandara Kamur	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4654.RBE.071	Pengembangan Bandara Mindiptana	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4639	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	4639.RAC.053	Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan	Tujuan 11 (11.2.1.(a), 11.2.1.(b))
4649	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	4649.RAC.001 4649.RAC.002 4649.RAC.003	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis jalan	Tujuan 11 (11.2.1.(a), 11.2.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	4649.RAC.001 4649.RAC.002 4649.RAC.003 4649.RAC.004	Jumlah Kawasan yang Dibangun Sistem ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya	Tujuan 11 (11.2.1.(a), 11.2.1.(b))
4650	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	4650.RAC.001 4650.RAC.002 4650.RAC.003	Jumlah Kawasan yang Fasilitas serta Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasinya dikembangkan	Tujuan 11 (11.2.1.(a), 11.2.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 023. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
023.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	4459.BDB.145	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		4459.QDB.143	Satuan PAUD yang menyelenggarakan pendekatan holistik integratif	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4459.QDB.144	Satuan PAUD yang mendapatkan fasilitasi peningkatan pencapaian perkembangan anak	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4459.QDB.142	Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4459.QDB.136	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4459.QDB.138	Satuan PAUD yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Berlaku	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran	2029.QDB.001	Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2029.PBH.001	Bahan Kebijakan Hasil Penilaian Pendidikan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2029.SDC.001	Soal yang dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2029.SDC.002	Model Penilaian Pendidikan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2029.SDC.003	Perangkat Pembelajaran Yang Dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan	2027.PDI.002	Pengembang kurikulum yang berkompeten	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2027.QMA.001	Sistem Informasi kurikulum dan perbukuan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2027.SDC.001	Model kurikulum yang dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2027.ABH.002	Kebijakan dan Standar Perbukuan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2027.SDC.002	Buku yang dinilai dan diawasi	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2027.SDC.003	Buku umum dan buku pendidikan yang dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama	4461.QDB.335	SMP yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4461.QDB.338	SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4461.QDB.331	SMP yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	4460.QDB.235	SD yang mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4460.QDB.238	SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4460.QDB.231	SD yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas	4462.QDB.435	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4462.QDB.438	SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4462.QDB.431	SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	4463.QDB.538	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4463.QDB.541	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
5637	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	5637.FBA.005	Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikdas	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		5637.UBA.002	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5638.FBA.006	Fasilitasi daerah dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan Dikmen dan Dikus	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		5638.UBA.003	Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Dikus	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	6395.AEE.007	Kemitraan Bidang PAUD dan Parenting	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*), Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.AEE.001	Kemitraan Bidang Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.AEE.002	Kemitraan Bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.AEE.005	Kemitraan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang IPA di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.AEE.006	Kemitraan Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.DCI.001	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang PTJJ di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6395.DCI.002	Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model Bidang Biologi Tropika di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.DCI.004	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Matematika di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.DCI.005	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang IPA di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.DCI.006	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Peningkatan Pendidik dan Tendik Bidang Bahasa di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.DCI.007	Pelatihan calon pelatih pemanfaatan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.PEE.001	Kemitraan Bidang Gizi dan Pangan di Kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.SCI.001	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka pengembangan dan implementasi model pangan dan gizi	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
		6395.SDC.001	Jumlah model yang dikembangkan dan diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	6397.QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
6393	Kebijakan Penguatan Karakter	6393.QMB.001	Layanan Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
		6393.QMB.002	Layanan Penguatan Karakter Keluarga	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
		6393.QMB.003	Layanan Penguatan Karakter Masyarakat	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	4271.PDG.001	Guru dan Tendik yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi	Tujuan 4 (4.c.1*)
023.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	4262.SDC.013	SMK yang Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4262.QDB.013	Kurikulum SMK yang Dikembangkan sesuai Kebutuhan IDUKA	Tujuan 4 (4.3.1*)
		4262.RBI.002	Unit SMK Baru yang dibangun	Tujuan 4 (4.3.1*)
		4262.QDB.007	SMK yang Direvitalisasi	Tujuan 4 (4.3.1*)
		4262.RAA.020	SMK yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Pada Sektor Prioritas	Tujuan 4 (4.a.1**))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	4278.QDC.001	Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	Tujuan 4 (4.3.1*)
		4278.QDC.002	Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	Tujuan 4 (4.3.1*)
		4278.QDB.004	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	Tujuan 4 (4.3.1*)
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	4467.RBJ.003	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
4263	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	4263.PDI.016	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	Tujuan 8 (8.5.2*)
		4263.QDB.002	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	Tujuan 8 (8.5.2*)
023.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun				
2003	Pembinaan Sekolah Dasar	2003.QDB.203	SD yang mendapat pembinaan Program Afirmasi	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2003.QDB.204	<i>Community Learning Center</i> (CLC) SD yang mendapatkan Pembinaan	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2003.RAA.237	SD Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Tujuan 4 (4.a.1*)
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	2000.QDB.313	SMP yang mendapat pembinaan Afirmasi	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2000.RAA.337	SMP Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	Tujuan 4 (4.a.1*)
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	5627.QDB.405	SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		5627.RAA.406	SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan	Tujuan 4 (4.a.1*)
4272	Pembinaan PAUD	4272.RAA.141	Satuan PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran Termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4272.QEK.106	Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4272.QDB.103	Satuan PAUD Mendapatkan Pembinaan Afirmasi	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	5626.QDC.509	Remaja dan Perempuan Dewasa yang Mendapatkan pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup	Tujuan 4 (4.3.1*)
		5626.QDB.508	Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Tujuan 4 (4.3.1*)
		5626.QEK.507	Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Tujuan 4 (4.5.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5626.QDB.540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Tujuan 4 (4.5.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5626.QDB.511	Lembaga yang Mendapat Pembinaan Budaya Baca Masyarakat	Tujuan 4 (4.6.1.(a))
		5626.QDC.510	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan	Tujuan 4 (4.6.1.(a))
		5626.RAA.537	Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan	Tujuan 4 (4.a.1*)
4465	Layanan Pembiayaan Dasar Menengah	4465.QEK.012	Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Tujuan 4 (4.5.1*)
		4465.QEK.013	Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Tujuan 4 (4.5.1*)
		4465.QEK.014	Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Tujuan 4 (4.5.1*)
		4465.QEK.015	Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Tujuan 4 (4.5.1*)
023.DK Program Pendidikan Tinggi				
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	4471.RAA.003	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	4469.QEJ.016	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	Tujuan 4 (4.5.1*)
		4469.QEJ.018	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tujuan 4 (4.5.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4259	Pengembangan Kelembagaan	4259.QEJ.001	Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	Tujuan 4 (4.b.1*), Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
4258	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	4258.QEJ.002	Mahasiswa menjalankan wirausaha	Tujuan 8 (8.5.2*)
023.WA Program Dukungan Manajemen				
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	4269.BEJ.017	Beasiswa Unggulan	Tujuan 4 (4.5.1*)
023.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan				
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	4275.QMA.001	Warisan Budaya yang Ditetapkan	Tujuan 11 (11.4.1.(a))
		4275.RBN.003	Museum yang Dibangun	Tujuan 11 (11.4.1.(a))
		4275.RDN.002	Warisan Budaya yang Dilindungi	Tujuan 11 (11.4.1.(a))
5178	Pengelolaan Permuseuman	5178.RDN.001	Koleksi Museum yang Dikelola	Tujuan 11 (11.4.1.(a))
5179	Pelestarian Nilai Budaya	5179.QMA.003	Karya Budaya yang Dilestarikan	Tujuan 11 (11.4.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	5181.RDN.015	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Tujuan 11 (11.4.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 024. Kementerian Kesehatan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				
5610	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	5610.QEA.001	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	Tujuan 1 (1.3.1*, 1.3.1.(a)), Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))
2065	Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	2065.QEC.518	Paket penyediaan obat gizi	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2065.QEC.508	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2065.QEC.516	Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*, 3.b.1*)
		2065.QEC.517	Paket Penyediaan Vaksin Baru	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2065.QEC.514	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	Tujuan 3 (3.3.1*)
		2065.QEC.511	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2065.QEC.512	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2065.UBA.001	Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Tujuan 3 (3.b.1*)
		2065.QEC.515	Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Tujuan 3 (3.b.3*)
2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2090.QDB.005	Pembinaan RS yang Melaksanakan Operasi Sectio Caesaria Darurat Dalam Waktu Kurang atau sama dengan 30 menit	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2090.QDB.003	Pembinaan Surveilans AMR di RS	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2090.QDB.005	Fasyankes yang dilakukan pengembangan jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>	Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	2087.AAG.002	Rancangan Revisi Permenkes No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2087.QAH.001	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Dekonsentrasi	Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))
2051	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2051.RAB.003	FKTP yang dipenuhi SPA sesuai standar	Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))
		2051.QDB.001	RSUD yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan SPA Sesuai standar	Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))
		2051.QDB.002	RS DTPK yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana dan alat	Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))
		2051.QDB.003	Puskesmas DTPK yang diberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan standar SPA	Tujuan 3 (3.8.1*, 3.8.1.(a), 3.8.2*, 3.8.2.(a))
2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	2064.QDB.002	Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Tujuan 3 (3.b.3*)
		2064.QDB.001	Rumah Sakit dengan penggunaan obat sesuai Fornas	Tujuan 3 (3.b.3*)
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	2078.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	Tujuan 3 (3.c.1*)
		2078.QAA.003	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu	Tujuan 3 (3.c.1*)
		2078.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.c.1*)
		2078.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	Tujuan 3 (3.c.1*)
		2078.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.c.1*)
		2078.QAA.006	Pendayagunaan Dokter pasca internsip	Tujuan 3 (3.c.1*)
024.DD Program Kesehatan Masyarakat				
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080.QEA.001	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2080.QEA.003	Jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2080.QEA.002	Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2080.QEA.004	Ibu hamil dan balita yang diberikan pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2080.QKA.504	Surveilans gizi yang ditingkatkan kualitasnya	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2080.QEA.003	Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi	Tujuan 2 (2.2.3*)
		2080.QEA.007	Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi Masyarakat	Tujuan 2 (2.2.3*)
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5833.PEA.002	Koordinasi LP/LS peningkatan posyandu aktif	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		5833.PEA.003	Koordinasi LP/LS Pencegahan <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5833.QDD.003	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		5833.PEH.001	Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai media	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		5833.QDD.001	Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
5834	Penyehatan Lingkungan	5834.UBA.001	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan STBM (Sanitasi Lokal Berbasis Masyarakat)	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*)
		5834.UBA.002	Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*)
		5834.PEF.002	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Sarana Air Minum	Tujuan 6 (6.1.1*)
		5834.QEG.001	Reagensia dan Peralatan Surveilans Kualitas Air Minum	Tujuan 6 (6.1.1*)
		5834.PEF.001	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Tujuan 6 (6.2.1*)
		5834.PEF.004	Orang yang diberi Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes	Tujuan 12 (12.4.2*)
		5834.UBA.004	Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di Fasyankes	Tujuan 12 (12.4.2*)
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga	5832.AEA.004	Ibu hamil Terinformasi terkait kesehatan masa kehamilan, persalinan, nifas, KB dan perawatan BBL	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		5832.AEA.007	Komitmen/Kesepahaman Kab/Kota dalam Kesehatan Reproduksi	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5 (5.6.1*, 5.6.2*)
		5832.AEA.008	Komitmen/kesepahaman dalam pelayanan kesehatan balita	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		5832.DCI.012	Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan bagi Korban KtP/A dan TPPO	Tujuan 16 (16.2.1.(a), 16.2.2*)
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	2089.PEF.002	Orang yang diberi sosialisasi dan diseminasi serta edukasi pengendalian TB di tempat kerja	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2089.UBA.002	Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan pencegahan TB di tempat kerja	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2089.UBA.001	Provinsi/kab/kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan kerja	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2089.SCI.004	Tenaga kesehatan yang dilatih kesehatan olahraga	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2089.UBA.004	Provinsi yang difasilitasi dan dibina terkait penguatan aktivitas fisik anak sekolah	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2089.UBA.005	Provinsi/kab/kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan olahraga	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2089.SCI.003	Tenaga kesehatan yang dilatih K3 Fasyankes	Tujuan 8 (8.8.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
024.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan	2058.PEF.002	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2058.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi imunisasi	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2058.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB / Wabah	Tujuan 3 (3.d.1*)
		2058.QAH.001	Penyelidikan epidemiologi/investigasi penyakit potensial KLB/wabah	Tujuan 3 (3.d.1*)
		2058.QAH.007	Surveilans dan deteksi dini penyakit potensial KLB/Wabah	Tujuan 3 (3.d.1*)
		2058.QAH.008	Tindakan pengendalian pada KLB/wabah	Tujuan 3 (3.d.1*)
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	2060.PEF.007	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2060.QMA.007	Media Komunikasi, Informasi, edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2060.PEF.011	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Tujuan 3 (3.3.1*)
		2060.QMA.001	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Tujuan 3 (3.3.1*)
		2060.QAH.005	Deteksi Dini Penyakit HIV AIDS dan IMS di Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.1*)
		2060.QAH.007	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2060.PEF.003	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2060.QMA.003	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2060.QAH.008	Layanan Deteksi Dini Terduga TBC Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.2*)
		2060.PEF.006	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis	Tujuan 3 (3.3.4*)
		2060.QAH.003	Surveilans dan Deteksi Dini Hepatitis	Tujuan 3 (3.3.4*)
		2060.QMA.006	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis	Tujuan 3 (3.3.4*)
		2060.PEF.004	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2060.QAH.001	Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Kusta	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2060.QAH.006	Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Kusta di Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2060.QMA.004	Media Komunikasi, Edukasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	4249.QAH.014	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	Tujuan 3 (3.3.1*)
		4249.QAH.015	Layanan deteksi dini terduga TBC	Tujuan 3 (3.3.2*)
		4249.QAH.010	Layanan Pengendalian Vektor Malaria	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		4249.QAH.020	Layanan Penemuan Aktif Surveilans migrasi malaria	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		4249.QAH.003	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di POS Lintas Batas Darat Negara (PLBDN)	Tujuan 3 (3.d.1*)
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	2059.PEF.001	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.QAH.005	Surveilans dan deteksi dini penyakit malaria Tingkat Provinsi	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.QAH.006	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah)	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.QAH.007	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit katagori I (daerah sulit selain Provinsi Papua dan Papua Barat)	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.QMA.001	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.PEF.002	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit malaria di Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.QAH.022	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.QAH.023	IRS/ <i>Indoor Residual Spraying</i> (Penyemprotan insektisida pada dinding rumah) di daerah sulit katagori II (Provinsi Papua dan Papua Barat)	Tujuan 3 (3.3.3*, 3.3.3.(a))
		2059.PEF.004	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2059.QAH.001	Surveilans dan deteksi dini penyakit Filariasis dan Kecacingan	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2059.QAH.031	Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2059.QMA.004	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2059.PEF.007	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan Papua dan Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
		2059.QMA.009	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan Papua Papua Barat	Tujuan 3 (3.3.5*, 3.3.5.(a), 3.3.5.(b))
2061	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2061.PEF.001	Sosialisasi diseminasi pelaksanaan layanan upaya berhenti merokok	Tujuan 3 (3.4.1.(a), 3.a.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2061.QMA.001	Media komunikasi, informasi, edukasi layanan upaya berhenti merokok	Tujuan 3 (3.4.1.(a), 3.a.1*)
		2061.PEA.006	Koordinasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok	Tujuan 3 (3.4.1.(a), 3.a.1*)
		2061.PEF.002	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus-gangguan metabolik	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2061.QMA.002	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus-gangguan metabolik	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2061.PEF.003	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2061.QMA.003	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2061.PEF.004	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
		2061.QMA.004	Media komunikasi, informasi, edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
5837	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5837.PEA.004	Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Penyalahguna Napza yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
024.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	2072.SDC.001	Model Penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*), Tujuan 17 (17.19.2.(b))
		2072.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah III	Tujuan 9 (9.5.1*)
2069	Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan	2069.SDA.001	Produk Hasil Penelitian dan Pengembangan <i>Life Sciences</i> Bidang Kesehatan	Tujuan 9 (9.5.1*)
		2069.SDA.002	Produk hasil Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Gizi Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional	Tujuan 9 (9.5.1*)
2070	Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	2070.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah II	Tujuan 9 (9.5.1*)
		2070.SDA.002	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah V	Tujuan 9 (9.5.1*)
		2070.SDA.003	Produk Hasil Riset Evaluasi Intervensi Kesehatan Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	Tujuan 9 (9.5.1*)
2071	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2071.SDA.001	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah I	Tujuan 9 (9.5.1*)
		2071.SDA.002	Produk Hasil Riset Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah IV	Tujuan 9 (9.5.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2076.SCJ.051	Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	2077.SBA.001	Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah	Tujuan 3 (3.c.1*)
024.WA Program Dukungan Manajemen				
2044	Pengelolaan Krisis Kesehatan	2044.QHC.001	Mobilisasi Tenaga Penanggulangan Krisis Kesehatan	Tujuan 11 (11.5.1*), Tujuan 13 (13.1.1*)

Kementerian/Lembaga: 025. Kementerian Agama

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
025.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama				
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2104.QDE.001	Keluarga Islam yang memperoleh bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*, 5.3.1*)
		2104.QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk	Tujuan 5 (5.3.1*)
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	2137.BDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*, 5.3.1*)
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2140.BDE.001	Keluarga Katolik yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*, 5.3.1*)
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2143.BDE.001	Bimbingan Keluarga Sukinah	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*, 5.3.1*)
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*, 5.3.1*)
025.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran				
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	4422.SDC.001	Model Pembelajaran Madrasah yang dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		4422.SCI.001	Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	4433.SDC.001	Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4433.QEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	Tujuan 4 (4.a.1*)
		4433.QDB.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
		4433.PDG.002	Ustadz Guru Penerima Beasiswa Gelar S1	Tujuan 4 (4.c.1*)
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	2127.SDC.001	Model Kurikulum dan Pembelajaran PAI yang Dikembangkan	Tujuan 4 (4.1.1.(a))
		2127.SCI.003	Siswa Sekolah Umum yang mendapat penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.QEI.001	Lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan Bantuan	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	4437.PEF.001	Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Tujuan 4 (4.a.1.(a))
025.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun				
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	2129.QEK.005	Siswa MI Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2129.QEK.006	Siswa MTs Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2129.QEK.007	Siswa MA Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2129.BEI.003	Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a), 4.a.1.(a))
		2129.BEI.001	Madrasah Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2129.CBI.002	Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2129.QEK.008	Siswa RA penerima BOP	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		2129.BAH.001	Platform E-learning Madrasah yang dikelola	Tujuan 4 (4.4.1.(a))
		2129.CAA.001	Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	Tujuan 4 (4.4.1.(a))
		2129.QEK.001	Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2129.QEK.002	Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2129.QEK.003	Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	2129.BEI.002	Bantuan Madrasah daerah 3T	Tujuan 4 (4.a.1*)
		2129.BEI.004	Bantuan Peningkatan Mutu UKS/M	Tujuan 4 (4.a.1*)
		2128.QEK.005	Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2128.QEK.006	Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2128.QEK.007	Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2128.BEK.001	Santri Penerima Beasiswa	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2128.BEI.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a), 4.a.1*)
		2128.QEI.001	Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	Tujuan 4 (4.3.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2128.QEK.001	Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2128.QEK.002	Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2128.QEK.003	Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	2136.QEK.004	Siswa SMTK/SMK Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2136.QEK.005	Siswa SMPTK Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2136.QEK.006	Siswa SDTK Penerima BOS	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2136.QEK.001	Siswa SMTK/SMK Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2136.QEK.002	Siswa SMPTK Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2136.QEK.003	Siswa SDTK Penerima PIP	Tujuan 4 (4.5.1*)
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2139.QEK.008	Siswa SMAK Penerima BOS (PN)	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2139.QEK.009	Siswa SMAK Penerima PIP (PN)	Tujuan 4 (4.5.1*)
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	2142.QEK.001	Siswa penerima BOS Tk Adi	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2142.QEK.002	Siswa penerima BOS Tk Madya	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2142.QEK.003	Siswa penerima BOS Tk Utama	Tujuan 4 (4.1.2*, 4.1.2.(a))
		2142.QEK.004	Siswa penerima PIP Tk Adi	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2142.QEK.005	Siswa penerima PIP Tk Madya	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2142.QEK.006	Siswa penerima PIP Tk Utama	Tujuan 4 (4.5.1*)
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4012.QEK.001	BOP Nava Dhammasekha	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*)
		4012.RAA.001	Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan	Tujuan 4 (4.3.1*)
025.DK Program Pendidikan Tinggi				
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	2132.BGC.001	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2132.BGC.002	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNB	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2132.QEI.001	Bantuan Operasional Kopertais	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2132.QEI.002	Bantuan pendanaan PTN-BH	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2132.QEI.003	BOPTN	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2132.QEJ.004	Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2132.QEJ.007	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Tujuan 4 (4.5.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2132.QEJ.002	Dosen Penerima Beasiswa S3	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2132.QEJ.005	Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	Tujuan 4 (4.5.1*)
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	5106.QEI.001	BOPTN	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		5106.QEJ.001	Mahasiswa PTKB Penerima PIP Kuliah	Tujuan 4 (4.5.1*)
		5106.QEJ.002	Mahasiswa PTKB Penerima Beasiswa PPA	Tujuan 4 (4.5.1*)
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	5101.BEI.001	BOPTN	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		5101.QEJ.001	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Tujuan 4 (4.5.1*)
		5101.QEJ.002	Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA	Tujuan 4 (4.5.1*)
		5101.QEJ.003	Dosen Penerima Beasiswa Gelar S3	Tujuan 4 (4.5.1*)
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	2131.QEI.003	Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan yang menerima Bantuan operasional (PN)	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2131.QEI.004	BOPTN (PN)	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		2131.QEJ.004	Mahasiswa penerima KIP Kuliah	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2131.QEJ.003	Mahasiswa penerima beasiswa miskin	Tujuan 4 (4.5.1*)
		2131.QEJ.002	Dosen penerima beasiswa gelar S3	Tujuan 4 (4.5.1*)
4438	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali	4438.BEI.001	Bantuan operasional Ma'had Aly	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		4438.BEJ.001	Mahasantri Penerima Beasiswa PPA	Tujuan 4 (4.5.1*)
		4438.DBA.001	Dosen Non PNS pada Ma'had Aly yang Memperoleh Beasiswa S3	Tujuan 4 (4.5.1*)
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	5104.QEI.001	BOPTN	Tujuan 4 (4.3.1.(a))
		5104.QEJ.001	Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	Tujuan 4 (4.5.1*)
		5104.QEJ.004	Mahasiswa penerima beasiswa prodi langka	Tujuan 4 (4.5.1*)
		5104.QEJ.005	Mahasiswa penerima beasiswa PPA	Tujuan 4 (4.5.1*)
		5104.QEJ.006	Dosen penerima Beasiswa gelar S3	Tujuan 4 (4.5.1*)

Kementerian/Lembaga: 026. Kementerian Ketenagakerjaan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
026.DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan				
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2200.BIC.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	Tujuan 1 (1.3.1*, 1.3.1.(a), 1.3.1.(b)), Tujuan 10 (10.4.1.(b))
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	5586.BDC.001	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Tujuan 1 (1.3.1*, 1.3.1.(a), 1.3.1.(b)), Tujuan 10 (10.4.1.(b))
		5586.ABK.001	Desain dan evaluasi penyelenggaraan, manfaat, iuran, dan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja	Tujuan 1 (1.3.1*, 1.3.1.(a), 1.3.1.(b)), Tujuan 10 (10.4.1.(b))
2172	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	2172.BEA.001	Tenaga Kerja yang mendapatkan Bantuan Wirausaha Baru Inkubasi Bisnis	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
2175	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	2175.QDC.020	Tenaga Kerja yang mendapat pembinaan untuk menjadi Wirausaha Baru	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2175.QDC.030	Tenaga Kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2175.QDC.040	Tenaga Kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha baru Inkubasi Bisnis	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2175.QEA.010	Kelompok Masyarakat yang mendapat bantuan untuk menjadi Wirausaha Baru	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2175.BEH.010	Kelompok Masyarakat yang mendapat bantuan kegiatan Padat karya	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2175.QEI.010	Lembaga yang mendapat bantuan untuk menjadi Wirausaha Baru	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
2180	Peningkatan Penerapan Pengupahan	2180.QDH.001	Pelaku Hubungan Industrial Terampil Menyusun Struktur dan Skala Upah	Tujuan 8 (8.5.1*)
2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	2198.BIB.001	Pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Tujuan 8 (8.7.1.(a))
		2198.BIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan dan anak	Tujuan 8 (8.7.1.(a))
2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2199.BIH.001	Perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Tujuan 8 (8.8.1.(a))
5587	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	5587.QAC.001	Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3, lingkungan kerja dan hygiene perusahaan	Tujuan 8 (8.8.1.(a))
2174	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	2174.AEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pelindungan dan Penempatan PMI	Tujuan 10 (10.7.2, 10.7.2.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
026.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
4060	Pelatihan Bidang Industri	4060.SCH.002	Pelatihan peningkatan produktivitas	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.001	PBK UPTP	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.002	Pelatihan Kerjasama Pihak Ketiga (PFLK)	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.003	PBK di BLK Komunitas	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.004	PBK Calon Pekerja Migran Indonesi (CPMI)	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.005	Penghargaan yang Diraih oleh Kompetitor Indonesia pada Kompetisi Keterampilan Internasional	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.006	PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.008	PBK Provinsi Jawa Barat	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.009	PBK Provinsi Jawa Tengah	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.010	PBK Provinsi D.I Yogyakarta	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.011	PBK Provinsi Jawa Timur	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.012	PBK Provinsi Aceh	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.013	PBK Provinsi Sumatera Utara	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.014	PBK Provinsi Sumatera Barat	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.015	PBK Provinsi Riau	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.016	PBK Provinsi Jambi	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.017	PBK Provinsi Sumatera Selatan	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.018	PBK Provinsi Lampung	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.019	PBK Provinsi Kalimantan Barat	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.020	PBK Provinsi Kalimantan Tengah	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.021	PBK Provinsi Kalimantan Selatan	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.022	PBK Provinsi Kalimantan Timur	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.023	PBK Provinsi Sulawesi Utara	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.024	PBK Provinsi Sulawesi Tengah	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.025	PBK Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.026	PBK Provinsi Sulawesi Tenggara	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.027	PBK Provinsi Maluku	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.028	PBK Provinsi Bali	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.029	PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.030	PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.031	PBK Provinsi Papua	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.032	PBK Provinsi Bengkulu	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.033	PBK Provinsi Banten	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.034	PBK Provinsi Bangka Belitung	Tujuan 8 (8.2.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4060.SCH.035	PBK Provinsi Gorontalo	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.036	PBK Provinsi Kepulauan Riau	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.037	PBK Provinsi Sulawesi Barat	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.038	PBK Provinsi Kalimantan Utara	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.039	PBK Provinsi Maluku Utara	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.040	PBK Provinsi Papua Barat	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4060.SCH.001	Peserta yang magang di perusahaan dalam negeri	Tujuan 8 (8.6.1*)
		4060.SCH.002	Peserta yang magang di perusahaan luar negeri	Tujuan 8 (8.6.1*)

Kementerian/Lembaga: 027. Kementerian Sosial

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
027.DQ Program Perlindungan Sosial				
6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6318.QAA.001	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
		6318.UAB.001	Layanan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
6284	Penyelenggaraan Program Sembako	6284.QAH.101	Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
		6284.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.1.1.(d) , 10.1.1.(e) , 10.1.1.(f))
		6284.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.1.1.(d) , 10.1.1.(e) , 10.1.1.(f))
		6284.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.1.1.(d) , 10.1.1.(e) , 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6284.QEB.104	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
		6284.QEB.105	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
		6284.QEB.106	KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai Pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.a.1*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
6283	Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi	6283.QEB.101	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
		6283.QEB.102	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
		6283.QEB.103	KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah di Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	6282.QDC.101	Sumber Daya Manusia yang dikelola	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.3.1*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a))
		6282.QEB.201	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*, 1.3.1*), Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
6273	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	6273.ACD.101	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
		6273.ACD.102	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
6274	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	6274.BDB.101	Karang Taruna Yang Diberdayakan	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
		6274.BDB.102	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang Diberdayakan	Tujuan 1 (1.1.1*, 1.2.1*, 1.2.2*)
6281	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	6281.BEE.101	Korban Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan	Tujuan 1 (1.5.1*)
		6281.QEE.101	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	Tujuan 1 (1.5.1*)
6277	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan	6277.BAA.104	Jumlah Korban Perdagangan Orang/Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
6279	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak	6279.QAA.101	Jumlah Anak yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
6276	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat	6276.QEB.101	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6276.QEB.102	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun II	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6276.QEB.103	Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun III	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Kementerian/Lembaga: 029. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
029.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup				
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Tujuan 6 (6.3.1.(a))
		6034.RAG.001	Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	Tujuan 6 (6.3.1.(a))
		6034.RAG.002	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Tujuan 6 (6.3.1.(a))
		6034.UBA.001	Fasilitas Pemantauan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6034.QDI.001	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	Tujuan 9 (9.4.1*, 9.4.1.(a), 9.4.1.(b)), Tujuan 11 (11.6.2.(a), 11.6.2.(b)), Tujuan 12
		6034.UBA.002	Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan	6034.RAG.003	Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
		6033.RAG.001	Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6033.QMA.002	Data dan Informasi Kualitas Air Manual	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		6033.QMA.001	Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	Tujuan 11 (11.6.2.(a), 11.6.2.(b))
		6033.RAG.002	Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Tujuan 11 (11.6.2.(a), 11.6.2.(b))
		6033.QMA.003	Data dan Informasi Kualitas Air Laut	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
		6033.QMA.004	Data dan Informasi Sampah Laut	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
5393	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	6033.QDH.001	Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
		5393.DDA.001	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		5393.PDF.001	Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b)), Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5393.003	Jumlah Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan yang Dibangun (TA 2020)	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
		5393.BJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk pada Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
		5393.BJB.001	Penyidikan dan Pengujian Peralatan Laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang akurat dan ketertelusuran pengukuran	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
5456	Pengelolaan Sampah	5456.BDG.001	Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.3.1.(a), 12.5.1.(a))
		5456.BDH.001	Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.3.1.(a), 12.5.1.(a))
		5456.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.3.1.(a), 12.5.1.(a))
		5456.FBA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.3.1.(a), 12.5.1.(a))
		5456.FBA.003	Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.3.1.(a), 12.5.1.(a))
		5456.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.5.1.(a))
		5456.RAG.002	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.5.1.(a))
		5456.RAG.003	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 12 (12.5.1.(a))
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan	5436.UBA.001	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
5452	Pengelolaan B3	5452.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
		5452.ABJ.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
		5452.FAB.001	Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
5454	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5454.RAG.001	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	Tujuan 12 (12.4.2*)
		5454.ACD.001	Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Tujuan 12 (12.4.2*)
		5454.BDI.001	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	Tujuan 12 (12.4.2*)
5455	Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	5455.QAH.001	Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	Tujuan 12 (12.4.2*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5455.BDI.001	Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi	Tujuan 12 (12.4.2*)
6035	Pemulihan Kerusakan Lingkungan	6035.RAG.001	Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 15 (15.3.1*)
		6035.RAG.005	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 15 (15.3.1*)
		6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	Tujuan 15 (15.3.1*)
		6035.UBB.001	Fasilitas Desa mandiri peduli gambut di 7 Provinsi	Tujuan 15 (15.3.1*)
5424	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	5424.PBJ.001	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.1.2.(a))
		5424.PBJ.002	Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Tujuan 15 (15.1.2.(a))
		5424.PBJ.003	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Tujuan 15 (15.1.2.(a))
		5424.QMA.001	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.1.2.(a))
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	5429.QCE.001	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Tujuan 15 (15.7.1.(a), 15.c.1.(a))
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Tujuan 15 (15.7.1.(a), 15.c.1.(a))
029.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	5406.BDB.001	Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Tujuan 6 (6.5.1*), Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
		5406.QDB.001	Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tujuan 6 (6.5.1*), Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
		5406.UAB.001	Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	Tujuan 6 (6.5.1*), Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	5404.RAG.001	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)
		5404.RAG.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5404.RAG.003	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 14 (14.2.1*), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)
		5404.RAG.004	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)
		5404.BDB.001	Layanan Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b)), Tujuan 15 (15.3.1*)
		5404.QDB.001	Kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove yang meningkat kapasitasnya	Tujuan 14 (14.2.1*)
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	5407.RBK.001	Sumber Benih Unggul yang Dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 11 (11.7.1.(a)), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)
		5407.RBK.002	Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 11 (11.7.1.(a)), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)
		5407.RBK.003	Benih Berkualitas	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*), Tujuan 11 (11.7.1.(a)), Tujuan 15 (15.1.1*, 15.3.1*)
5444	Peningkatan Penyuluhan	5444.QDC.001	KTH Mandiri yang terbentuk	Tujuan 8 (8.4.1.(a)), Tujuan 10 (10.1.1.(c)), Tujuan 15 (15.2.1.(a))
		5444.QDD.001	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	Tujuan 8 (8.4.1.(a)), Tujuan 15 (15.2.1.(a))
		5444.QDD.002	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Tujuan 8 (8.4.1.(a)), Tujuan 15 (15.2.1.(a))
5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5433.PCD.002	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Tujuan 11 (11.3.1.(a))
		5433.QAH.001	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	Tujuan 11 (11.3.1.(a))
		5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Tujuan 11 (11.3.1.(a)), Tujuan 15 (15.1.1*)
		5433.BAH.001	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Tujuan 15 (15.1.1*)
		5433.BMA.001	Informasi dan dokumentasi penguatan dan penatagunaan kawasan hutan	Tujuan 15 (15.1.1*)
		5433.PCD.001	SK Penetapan Kawasan Hutan	Tujuan 15 (15.1.1*)
		5433.BAH.002	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Tujuan 15 (15.1.1*)
		5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Tujuan 15 (15.1.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi	5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (6 Taman Nasional Situs Warisan Dunia)	Tujuan 11 (11.4.1.(a))
		5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (8 Taman Nasional Laut/Perairan)	Tujuan 14 (14.5.1*)
		5421.PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	Tujuan 15 (15.2.1.(a))
		5421.PBV.002	Area terbuka (<i>Opened Area</i>) di kawasan konservasi yang ditangani	Tujuan 15 (15.3.1*, 15.4.2*)
		5421.RAG.001	Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	Tujuan 15 (15.3.1*)
		5421.AED.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.6.1*)
		5421.BDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.6.1*)
		5421.PBV.003	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.6.1*)
		5421.PBV.004	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.6.1*)
		5421.PBV.005	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Tujuan 15 (15.6.1*)
5421.QMA.002	Layanan Balai Kliring Keaneekaragaman Hayati	Tujuan 15 (15.8.1*)		
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	5423.QDD.001	Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	Tujuan 14 (14.5.1*)
		5423.RAG.003	Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	Tujuan 14 (14.5.1*)
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Tujuan 15 (15.1.1*, 15.4.2*)
5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	5397.BAH.002	Layanan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi	Tujuan 15 (15.1.1*)
		5397.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju	Tujuan 15 (15.2.1.(a))
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi	5398.BIC.001	Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	Tujuan 15 (15.1.1*)
		5398.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Tujuan 15 (15.1.1*)
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	5420.PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Tujuan 15 (15.1.2.(a), 15.4.1**)
		5420.QMA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Tujuan 15 (15.1.2.(a))
		5420.QMA.003	Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	Tujuan 15 (15.1.2.(a), 15.4.1**)
		5420.PBV.001	Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	Tujuan 15 (15.4.1*, 15.4.2*, 15.9.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5405	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	5405.QDB.001	KPHL Maju	Tujuan 15 (15.2.1.(a))
5422	Konservasi Spesies dan Genetik	5422.ABV.001	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Tujuan 15 (15.5.1*, 15.8.1*, 15.9.1.(a), 15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
		5422.PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Tujuan 15 (15.5.1*, 15.8.1*, 15.9.1.(a))
		5422.PBJ.002	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	Tujuan 15 (15.5.1*, 15.6.1*, 15.8.1*, 15.9.1.(a))
		5422.QDB.001	Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	Tujuan 15 (15.5.1*, 15.9.1.(a))
		5422.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Tujuan 15 (15.5.1*, 15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
		5422.RAG.001	Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	Tujuan 15 (15.5.1*, 15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5428.QHB.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Tujuan 15 (15.7.1.(a), 15.c.1.(a))
		5428.QHB.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Tujuan 15 (15.7.1.(a), 15.c.1.(a))
6031	Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan	6031.PBV.001	Rekomendasi penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6031.PBV.002	Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6031.PCC.001	Izin akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
6032	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	6032.QDD.001	Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6032.QDG.001	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6032.QEH.001	Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6032.QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
029.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
5441	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	5441.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Tujuan 8 (8.6.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	5442.RBI.001	Pembangunan Sekolah	Tujuan 8 (8.6.1*)
		5442.SAE.001	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Tujuan 8 (8.6.1*)
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	5443.DCE.001	SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	Tujuan 12 (12.8.1.(a)), Tujuan 13 (13.3.1.(a))
		5443.QDB.001	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	Tujuan 12 (12.8.1.(a)), Tujuan 13 (13.3.1.(a))
029.WA Program Dukungan Manajemen				
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5382.PFA.001	Rancangan Standardisasi Bidang LHK	Tujuan 11 (11.c.1.(a)), Tujuan 12 (12.1.1*, 12.6.1*, 12.6.1.(a), 12.7.1*, 12.7.1.(a), 12.7.1.(b), 12.8.1.(b), 12.b.1.(a))
5369	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi	5369.EAB.001	Layanan Perencanaan	Tujuan 13 (13.a.1.(a))
029.FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim				
5447	Mitigasi Perubahan Iklim	5447.QDB.001	Implementasi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon	Tujuan 12 (12.4.1*, 12.4.1.(a), 12.4.1.(b))
		5447.QDB.001	Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	Tujuan 13 (13.2.1*)
5448	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi	5448.BMA.001	Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	Tujuan 13 (13.2.1*)
5450	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	5450.QDD.001	Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		5450.QHC.001	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		5450.QHC.002	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman Udara	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))

Kementerian/Lembaga: 032. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
032.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	2357.PEH.001	Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
032.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	2345.RAL.001	Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat	Tujuan 2 (2.3.1*, 2.a.1*)
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	2337.QEG.001	Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	Tujuan 2 (2.3.1*, 2.a.1*), Tujuan 14 (14.4.1*)
		2337.QEG.002	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	Tujuan 2 (2.3.1*, 2.a.1*), Tujuan 14 (14.4.1*)
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	2360.QDG.001	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a))
		2360.QDG.002	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a)), Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a),, 14.b.1.(b))
		2360.QDB.002	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak Numfor yang mandiri	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2360.QDG.001	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a),, 14.b.1.(b))
032.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	2376.SAC.001	Peserta pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	Tujuan 8 (8.2.1*)
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.SCC.001	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Tujuan 8 (8.2.1*)
032.HB Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2344.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Rote Ndao yang difasilitasi dan dibina	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2344.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Rote Ndao yang sudah dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2344.QEG.003	Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (SBK)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2344.BAB.001	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	2346.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2362.QDD.001	Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Mentawai yang diberikan fasilitasi dan pembinaan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2362.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Kepulauan Mentawai	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2362.REA.003	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)	Tujuan 14 (14.5.1*)
		2362.RAI.001	Luasan kawasan konservasi baru	Tujuan 14 (14.5.1*)
		2362.RAI.002	Luas Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif)	Tujuan 14 (14.5.1*)
		2362.PEC.001	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Tujuan 14 (14.5.1*)
		2362.PEE.001	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	Tujuan 14 (14.5.1*)
		2362.RAG.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Tujuan 14 (14.5.1*), Tujuan 15 (15.5.1*)
		2362.RAG.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	
2366	Perencanaan Ruang Laut	2366.RDQ.001	OM Prasarana SKPT Maluku Barat Daya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2366.RBQ.001	Prasarana di SKPT Maluku Barat Daya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2366.PBR.001	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	Tujuan 14 (14.2.1*)
		2366.PBR.002	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN	Tujuan 14 (14.2.1*)
		2366.PBR.003	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT	Tujuan 14 (14.2.1*)
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341.PBR.002	Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan	Tujuan 14 (14.2.1.(a), 14.4.1*)
		2341.QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Tujuan 14 (14.2.1.(a))
		2341.BKB.001	Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan	Tujuan 14 (14.4.1*)
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan	2339.PCA.001	Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan	Tujuan 14 (14.4.1*)
		2339.UBA.001	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Tujuan 14 (14.4.1*)
		2339.QEA.001	Nelayan penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diidentifikasi	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2339.QDC.004	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
		2339.QDD.002	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif)	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
		2339.QDC.001	Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
		2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
		2339.QEA.002	Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang tersalurkan	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
032.FD Program Kualitas Lingkungan Hidup				
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4346.RAI.001	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		4346.RBH.001	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		4346.RBQ.002	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2365.RBK.001	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya	Tujuan 14 (14.1.1.(a))
032.KB Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
2427	Riset Perikanan	2427.PBR.002	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	Tujuan 14 (14.4.1*)
		2427.PBR.003	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	Tujuan 14 (14.4.1*)
2428	Riset Kelautan	2428.PBR.002	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Tujuan 14 (14.4.1*)
		2428.PBR.003	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut di WPP	Tujuan 14 (14.4.1*)
		2428.RAG.002	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar	Tujuan 14 (14.4.1*)
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2375.SCC.001	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
		2375.QDD.001	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	Tujuan 14 (14.b.1*, 14.b.1.(a), 14.b.1.(b))
032.HB Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	2353.QIC.004	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
		2353.QIC.001	Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Tujuan 14 (14.6.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	2350.QHB.001	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
		2350.RAG.001	Kapal pengawas yang dibangun	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
		2350.RCG.002	Sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
		2350.RAG.002	Speedboat pengawas yang dibangun	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
		2350.BID.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
032.HB Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	3990.PDD.003	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten	Tujuan 14 (14.6.1.(a))
032.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP				
2322	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	2322.AEC.001	Kesepakatan Kerja Sama Internasional dan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular bidang Kelautan dan Perikanan	Tujuan 14 (14.c.1*)
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerja sama	2322.PEC.001	Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan (termasuk KSST)	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 033. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
033.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
4840	Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	4840.UBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*)
		4840.RBB.001	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4840.RBB.002	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4840.RBB.003	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4840.RBB.010	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4840.RBB.004	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4840.RBB.011	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.2.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4840.CBB.006	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 13 Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		4840.CBB.007	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 13 Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		4840.CBB.008	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 13 Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
		4840.CBB.013	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Tujuan 11 (11.6.1.(a), 11.6.1.(b)), Tujuan 13 Tujuan 13 (13.2.2*, 13.2.2.(a), 13.2.2.(b))
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	4973.BAH.001	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Air Minum	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*)
		4973.RBB.001	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4973.RBB.002	Pembangunan SPAM Regional	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4973.RBB.003	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4973.RBB.004	Peningkatan SPAM Regional	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4973.RBB.005	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4973.RBB.006	Perluasan SPAM Regional	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4973.RBB.007	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4973.DCB.001	Pembinaan Teknis Bidang Air Minum	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*)
		4973.FBA.001	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 6 (6.1.1*)
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	4978.RBB.010	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4978.RBB.002	Rumah khusus	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4978.RBB.010	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Terbangun melalui Fasilitas Pemerintah	Tujuan 11 (11.1.1.(a))
		4978.CBB.009	Bantuan Perumahan Swadaya Usaha	Tujuan 11 (11.1.1.(a))
		4978.RBB.007	Jumlah Rumah Swadaya Baru yang Mendapat Bantuan	Tujuan 11 (11.1.1.(a))
		4978.BDC.002	Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat Fasilitas Pelayanan Jasa	Tujuan 11 (11.1.1.(a))
		4978.CBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	Tujuan 11 (11.1.1.(a))
		4978.CBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	Tujuan 11 (11.1.1.(a))
4978.CBB.002	Rumah Khusus	Tujuan 11 (11.1.1.(a))		
033.FC Program Ketahanan Sumber Daya Air				
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	5036.RBG.006	Bendung irigasi Serdang yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.001	Daerah irigasi Baliase yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.004	Daerah irigasi Bubi yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a)), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5036.RBS.005	Daerah irigasi Dataran Kotamobagu yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5036.RBS.006	Daerah irigasi DI Tinco (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.009	Daerah irigasi Kalukku yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.012	Daerah irigasi Lembor (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.013	Daerah irigasi Maloso yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.015	Daerah irigasi Palaka (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.020	Daerah irigasi rawa Belanti I dan II (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.021	Daerah irigasi rawa Tabunganen (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.028	Daerah irigasi Tapin (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.030	Daerah irigasi Tommo yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.031	Daerah irigasi Toraut yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.033	Daerah irigasi Wawotobi-Ameroro yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.034	Food estate di kawasan eks PLG Kalimantan Tengah	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.036	Daerah irigasi Ciujung yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.037	Daerah irigasi Cibaliung yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.048	Daerah irigasi Cikunten yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.049	Daerah irigasi Manganti yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.050	Daerah irigasi Manganti (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.060	Daerah irigasi Jragung yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.063	Daerah irigasi Serayu yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.064	Daerah irigasi Slinga yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.065	Daerah irigasi Wadaslintang (IPDMIP) yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.067	Daerah irigasi Banjarcahaya yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.068	Daerah irigasi SIM (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.069	Daerah irigasi Waduk Bening yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.070	Daerah irigasi Pekalen yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.075	Daerah irigasi Jambo Aye yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.076	Daerah irigasi Lhok guci yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.077	Daerah irigasi Baro Raya yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.083	Daerah irigasi Sei Ular (SIMURP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.084	Daerah irigasi Kawasan Sawah Laweh Tarusan yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5036.RBS.085	Daerah irigasi Batanghari yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.086	Daerah irigasi Batang Asai yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.087	Daerah irigasi Air Manjuto yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.088	Daerah irigasi Air Ketahun yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.089	Daerah irigasi Air Seluma yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.090	Daerah irigasi Lematang yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.092	Daerah irigasi Komering yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.094	Daerah irigasi Sekampung Batanghari yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.095	Daerah irigasi Way Rarem yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.096	Daerah irigasi Way Seputih yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.097	Daerah irigasi Way Tulung Mas yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.098	Daerah irigasi Way Umpu yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.099	Daerah irigasi Raman Utara yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.102	Daerah irigasi Panti Rao (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.103	Daerah irigasi Batang Tongar (IPDMIP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.105	Food Estate Humbanghasundutan yang dikembangkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.029	Daerah irigasi Tapin yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.041	Jaringan irigasi SS Macan (SIMURP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.046	046-Daerah irigasi DI Cikeusik (SIMURP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.047	Daerah irigasi Rentang yang dimodernisasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.066	Daerah irigasi Kedungputri (SIMURP) yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.093	Daerah irigasi rawa Karang Agung hilir yang direhabilitasi	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5300.RDR.007	P3TGAI	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.106	Daerah irigasi tambak Kersik putih yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.108	Daerah irigasi tambak Marangkayu yang dibangun	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.109	Daerah irigasi tambak Sepunggur yang ditingkatkan	Tujuan 2 (2.3.2*, 2.4.1.(a))
		5036.RBS.007	Daerah irigasi Gumbasa (EARR dan IRSL) yang direhabilitasi - Provinsi Sulawesi Tengah	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5036.RBS.032	Daerah irigasi Wae Dingin (IPDMIP) yang direhabilitasi - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	5040.RBS.001	Emergency Reconstruction and Rehabilitation Assistance (for Palu) (ADB) untuk Air Baku yang direhabilitasi	Tujuan 6 (6.3.2.(a), 6.3.2.(b))
		5040.RBG.001	Prasarana Air baku Embung Cikalong yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBG.002	Longstorage Air Baku Kab. Serang yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.002	Saluran Pembawa Air Baku Karian (KSCS) yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.003	Prasarana Air baku Bendungan Gondang yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.004	Prasarana Air baku Tapin yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.005	Prasarana Air baku Bajulmati yang dibangun (Km)	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.006	Prasarana Air baku Waduk Jatigede yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.007	Prasarana Air baku sistem Kesugihan yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.008	Prasarana Air baku KEK Kendal yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.009	Prasarana Air baku sistem Gandus yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.010	Prasarana Air baku Kota Pekalongan yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.011	Prasarana Air baku Long Storage Yeh Empas yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
		5040.RBS.012	Prasarana Air baku Aur Duri yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))
5040.RBS.013	Prasarana Air Baku Jonggol dan Klapanunggal yang dibangun	Tujuan 6 (6.4.2.(a), 6.4.2.(b))		
2419	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	2419.ABF.006	Pola pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direviu	Tujuan 6 (6.5.1*)
		2419.ABF.007	Rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat yang disusun/direviu	Tujuan 6 (6.5.1*)
4537	Layanan Teknis SDA	4537.ABF.001	Rekomendasi kebijakan pembinaan layanan teknis bidang SDA yang disusun	Tujuan 6 (6.5.1*)
		4537.BMA.001	SISDA yang dikelola	Tujuan 6 (6.5.1*)
		4537.BMA.002	Informasi hidrologi dan kualitas air yang dikelola	Tujuan 6 (6.5.1*)
		4537.BMA.003	EWS yang dikelola	Tujuan 6 (6.5.1*)
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	5037.RBH.001	Bendung gerak Cikarang Bekasi Laut yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.002	Bendung gerak Kanal Banjir Barat Kota Semarang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.003	Check dam Citarum Hulu yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.004	Check dam Hulu Sungai Wanggu yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.005	Kolam retensi Andir dan Polder-Polder di Kab. Bandung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5037.RBH.006	Pengendalian sedimen Batang Kuranji yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.008	Pengendalian sedimen DAS Bone Gorontalo yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.009	Pengendalian sedimen DAS Milangodaa yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.010	Pintu air Demangan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.011	Pompa Ancol Sentiong yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.012	FMSRB Sungai Way Batu Merah yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.013	Infrastructure Reconstruction Sector Loan Central Sulawesi yang dilaksanakan	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBH.014	Pengendalian banjir Kota Tanjung Pinang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.001	Drainase KI Batang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.002	Drainase KI Subang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.003	Oxbow DAS Citarum yang ditangani	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.019	Pengendalian banjir Tukad Unda yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.020	Pengendalian banjir Air Selagan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.021	Pengendalian banjir Avfour Buntung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.022	FMSRB Sungai Ciujung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.023	Pengendalian banjir avfour Watudakon yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.024	Pengendalian banjir Batang agam yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.025	Pengendalian banjir Batang Lembang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.026	Pengendalian banjir Batang Siat yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.027	Pengendalian banjir Batang Suliti yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.028	Pengendalian banjir Batang Tambuo yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.029	Pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.030	Pengendalian banjir dan rob di Kab. Pekalongan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.031	Pengendalian banjir DAS Bolango Hulu yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.032	Pengendalian banjir DAS Konawe yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.033	Pengendalian banjir DAS Serang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.034	Pengendalian banjir DAS Taludaa yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.035	Pengendalian banjir di Tandun yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.036	Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.037	Pengendalian banjir Kali Blorong yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5037.RBS.038	Pengendalian banjir Kali Bogel yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.039	Pengendalian banjir Kali Gunting yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.040	Pengendalian banjir Kali Jeroan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.041	Pengendalian banjir Kali Kemuning yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.042	Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.043	Pengendalian banjir Kali Welang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.044	Pengendalian banjir Kanal Banjir Timur Kota Semarang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.045	Pengendalian banjir Kota Makassar yang direvitalisasi	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.046	Pengendalian banjir Kota Merauke yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.047	Pengendalian banjir Muara Sungai Bogowonto yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.048	Pengendalian banjir muara Sungai Cikapundung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.049	Pengendalian banjir pertemuan Sungai Batang Bangko dan Batang Suliti yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.050	Pengendalian banjir Pertemuan tiga Sungai di kab. Ponorogo yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.051	Pengendalian banjir Ring Ngotok Kanal yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.052	Pengendalian banjir rob Semarang -Demak yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.053	Pengendalian banjir segmen Griya Mukti yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.054	Pengendalian banjir Sungai Aek Siguluan, Aek Silubung, Aek Sitete, Aek Tomok yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.055	Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.056	Pengendalian banjir Sungai Ampal yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.057	Pengendalian banjir Sungai Andegile yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.058	Pengendalian banjir Sungai Babakan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.059	Pengendalian banjir Sungai Babura yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.060	Pengendalian banjir Sungai Batanghari Hilir yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.061	Pengendalian banjir Sungai Belawan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.062	Pengendalian banjir Sungai Bogowonto dan anak Sungainya yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.063	Pengendalian banjir Sungai Bolango Hilir yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.064	Pengendalian banjir Sungai bolango yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5037.RBS.065	Pengendalian banjir Sungai Bone yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.066	Pengendalian banjir Sungai Brazza yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.067	Pengendalian banjir Sungai Bringin yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.068	Pengendalian banjir Sungai Cibeet yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.069	Pengendalian banjir Sungai Ciberang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.070	Pengendalian banjir Sungai Cidurian yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.071	Pengendalian banjir Sungai Cilemah Abang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.072	Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.073	Pengendalian banjir Sungai Cimanuk yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.074	Pengendalian banjir Sungai Cirasea yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.075	Pengendalian banjir Sungai Cisadane yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.076	Pengendalian banjir Sungai Cisanggarung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.077	Pengendalian banjir Sungai Cisangkuy yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.078	Pengendalian banjir Sungai Cisaranteun yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.079	Pengendalian banjir Sungai Cisunggalah yang direhabilitasi	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.080	Pengendalian banjir Sungai Citarum yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.081	Pengendalian banjir Sungai Deli yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.082	Pengendalian banjir Sungai Desa Embacang Gedang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.083	Pengendalian banjir Sungai Gelis yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.084	Pengendalian banjir Sungai Jajar yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.085	Pengendalian banjir Sungai Jeneponto yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.086	Pengendalian banjir Sungai Juana yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.087	Pengendalian banjir Sungai Kapuas yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.088	Pengendalian banjir Sungai Karang Mumus yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.089	Pengendalian banjir Sungai Kec. Ponolosian Timur yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.090	Pengendalian banjir Sungai Klafma yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.093	Pengendalian banjir Sungai Krueng Singkil yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.094	Pengendalian banjir Sungai Lamasi yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.095	Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5037.RBS.096	Pengendalian banjir Sungai Malibaka yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.097	Pengendalian banjir Sungai Masamba yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.098	Pengendalian banjir Sungai Musi yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.099	Pengendalian banjir Sungai Ongkak Dumoga yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.100	Pengendalian banjir Sungai Opak yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.101	Pengendalian banjir Sungai Paguyaman yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.102	Pengendalian banjir Sungai Peliang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.103	Pengendalian banjir Sungai Percut yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.104	Pengendalian banjir Sungai Putih yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.105	Pengendalian banjir Sungai Radda yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.106	Pengendalian banjir Sungai Randangan yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.107	Pengendalian banjir Sungai Remu yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.108	Pengendalian banjir Sungai Rongkong yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.109	Pengendalian banjir Sungai Sadar yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.110	Pengendalian banjir Sungai Sario yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.111	Pengendalian banjir Sungai Sikaming yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.112	Pengendalian banjir Sungai Sunter yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.113	Pengendalian banjir Sungai Tamalate yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.114	Pengendalian banjir Sungai Tondano yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.115	Pengendalian banjir Sungai Tubhi yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.116	Pengendalian banjir Sungai Tuntang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.117	Pengendalian banjir Sungai Waemese yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.118	Pengendalian banjir Sungai Wariori yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.119	Pengendalian banjir SWD 1 dan 2 yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.120	Pengendalian banjir Tukad Badung yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.121	Pengendalian banjir upper Citarum yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.122	Pengendalian Sungai Maen KEK Likupang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.123	Pengendalian banjir anak Sungai Citarum yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.124	Pengendalian banjir Sungai Lawe Alas yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.125	Sudetan Ciliwung KBT yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5037.RBS.126	Sudetan Floodway Sedayu lawas yang ditingkatkan	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.127	UFC kota Bima yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.128	UFC Kota Jambi yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.129	UFC Kota Padang yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.130	UFC Kota Pekanbaru yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBS.131	Pengendalian banjir Batang Sumpur yang dibangun	Tujuan 6 (6.5.2*, 6.6.1*)
		5037.RBR.001	Consulting Services of Bali Beach Conservation Project (Phase 2) yang dilaksanakan	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		5037.RBR.002	Consulting Services Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II yang disusun	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		5037.RBR.003	Dokumen desain Pengendalian banjir upper Citarum yang disusun	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		5037.RBR.004	Engineering service project Batam dan Bintan yang disusun	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		5037.RBR.005	Engineering service project di Pulau Bangka yang disusun	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		5037.RBR.006	Engineering service project di Sungai Cipunegara yang dibangun	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		5037.RBR.007	Engineering service project Sungai Siak yang disusun	Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5039.RBG.007	Bendungan Mbay yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5039.RBG.008	Bendungan Welikis yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5039.RBG.045	Bendungan Manikin yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5039.RBG.047	Bendungan Temef yang dibangun - Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
033.GA Program Infrastruktur Konektivitas				
2409	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2409.RBC.001	Pembangunan Jalan	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.RBC.004	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a)), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM I	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SINAK - ILAGA V	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN PERBATASAN OKSIBIL -TOWE HITAM	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ALIH TRASE GUNUNG PASIR	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WANGGAR-KWATISORE-KAMP. MURI (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN RUAS ENAROTALI - SUGAPA (DANAU ENAROTALI)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WAGETE - TIMIKA	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN UBRUB - TOWE HITAM - OKSIBIL	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2409.RBC.005	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.RBC.006	Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.RBF.003	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.RBF.004	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.RBF.005	Pembangunan Jembatan Kawasan Prioritas (ProPN)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.RBF.007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2409.CBC.003	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Tujuan 9 (9.1.1.(b))
			Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2409.RBC.008	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - DOBO (BBM) - DERMAGA	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - WAISALA	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - ILWAKI - LURANG	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SIWAHAN - ARMA	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LARAT - LAMDESAR TIMUR	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PIRU - SP. ETI	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2409.RBF.007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI NALBESSY II DAN WAI WAI NALBESSY III - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI ANGGUMELA, CS	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
			Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI ARKAY, CS	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
2410	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	2410.RBC.007	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
		2410.RBC.008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Tujuan 9 (9.1.1*, 9.1.1.(a))
033.WA Program Dukungan Manajemen				
5592	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5592.PBP.005	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Daerah Tertinggal Musi Rawas Utara dan Pesisir Barat di 2 Provinsi (Sumsel dan Lampung)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5592.PBP.024	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Wilayah Adat Laa Pago	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		5592.PBP.007	Rencana Induk Pengembangan dan PJM Wilayah Adat Domberay	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan	4197.ABF.006	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.008	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Sumber Daya Air	Tujuan 17 (17.17.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4197.ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.005	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.013	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.014	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))
		4197.ABF.017	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	Tujuan 17 (17.17.1.(c))

Kementerian/Lembaga: 035. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
035.CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				
4545	Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan	4545.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Tujuan 1 (1.3.1.(a)), Tujuan 8 (8.5.1*)
		4545.ABK.001	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	Tujuan 8 (8.5.1*)
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	2519.ABK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		2519.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		2519.PBK.002	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		2519.PBK.003	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
2521	Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional	2521.ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		2521.PBB.001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		2521.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	4550.PBK.001	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	Tujuan 8 (8.5.1*)

Kementerian/Lembaga: 040. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
040.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
5349	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	5349.PDI.001	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Bali	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PDI.002	Sertifikasi Profesi dan SDM Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PDI.003	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PDI.004	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Medan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PDI.005	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Palembang	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PDI.006	Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Lombok	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PEC.001	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Bali	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PEC.002	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PEC.003	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Makassar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PEC.004	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Medan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.PEC.006	Layanan Kerjasama Nasional dan Internasional Poltekpar Lombok	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RAA.001	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Bali	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RAA.002	Sarana Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RAA.003	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Makassar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
5349.RAA.004	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Medan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))		
5349.RAA.005	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Palembang	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))		
5349.RAA.006	Sarana Bidang Pendidikan Poltekpar Lombok	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))		

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5349.RJB.001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Bali	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RJB.003	Prasarana Bidang Pendidikan Poltekpar Makassar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RJB.004	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Medan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RJB.005	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Palembang	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.RJB.006	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Poltekpar Lombok	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SAD.001	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Bali	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SAD.002	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Priwisata Bandung	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SAD.003	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Makassar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SAD.004	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Medan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SAD.005	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Palembang	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SAD.006	Penyelenggaraan Pendidikan Poltekpar Lombok	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SDC.001	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Bali	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SDC.002	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sekolah Tinggi Priwisata Bandung	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SDC.003	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Makassar	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SDC.004	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Medan	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SDC.005	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Palembang	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
		5349.SDC.006	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Poltekpar Lombok	Tujuan 8 (8.1.1*, 8.1.1.(a))
040.EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				
4308	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	4308.QDC.001	Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha Sebagai Pemasok Industri Pariwisata	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4308.QDC.002	SDM Pariwisata yang difasilitasi pelatihan dan pembinaan sadar wisata	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4308.QDC.003	SDM pariwisata di desa wisata yang difasilitasi melalui pendampingan	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4308.SCD.001	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4309	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4309.SCL.003	Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Bimbingan Teknis	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4309.SCL.004	Aparatur Sipil Negara Kabupaten/Kota dan Provinsi yang difasilitasi Bimbingan Teknis	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4309.SCL.005	SDM Kreatif dan Champion/Unggulan yang difasilitasi Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4309.SCL.006	SDM Ekonomi Kreatif difasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4309.PDI.001	SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4323	Komunikasi Pemasaran	4323.PEH.001	Publikasi Media Digital	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4323.PEH.002	Publikasi Media Sosial dan Owned Media	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4323.PEH.003	Publikasi Media Elektronik	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4323.PEH.004	Publikasi Media Cetak dan Media Luar Ruang	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4324	Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania)	4324.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c)), Tujuan 11 (11.4.1.(a))
		4324.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4324.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4324.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4325	Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah)	4325.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c)), Tujuan 11 (11.4.1.(a))
		4325.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas Di Regional II (Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah)	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4325.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4325.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Pasar Asia Timur, Selatan dan Tengah	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4326	Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)	4326.PEH.001	Pameran Wisata Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c)), Tujuan 11 (11.4.1.(a))
		4326.PEH.002	Misi Penjualan Destinasi Prioritas Di Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4326.PEH.003	Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Prioritas untuk Wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4326.PEH.004	Kerjasama Promosi dengan Maskapai dan Wholesaler di Wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4327	Pemasaran Ekonomi Kreatif	4327.PEH.001	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Subsektor Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Televisi dan Radio	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4327.PEH.002	Pemasaran terintegrasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4327.PEH.003	Dukungan Pemasaran bagi Pelaku Kreatif pada Subsektor Aplikasi dan Pengembangan Permainan	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4327.PEH.004	Dukungan Pemasaran bagi Pelaku Kreatif pada Subsektor Seni Pertunjukan, Seni Rupa dan Musik	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4329	Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan	4329.PBK.002	Pola Perjalanan Wisata	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c)), Tujuan 12 (12.b.1.(a))
		4329.PBK.004	Produk Wisata	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c)), Tujuan 12 (12.b.1.(a))
		4329.BDC.004	Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata	Tujuan 12 (12.b.1.(a))
4330	Promosi Wisata Minat Khusus	4330.PEH.001	Pengenalan Produk Wisata Minat Khusus	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4330.PEH.002	Partisipasi Pada Pameran Wisata Minat Khusus	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4330.PEH.003	Kerjasama Terpadu Promosi Wisata Minat Khusus	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4330.PEH.004	Media Promosi Wisata Minat Khusus	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4331	Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran	4331.PEG.001	Bidding MICE yang diselenggarakan	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4331.PEH.001	Wisata MICE yang dipromosikan di Pasar Internasional	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4331.PEH.002	Delegate Boosting yang ditingkatkan melalui promosi MICE	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4331.PEH.003	MICE yang dipromosikan melalui misi penjualan	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4331.PEH.004	Event MICE Dalam Negeri yang didukung	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4331.PEH.005	Pemasaran MICE yang dipromosikan Lewat Media	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4332	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	4332.PEH.002	Materi Promosi Produk Wisata dan Kegiatan (<i>Events</i>)	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4332.PEH.003	Promosi dan Publikasi Produk Wisata dan Kegiatan (<i>Events</i>)	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
		4332.PEH.004	Evaluasi Promosi Produk Wisata dan Kegiatan (<i>Events</i>)	Tujuan 8 (8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	4314.PEA.001	Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4314.RBN.003	Ruang dan Sarana Kreatif untuk <i>Cultural Heritage Regeneration</i>	Tujuan 11 (11.4.1.(a))
4315	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I	4315.PEA.002	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional I yang Dikembangkan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4316	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II	4316.PEA.004	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4313	Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan	4313.PEA.002	Penerapan Praktek Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata	Tujuan 12 (12.b.1.(a))
		4313.PEA.003	Fasilitasi destinasi pariwisata dalam pelaksanaan <i>Sustainable Tourism Observatory</i>	Tujuan 12 (12.b.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 042. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
042.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
5718	Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri	5718.SDA.001	Produk Inovasi Litbangjirap di Industri	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		5718.SDA.002	Penelitian <i>Flagship</i> Riset Nasional (pembelian lisensi tranfer teknologi)	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
5716	Penelitian dan Inovasi Perguruan Tinggi, serta Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	5716.QDJ.001	Calon <i>Startup</i> Inovasi dari Perguruan Tinggi	Tujuan 9 (9.5.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4291	Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek	4291.QEJ.001	SDM Litbang Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri	Tujuan 9 (9.5.2*, 9.5.2.(a))
3390	Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti	3390.QEJ.008	Peserta Pendidikan Berbasis Riset Untuk Bidang Ilmu Strategis	Tujuan 9 (9.5.2*, 9.5.2.(a))

Kementerian/Lembaga: 044. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
044.EB Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi				
4443	Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi	4443.QDF.001	Koperasi yang difasilitasi melakukan kemitraan	Tujuan 8 (8.2.1*)
2737	Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan	2737.002	Koperasi dan UMKM Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Eco Tourism (TA 2020)	Tujuan 8 (8.2.1*, 8.9.1*, 8.9.1.(a), 8.9.1.(b), 8.9.1.(c))
4949	Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian dan Perkebunan	4949.001	KUKM Bidang Pertanian dan Perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui Kemitraan	Tujuan 8 (8.2.1*)
4950	Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan dan Peternakan	4950.001	Meningkatnya Volume Usaha KUKM bidang perikanan dan peternakan yang Difasilitasi Pendampingan Kemitraan	Tujuan 8 (8.2.1*)
4450	Pengembangan Bisnis UKM Jasa	4450.QDG.001	UMKM yang difasilitasi Penguatan Sarana dan Prasarana di Sektor Jasa	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4450.QDG.002	UMKM yang difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu di Sektor Jasa	Tujuan 8 (8.2.1*)
2765	Pengembangan Bisnis UKM Produk	2765.QDG.001	UKM yang difasilitasi penguatan sarana dan prasarana produksi	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.3.1*)
		2765.QDG.002	Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk UKM UKM yang difasilitasi peningkatan manajemen dan mutu produk UKM	Tujuan 8 (8.2.1*), Tujuan 9 (9.3.1*)
		2765.001	Koperasi dan UMKM yang difasilitasi standardisasi mutu dan sertifikasi produk (TA 2020)	
4453	Digitalisasi Penguatan Produk Usaha Mikro	4453.BDG.001	Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk	Tujuan 8 (8.2.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4453.QDG.001	Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	Tujuan 8 (8.2.1*)
2751	Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM	2751.QDG.001	Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk	Tujuan 8 (8.2.1*)
		2751.QDG.002	Jaringan Pemasaran Dalam Negeri yang diperluas dan dikuatkan	Tujuan 8 (8.2.1*)
4447	Penguatan Kapasitas Usaha	4447.BDG.001	Usaha Mikro (Pedagang Pasar) yang mendapat Pembinaan	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4447.BDG.002	Usaha Mikro yang difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>E Commerce / Online</i>	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4447.BDG.003	Usaha Mikro yang difasilitasi Penyusunan <i>E Catalogue</i> untuk berpartisipasi dalam Laman Situs Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Tujuan 8 (8.2.1*)
4446	Perkuatan Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro	4446.BDG.001	Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	Tujuan 8 (8.2.1*)
		4446.AEB.001	Forum Konsultasi Pembiayaan Usaha Mikro	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a))
		4446.FAB.001	Data Base Pembiayaan UMKM	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a))
		4446.QDG.001	Usaha Mikro (KUR, SHAT) yang difasilitasi Pendampingan dan Peningkatan Usahanya	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a)), Tujuan 9 (9.3.2*)
2757	Penumbuhan Wirausaha	2757.004	Pemberdayaan Kewirausahaan melalui Pelatihan Kewirausahaan (TA 2020)	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2757.003	Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga (TA 2020)	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2757.005	Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga (TA 2020)	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2757.SCF.001	Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a)), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		2757.SCF.002	Peserta Penjaringan Minat Wirausaha Masyarakat	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2757.QDC.001	Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
2760	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu	2760.002	Pelatihan Vocational (TA 2020)	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro	4445.BDG.001	Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		4445.QDG.001	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima pelatihan	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a)), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		4445.AEB.001	Forum Melawan Rentenir	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4451	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro	4451.BCG.001	Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan izin usaha (Izin Usaha Mikro Kecil/ IUMK)	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		4451.QEE.001	Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4456	Inkubasi Calon Wirausaha	4456.QDB.001	Lembaga Inkubator Wirausaha (3 Wilayah) yang dikembangkan	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		4456.QDC.001	Calon Wirausaha (Startup) yang difasilitasi melalui Inkubasi Wilayah Indonesia Bagian Barat, Timur dan Tengah	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
5615	Pendampingan, Pengawasan, Penyuluhan dan Peningkatan SDM Koperasi	5615.QDD.001	Kelompok Masyarakat untuk Membentuk Koperasi	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		5615.SCF.001	Pengurus atau Pengelola Koperasi yang diberikan Pelatihan	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
2742	Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	2742.001	Wirausaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha (Start Up Capital) (TA 2020)	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a)), Tujuan 9 (9.3.2*)
4455	Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha	4455.QDC.002	Wirausaha Pemula yang mendapatkan Bantuan	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a)), Tujuan 9 (9.3.2*)
		4455.FAB.001	Sistem Informasi Pembiayaan Wirausaha	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a))
		4455.QDC.001	Wirausaha Pemula yang mendapatkan Bantuan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
4448	Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan	4448.QDG.001	UKM yang difasilitasi Akses Pembiayaan	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a)), Tujuan 9 (9.3.2*)
		4448.QDG.002	UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	Tujuan 8 (8.3.1.(a), 8.10.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 047. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
047.DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak				
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	2794.BDB.001	K/L yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2794.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2794.QDB.001	K/L bidang sosial dan budaya yang di fasilitasi dalam peningkatan Indeks PUG	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2794.UBA.001	Daerah mitra Asdep Bidang Sosial dan Budaya yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	2812.UBA.003	Daerah yang difasilitasi dalam Upaya Penurunan <i>Stunting</i> (2P)	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		2812.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*)
		2812.UBA.004	Daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan	Tujuan 4 (4.2.1*, 4.2.2*, 4.5.1*, 4.a.1.(a)), Tujuan 16
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	2810.PEA.002	Koordinasi pelaksanaan kegiatan penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak di daerah	Tujuan 4 (4.a.1.(a)), Tujuan 16 (16.2.3.(a))
		2810.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.1.(b))
		2810.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam bimbingan teknis tentang perlindungan khusus anak dari kekerasan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.1.(b))
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	6372.ABN.001	Rumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Tujuan 5 (5.1.1*)
		6372.AFA.001	NSPK Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Tujuan 5 (5.1.1*)
		6372.ABN.002	<i>Grand Design</i> Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Pengambilan Keputusan	Tujuan 5 (5.5.1*, 5.5.2*), Tujuan 16 (16.7.1.(a))
		6372.BMA.001	Data dan Informasi Gender	Tujuan 5 (5.c.1*)
5920	Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	5920.AAH.001	Kebijakan Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	Tujuan 5 (5.1.1*)
6376	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	6376.QMA.001	Data Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
		6376.ABN.001	Rumusan kebijakan perlindungan hak perempuan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
		6376.AFA.001	NSPK bidang Perlindungan Hak Perempuan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
6375	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	6375.QAA.001	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	2797.UBA.001	SDM Unit Layanan yang mendapat Bimtek Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	2800.UBA.001	SDM Unit Layanan yang sudah mendapat Bimtek Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.2*)
		2800.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan kebijakan PHP Pekerja dan TPPO	Tujuan 16 (16.2.2*)
		2800.AEA.002	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PUG dan Perlindungan Perempuan Pekerja dan TPPO	Tujuan 16 (16.2.2*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2800.BDB.001	K/L yang mendapatkan advokasi dan KIE kebijakan PHP Pekerja dan TPPO	Tujuan 16 (16.2.2*)
		2800.FAE.001	Informasi hasil pelaksanaan kebijakan PHP pekerja dan TPPO	Tujuan 16 (16.2.2*)
2795	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	2795.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2795.QDB.001	K/L bidang ekonomi yang difasilitasi dalam peningkatan indeks PUG	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
		2795.UBA.001	Daerah mitra Asdep PUG Bidang Ekonomi yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Tujuan 8 (8.3.1*, 8.5.2*, 8.5.2.(a))
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	6377.QMA.001	Data Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR)	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.1.(b))
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus	2805.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.1.(b))
		2805.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Penyedia Layanan yang mampu memberikan dukungan psikososial berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.1.(b))
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6378.QAA.001	AMPK yang Mendapatkan Penanganan yang Komprehensif	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*), Tujuan 16 (16.2.1.(b))
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	6373.ABN.001	Rumusan Kebijakan Bidang Pengasuhan dan Lingkungan	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
		6373.PBN.001	Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan KLA	Tujuan 16 (16.2.1.(a))
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga	6374.AAH.001	Kebijakan tentang Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam PPPA	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
		6374.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam Sinergi Program Peningkatan Partisipasi keluarga dalam PPPA	Tujuan 5 (5.2.1*, 5.2.2*)
		6374.FBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas keluarga	Tujuan 16 (16.2.1.(a))
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	2809.UBA.001	Daerah yang Difasilitasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Tujuan 5 (5.3.1*)
		2809.UBA.002	Daerah yang Difasilitasi dalam Pengasuhan Berbasis Hak Anak	Tujuan 16 (16.2.1.(a))
		2809.UBA.004	Daerah yang Difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Tujuan 16 (16.2.1.(a))
		2809.UBA.005	Daerah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Daycare Ramah Anak	Tujuan 16 (16.2.1.(a))
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	2790.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Tujuan 5 (5.5.1*, 5.5.2*), Tujuan 16 (16.7.1.(b))
		2790.UBA.001	Daerah Mitra Asdep KG Bidang Politik dan Hukum yang difasilitasi dalam Peningkatan Indeks PUG	Tujuan 5 (5.5.1*, 5.5.2*), Tujuan 16 (16.7.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		2790.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum	Tujuan 5 (5.5.1*, 5.5.2*), Tujuan 16 (16.7.1.(a))
2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	2811.AEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Tujuan 16 (16.9.1*, 16.9.1.(a), 16.9.1.(b))
		2811.BDB.001	K/L yang Difasilitasi Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Tujuan 16 (16.9.1*, 16.9.1.(a), 16.9.1.(b))
		2811.UBA.001	Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Sipil dan Informasi Layak Anak	Tujuan 16 (16.9.1*, 16.9.1.(a), 16.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 054. Badan Pusat Statistik (BPS)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	2896.BMA.004	Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	Tujuan 17 (17.18.1.(a), 17.18.1.(b))
		2896.BDB.100	Pembinaan Statistik Sektor	Tujuan 17 (17.19.1.(a), 17.19.1.(b))
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	2906.BMA.003	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan rakyat	Tujuan 17 (17.18.1.(a), 17.18.1.(b))
		2906.BMA.006	Publikasi/Laporan Susenas	Tujuan 17 (17.18.1.(a), 17.18.1.(b))
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Keteagakerjaan	2905.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	Tujuan 17 (17.19.2.(a))
054.WA Program Dukungan Manajemen				
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	2882.EAG.001	Layanan Penyusunan Produk Hukum	Tujuan 17 (17.18.2*)
2881	Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran	2881.EAB.002	Dokumen Renja-KL	Tujuan 17 (17.18.3*)

Kementerian/Lembaga: 055. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
055.CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional				
6266	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	6266.ABN.408	Kebijakan Percepatan Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Tujuan 5 (5.c.1*)
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan	6269.UAB.500	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	Tujuan 5 (5.c.1*)
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat	Tujuan 17 (17.1.2*)
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	Tujuan 17 (17.1.2*)
		6269.FAB.500	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah	Tujuan 17 (17.1.2*)
		6269.FAB.500	Jumlah fitur yang diperbaiki, disempurnakan, atau ditambahkan	Tujuan 17 (17.1.2*)
		6269.ABL.508	Kebijakan Percepatan Lingkup Pengembangan Pendanaan	Tujuan 17 (17.17.1.(a))
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	6264.ABJ.501	Kebijakan Perencanaan Lingkup Lingkungan Hidup	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6264.ABJ.508	Kebijakan Percepatan Lingkup Lingkungan Hidup	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6264.AEA.503	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Lingkungan Hidup	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6264.FAE.505	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup	Tujuan 15 (15.9.1.(a))
		6264.ABV.201	Kebijakan Perencanaan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Tujuan 15 (15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
		6264.ABV.208	Kebijakan Percepatan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Tujuan 15 (15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
		6264.AEA.203	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Tujuan 15 (15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
		6264.FAE.205	Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Tujuan 15 (15.a.1.(a), 15.b.1.(a))
6262	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	6262.ABB.411	Jumlah Kebijakan/ Rekomendasi Perencanaan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tujuan 17 (17.5.1)
		6262.ABB.408	Jumlah Kebijakan Percepatan Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	Tujuan 17 (17.5.1)
		6262.FAE.105	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi RKP Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Tujuan 7 (17.13.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	6268.PEC.400	Jumlah <i>Knowledge Sharing</i> Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 056. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
056.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan				
4402	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	4402.BAB.001	Penatausahaan Tanah Ulayat	Tujuan 1 (1.4.2*)
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang	6416.QAA.001	SHAT PTSL Kategori 1	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.002	SHAT PTSL Kategori 2	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.003	SHAT PTSL Kategori 3	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.004	SHAT PTSL Kategori 4	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.005	SHAT PTSL Kategori 5	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.009	SHAT PTSL PM Kategori 3	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.010	SHAT PTSL PM Kategori 4	Tujuan 1 (1.4.2*), Tujuan 5 (5.a.1*, 5.a.2*)
		6416.QAA.013	SHAT Mandiri Kategori 1	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6416.QAA.014	SHAT Mandiri Kategori 2	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6416.QAA.015	SHAT Mandiri Kategori 3	Tujuan 1 (1.4.2*)
6416.QAA.016	SHAT Mandiri Kategori 4	Tujuan 1 (1.4.2*)		
6416.QAA.017	SHAT Mandiri Kategori 5	Tujuan 1 (1.4.2*)		

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6418.QAA.001	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6418.QAA.002	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6418.QAA.003	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6418.QAA.004	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6418.QAA.005	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6418.QAA.006	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
		6418.QAA.007	SK Redistribusi Tanah Kategori I	Tujuan 1 (1.4.2*)
056.IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
4405	Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II	4405.ABT.021	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Kalimantan	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
		4405.ABT.022	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Maluku	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
		4405.ABT.023	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Kepulauan Nusa Tenggara	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
		4405.ABT.024	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Papua	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
		4405.ABT.025	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Sulawesi	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
5541	Kegiatan Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I	5541.ABT.009	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Sumatera	Tujuan 11 (11.a.1.(a))
		5541.ABT.010	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Jawa Bali	Tujuan 11 (11.a.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 059. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
059.GH Program Komunikasi Publik				
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494.QMB.003	Diseminasi Informasi Mengenai <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
4523	Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis	4523.QAH.001	Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers	Tujuan 16 (16.10.1.(a))
		4523.PBD.001	Survei Indeks Kemerdekaan Pers	Tujuan 16 (16.10.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4525	Tata Kelola Komunikasi Publik	4525.AFA.001	NSPK Pengelolaan Bidang Komunikasi Publik	Tujuan 16 (16.10.2*)
		4525.QMB.001	Diseminasi informasi di wilayah 3T melalui mitra strategis	Tujuan 16 (16.10.2*)
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	4511.PBM.001	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Tujuan 16 (16.10.2*)
		4511.QIC.001	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	Tujuan 16 (16.10.2.(a))
		4511.QCB.001	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tujuan 16 (16.10.2.(b))
059.GF Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				
4501	Pengembangan Jaringan <i>Fixed Broadband</i> dan <i>Mobile Broadband</i>	4501.UBA.001	Penerapan Saluran Telekomunikasi (<i>Ducting</i>) Bersama	Tujuan 5 (5.b.1*), Tujuan 17 (17.6.1.(b))
		4501.QDC.001	Akses Internet tetap Pitallebar	Tujuan 17 (17.6.1.(a))
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	4961.RAI.001	Palapa Ring	Tujuan 5 (5.b.1*), Tujuan 17 (17.6.1.(b))
		4961.RAI.002	BTS/ <i>Last mile</i>	Tujuan 5 (5.b.1*), Tujuan 9 (9.c.1*), Tujuan 17 (17.8.1*)
		4961.RAI.003	Penyediaan Kapasitas Satelit	Tujuan 5 (5.b.1*), Tujuan 9 (9.c.1*), Tujuan 17 (17.8.1*)
		4961.RAI.004	Akses Internet	Tujuan 5 (5.b.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f)), Tujuan 17 (17.8.1*)

Kementerian/Lembaga: 063. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan				
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		3165.QDB.002	Desa pangan aman	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4123.QIA.001	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	Tujuan 3 (3.4.1.(a), 3.a.1*)
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	6385.QDG.001	UMKM OT yang sesuai Standar	Tujuan 9 (9.3.1*)
		6385.BDG.001	UMKM Kosmetik yang sesuai standar	Tujuan 9 (9.3.1*)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.BDG.001	UMKM Pangan yang Sesuai Standar	Tujuan 9 (9.3.1*)
063.WA Program Dukungan Manajemen				
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	318.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	Tujuan 3 (3.b.2*), Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 065. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
065.ED Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal				
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	3232.QDI.025	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		3232.PBB.028	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Industri Manufaktur	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	5089.QDH.022	Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU (<i>market sounding</i>)	Tujuan 17 (17.17.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 066. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
066.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)				
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	3256.002	Klien yang Mengikuti Layanan Pascarehabilitasi (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	3259.001	Fasilitas Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		3259.002	Paket Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	3260.001	Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		3260.003	Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		3260.BDB.001	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		3260.BDD.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		3260.PDD.001	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		3260.QDD.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	4020.004	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.009	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.010	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.011	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.013	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.014	Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang (TA 2020)	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.001	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.002	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.003	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.004	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.005	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4020.BAA.006	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.007	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.008	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.009	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.010	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.011	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.012	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.013	Program Rehabilitasi 12 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.014	Program Rehabilitasi 6 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.015	Program Rehabilitasi 3 Bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.016	Program Rehabilitasi 12 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))
		4020.BAA.017	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		4020.BAA.018	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	Tujuan 3 (3.5.1.(a), 3.5.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 060. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana				
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	3142.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Umum	Tujuan 11 (11.7.2.(a)), Tujuan 16 (16.1.1.(a), 16.1.3.(a), 16.1.4*)
3143	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	3143.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Terorisme	Tujuan 16 (16.1.4*)
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	3144.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Narkoba	Tujuan 16 (16.1.4*)
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	3151.BCA.001	Penanganan Tindak Pidana Siber	Tujuan 16 (16.1.4*)
060.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	3130.BHB.004	Layanan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Tujuan 11 (11.7.2.(a)), Tujuan 16 (16.1.1.(a), 16.1.3.(a), 16.1.4*)
5076	Pembinaan Potensi Keamanan	5076.BKA.002	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Tujuan 11 (11.7.2.(a)), Tujuan 16 (16.1.1.(a), 16.1.3.(a), 16.1.4*)
		5076.BKA.003	Penguatan Peran Bhabinkamtibmas	Tujuan 11 (11.7.2.(a)), Tujuan 16 (16.1.1.(a), 16.1.3.(a), 16.1.4*)
5087	Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	5087.BHB.002	Kesiapan kemampuan personel dalam penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi	Tujuan 16 (16.1.2.(a))
		5087.BHB.003	Pengamanan gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi	Tujuan 16 (16.1.2.(a))
060.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana POLRI				
3084	Pengembangan Peralatan POLRI	3084.CAF.001	Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus)	Tujuan 16 (16.1.2.(a))
		3084.CAF.003	Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN)	Tujuan 16 (16.1.2.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5062	Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi POLRI	5062.RBM.005	Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	Tujuan 16 (16.3.1.(a))
		5062.RBM.009	Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai SPM yang terintegrasi secara online	Tujuan 16 (16.3.1.(a))
		5062.RBM.011	Jumlah SPKT tingkat Polsek sesuai SPM	Tujuan 16 (16.3.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 067. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi				
5490	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	5490.RAI.002	Sarana Pelayanan Dasar yang dibangun/dikembangkan/direhabilitasi	Tujuan 1 (1.4.1*), Tujuan 10 (10.1.1.(b))
		5490.RAI.001	Pasar untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(c))
5503	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	5503.QEG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Tujuan 1 (1.4.1*)
5495	Pengembangan Daerah Perbatasan	5495.QEG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang dibangun	Tujuan 1 (1.4.1*)
5483	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	5483.QDD.001	Desa yang mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 10 (10.1.1.(b))
		5483.UBB.001	Desa Digital yang dikembangkan melalui Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)	Tujuan 10 (10.1.1.(b))
5482	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5482.QDC.002	Pendampingan Desa	Tujuan 10 (10.1.1.(b))
5484	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	5484.RBN.001	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(c))
		5484.RBN.001	Sarana dan prasarana wisata desa yang dibangun untuk mendukung destinasi wisata super prioritas	Tujuan 10 (10.1.1.(c))
5486	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	5486.QEH.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan usaha Ekonomi Desa yang terintegrasi dengan BUMDes	Tujuan 10 (10.1.1.(c))
		5486.QEI.001	Bantuan modal stimulan untuk pengembangan BUMDes	Tujuan 10 (10.1.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
5489	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	5489.QDH.004	Bantuan Pengembangan Saranan Prasarana BUM Desa Bersama Berkembang	Tujuan 10 (10.1.1.(c))
		5489.QDH.005	Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran BUM Desa Bersama Maju	Tujuan 10 (10.1.1.(c))
6468	Pembangunan Desa dan Perdesaan	6468.RAG.002	Sarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan yang disediakan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.RAG.005	Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur yang dibangun di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6648.xxx.xxx	Embung dan Bangunan Air Lainnya yang dibangun di Daerah Tertinggal Rawan Pangan (TA 2022)	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.QDC.004	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.QDC.006	Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya dalam perencanaan penanggulangan bencana	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.QDD.006	Pranata Adat Yang Ditingkatkan Perannya Dalam Penanganan Konflik Sosial	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.RAM.001	Sarana Seni dan Budaya di Daerah Rawan Konflik di Daerah Tertinggal	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.QDC.005	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa yang ditingkatkan kapasitasnya di Daerah Rawan Konflik di Daerah tertinggal	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.QDC.009	Pelaku Wisata di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6468.RBN.007	Amenitas Wisata di DT yang Dibangun/Dikembangkan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
6470	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	6470.RBG.002	Prasarana Air Bersih di Daerah Perbatasan yang dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RBC.002	Jalan Strategis Desa yang Ditingkatkan di Daerah Perbatasan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RAG.001	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah perbatasan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RAL.001	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah perbatasan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.QDC.009	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pertanian dan Perikanan di Daerah Perbatasan	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RBG.003	Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil dan Terluar yang dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6470.QDC.011	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pertanian, dan Perikanan di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.QDC.010	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Pariwisata di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RBN.001	Prasarana Pengembangan Potensi Sumberdaya Pariwisata di Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RAG.002	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah pulau kecil dan terluar	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RAL.002	Sarana pasca Panen yang disediakan di daerah pulau kecil dan terluar	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.QDC.001	Tenaga Kerja Bidang Pendidikan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.QDC.002	Tenaga Kerja Bidang Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.QDC.003	Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.QDC.004	Tenaga Kerja BUMDes yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RBC.001	Jalan Desa Strategis yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6470.RBG.001	Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal yang Dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
6469	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6469.RAG.001	Prasarana Prukades di Daerah Tertinggal yang dibangun	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))
		6469.QDC.002	Masyarakat di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Nilai Tambah Prukades	Tujuan 10 (10.1.1.(d), 10.1.1.(e), 10.1.1.(f))

Kementerian/Lembaga: 068. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
068.DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana				
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	3331.QDE.001	Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		3331.QDD.001	PIK Remaja yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*), Tujuan 5 (5.3.1*, 5.6.1*, 5.6.2*)
		3331.BDB.001	Faskes yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a))
		3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon)	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a))
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3320.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Tujuan 3 (3.1.1*, 3.1.2*, 3.2.1*, 3.2.2*, 3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5 (5.6.1*, 5.6.2*)
3316	Pembinaan Akses Pelayanan KB	3316.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5 (5.6.1*, 5.6.2*)
3318	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan Program Bangga Kencana	3318.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan fasilitas pengelolaan SDM lini lapangan	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5
3327	Pembinaan Kualitas Pelayanan KB	3327.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5 (5.6.1*, 5.6.2*)
3322	Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus	3322.UBA.001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	Tujuan 3 (3.7.1*, 3.7.2*, 3.7.2.(a)), Tujuan 5 (5.6.1*, 5.6.2*)

Kementerian/Lembaga: 074. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM				
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	5680.BKA.005	Pengamatan situasi terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM	Tujuan 10 (10.3.1)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5680.QKA.006	Pengamatan Situasi atas Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Papua	Tujuan 10 (10.3.1), Tujuan 16 (16.10.1.(b))
		5680.BCC.001	Pelayanan pengaduan perkara dugaan pelanggaran HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(b)), Tujuan 16 (16.10.1.(b))
		5680.BCC.003	Penanganan perkara pelanggaran HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(b)), Tujuan 16 (16.10.1.(b))
		5680.BCC.004	Mediasi perkara pelanggaran HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(b)), Tujuan 16 (16.10.1.(b))
		5680.BCC.007	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat	Tujuan 10 (10.3.1.(b)), Tujuan 16 (16.10.1.(b))
		5680.PBD.008	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban	Tujuan 10 (10.3.1.(b)), Tujuan 16 (16.10.1.(b))
		5680.UAB.002	Integrasi Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM	Tujuan 16 (16.3.3.(a))
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5679.PFA.001	Standar Norma dan Pengaturan HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(d)), Tujuan 16 (16.b.1.(a))
074.WA Program Dukungan Manajemen				
3336	Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	3336.EAH.001	Layanan Manajemen Organisasi	Tujuan 16 (16.a.1*)
		3336.EAN.001	Dokumen Keuangan Unit Eselon I	Tujuan 16 (16.a.1*)

Kementerian/Lembaga: 074. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
074.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM				
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	5681.ABD.007	Rekomendasi umum komnas perempuan terkait penghapusan KtP yang ditindaklanjuti pemerintah, APH dan pengambil kebijakan	Tujuan 10 (10.3.1)
		5681.ABD.001	Perangkat standar pencapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Tujuan 10 (10.3.1.(c)), Tujuan 16 (16.10.1.(c))
		5681.ABD.003	Rekomendasi Mekanisme Penanganan dan Pencegahan Konflik terhadap Perempuan di Aceh dan Maluku (<i>Centre of Peace</i>)	Tujuan 10 (10.3.1.(c)), Tujuan 16 (16.10.1.(c))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5681.ABD.006	Rekomendasi penguatan mekanisme keadilan restoratif bagi perempuan korban pelanggaran HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(c)), Tujuan 16 (16.10.1.(c))
		5681.PBD.009	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM	Tujuan 10 (10.3.1.(c)), Tujuan 16 (16.10.1.(c))
		5681.PBD.004	Rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti	Tujuan 10 (10.3.1.(d)), Tujuan 16 (16.b.1.(a))
		5681.PBD.005	Kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja	Tujuan 10 (10.3.1.(d)), Tujuan 16 (16.b.1.(a))
		5681.PBD.002	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	Tujuan 16 (16.10.1.(c))

Kementerian/Lembaga: 075. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
075.GJ Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika				
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	3350.QAH.003	Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan <i>Scaling Up Weather Capacity II</i>	Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	5201.QAH.003	Informasi Meteorologi Maritim (<i>Strengthening of Marine Meteorology</i>)	Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	3349.QAH.002	Informasi peringatan dini <i>windshear</i>	Tujuan 11 (11.b.1*), Tujuan 13 (13.1.2*)
3345	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	3345.QAH.001	Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas	Tujuan 11 (11.b.1*)

Kementerian/Lembaga: 076. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
076.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3364.xxx.xxx	Jumlah KPU yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas (TA 2022)	Tujuan 5 (5.5.1*, 5.5.2*), Tujuan 10 (10.3.1.(a)), Tujuan 16 (16.7.1.(a), 16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
		3364.xxx.xxx	Jumlah KPU melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum (TA 2022)	Tujuan 10 (10.3.1.(a)), Tujuan 16 (16.7.1.(a), 16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
		3364.EAE.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Tujuan 16 (16.7.1.(a), 16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
		3364.BMA.005	Publikasi Informasi	Tujuan 16 (16.7.2.(a), 16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
		3364.BAA.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Tujuan 16 (16.7.2.(b), 16.7.2.(c))

Kementerian/Lembaga: 077. Mahkamah Konstitusi (MK)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
077.BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi				
4246	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi	4246.QDC.003	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi	Tujuan 16 (16.3.3.(a))
007.WA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI				
4245	Penyelenggaraan pengawasan intern	4245.EAK.002	Pembangunan zona integritas	Tujuan 16 (16.5.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 080. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
080.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
6333	Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Nuklir di Bidang Kesehatan	6333.PBU.001	Rekomendasi Kebijakan Penanganan <i>Stunting</i> berdasarkan Asesmen Kecukupan Gizi Mikro pada Baduta <i>Stunting</i> dengan Menggunakan Metode Analisis Berbasis Nuklir	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)
		6333.PBU.002	Rekomendasi Kebijakan untuk Produk Kemaritiman dan Olahannya di Daerah Kasus <i>Stunting</i> (Kabupaten Lamongan dan Sukabumi)	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)

Kementerian/Lembaga: 081. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
081.KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
6248	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri	6248.SDB.015	Prototipe Produk Pangan Fungsional padat gizi untuk cegah <i>stunting</i> (<i>stunting</i>)	Tujuan 2 (2.2.1*, 2.2.2*)

Kementerian/Lembaga: 086. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
086.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN				
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	6191.UAI.001	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah I	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
		6191.UAI.002	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah II	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
		6191.UAI.003	Jumlah Evaluasi WBK/WBBM di wilayah III	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
		6191.UAI.004	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tujuan 16 (16.6.1.(b))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		6191.UAI.007	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tujuan 16 (16.6.1.(b))
		6191.UAI.005	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tujuan 16 (16.6.1.(b))
		6191.UAI.008	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tujuan 16 (16.6.1.(b))
		6191.UAI.006	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang diberikan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tujuan 16 (16.6.1.(b))
		6191.UAI.009	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Tujuan 16 (16.6.1.(b))
		6191.FAI.001	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah I	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
		6191.FAI.002	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah II	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
		6191.FAI.003	Jumlah Instansi Pemerintah (IP) yang telah diberikan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah III	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
		6191.FAI.004	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah I	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
		6191.FAI.005	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah II	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
		6191.FAI.006	Jumlah evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi di wilayah III	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
		6191.PBL.001	Jumlah rekomendasi Tim RB nasional terhadap pelaksanaan RB pada sektor pembangunan prioritas	Tujuan 16 (16.6.1.(c))
4350	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	4350.PBM.001	Jumlah sektor layanan strategis yang di-review/dipetakan	Tujuan 16 (16.6.2.(a))
		4350.UAB.002	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP	Tujuan 16 (16.6.2.(a))
6189	Perumusan Kebijakan PANRB	6189.AAG.009	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang distandarisasi proses bisnisnya	Tujuan 16 (16.6.2.(a))
6190	Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat	6190.UAE.001	Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	Tujuan 16 (16.6.2.(a))
6195	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik	6195.PEC.001	Kesepakatan replikasi inovasi pelayanan publik	Tujuan 16 (16.6.2.(a))

Kementerian/Lembaga: 090. Kementerian Perdagangan

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
090.EF Program Perdagangan Dalam Negeri				
3716	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3716.PEH.001	Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah (PMKM) yang mengikuti promosi makanan dan minuman sehat nusantara	Tujuan 3 (3.4.1.(b), 3.4.1.(c))
3732	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	3732.PDC.051	Layanan Pengujian Mutu Barang	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
3733	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	3733.ACA.051	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		3733.BDB.051	Lembaga yang Didampingi dan atau Dimonitor Penerapan Standar/ Persyaratan Teknis	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		3733.BDB.052	Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Jejaring Lab Acuan Pengujian yang Dibina	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
3734	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	3734.PDC.051	Layanan Kalibrasi	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
3735	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	3735.PDC.051	Layanan Sertifikasi	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
		3735.PDI.052	Layanan Sertifikasi	Tujuan 9 (9.2.1*, 9.2.1.(a))
3726	Peningkatan Tertib Ukur	3726.AEF.063	SDM yang mengikuti <i>technical assistance</i> program KSST bidang metrology legal	Tujuan 17 (17.9.1.(a), 17.9.1.(b))
090.EE Program Perdagangan Luar Negeri				
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan	3714.ABB.101	Laporan Informasi Intelijen Bisnis	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3714.ABB.102	Laporan Analisis Intelijen Bisnis	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3714.ABB.103	Laporan Data Statistik Perdagangan	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3717	Pengembangan Produk Ekspor	3727.QDH.003	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3717.QDH.004	Fasilitasi Sertifikasi Produk Ekspor	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3717.QMA.001	Referensi Produk Ekspor	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	3731.PEB.001	Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	3738.PBB.001	Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3738.PBB.003	Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3738.QDH.001	Fasilitasi FTA Center Jakarta	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3738.PEF.001	Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Tujuan 17 (17.10.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		3738.PBB.002	Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3738.UAC.001	Peningkatan Kapasitas Negosiator Perundingan Perdagangan Internasional	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
3740	Perundingan Perdagangan Jasa	3740.PBB.002	<i>Roadmap Jasa Research dan Development</i>	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3740.PBB.003	Analisis Daya Saing Sektor Jasa Keuangan dan Jasa Komunikasi	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3741	Perundingan Perdagangan Multilateral	3741.PBB.004	Perdagangan Multilateral dalam Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3741.PBB.005	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Instrumen Perdagangan (<i>Fisheries Subsidies, Anti-dumping, Safeguard dan Countervailing Measures</i>)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3741.PBB.007	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam <i>Investment Facilitation</i>	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3741.PBB.009	Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Bidang Market Akses Perdagangan	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3741.PEC.001	Partisipasi Aktif pada Mini Ministerial Meeting WTO, KTM WTO dan Sidang Reguler WTO	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	3742.PEC.001	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.002	ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.006	Kerja Sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.007	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-China FTA	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.008	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Korea FTA	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.009	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Japan CEP	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.011	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) FTA	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.012	Kerja Sama ASEAN di Forum ASEAN-Hongkong FTA	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.013	Kerja Sama Perdagangan ASEAN-Canada	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.014	Kerja Sama Perdagangan ASEAN-EU	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.015	Kerja Sama Perdagangan ASEAN-USTR	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.016	Kerja Sama Perdagangan ASEAN-EAEU	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.017	Kerja Sama Perdagangan ASEAN-Russia	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.018	Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEC.019	Kerja Sama Perdagangan dalam East Asian Summit (EAS)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3742.PEC.020	Kerja Sama Perdagangan dalam ASEAN Plus Three (APT)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))		

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		3742.PEC.021	Kerja Sama Perdagangan dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3742.PEA.001	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3742.PEA.002	Koordinasi Penanganan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3742.PEA.003	Koordinasi Pemenuhan AEC Blueprint 2025	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral	3743.PEC.001	Joint Trade Review (JTR) Indonesia-UK	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.002	Working Group on Trade and Investment (WGTI) Indonesia-EU	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.007	Working Group on Trade Facilitation and Resolution (WGTRF) Indonesia-India	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.008	Joint Working Group (JWG) Indonesia-EAEU	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.010	Sidang Komisi Bersama RI-Turki	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.011	Joint Trade Committee (JTC) Indonesia-Thailand	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.014	Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Indonesia-Malaysia	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.015	Joint Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JC-ESTC) Indonesia-Vietnam	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.018	Joint Committee on Trade and Investment Indonesia-Taiwan	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.019	Senior Officials Meeting on Trade and Investment Framework (SOMTIF) Indonesia-New Zealand	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEC.020	High Level Economic Dialogue Indonesia-China	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PED.001	Indonesia-EU CEPA	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PED.009	Indonesia-Malaysia BTA	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3743.PEA.001	Koordinasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Bilateral	Tujuan 17 (17.10.1.(a))
3744	Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional	3744.PEC.001	Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3744.PEC.002	Kerja Sama Fasilitas Perdagangan dan Investasi Forum APEC	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3744.PEC.003	Kerja Sama Antar Fora APEC	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3744.PEC.005	Kerja Sama Perdagangan dalam Forum Organisasi Karet Internasional	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3744.PEC.008	Kerja Sama Perdagangan Negara G20	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))
		3744.PEC.009	Kerja Sama Perdagangan Negara OKI	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.10.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	3745.QCB.001	Penanganan Kasus <i>Trade Remedy</i> dan Hambatan Teknis Perdagangan	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor	3751.PEH.002	<i>Display</i> Produk Ekspor di Luar Negeri	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3751.QAC.001	<i>InaExport</i> Daerah (Surabaya)	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	3753.PBB.001	Analisa dan informasi pasar ekspor di negara tujuan ekspor utama/potensial	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.11.1.(a))
		3753.PBB.002	Analisa dan informasi pasar ekspor di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.11.1.(a))
		3753.QAC.001	Layanan <i>Inquiry</i> dan Temu Bisnis	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3753.QAC.002	<i>Permanent Trade Display</i>	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3753.QAC.003	Layanan Data dan Publikasi	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3753.QMA.003	Pengembangan market place berorientasi ekspor	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.11.1.(a))
3754	Pengembangan Promosi dan Citra	3754.PEH.001	Pameran ke Negara Mitra Dagang Mitra Utama	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.002	Pameran Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.003	Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.004	Partisipasi China International Import Expo-Shanghai	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.005	Partisipasi Pameran Hannover Messe	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.006	Partisipasi Pameran Terintegrasi Lainnya	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.007	Pameran Trade Expo Indonesia	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.008	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.PEH.009	Partisipasi Expo 2020 Dubai	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3754.QDH.001	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3754.QDH.002	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))		
3755	Kerja Sama Pengembangan Ekspor	3755.PEC.001	Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3755.QDH.001	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)	3777.AEH.001	Promosi ITPC	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3777.PBB.004	<i>Market Intelligence</i>	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a)), Tujuan 17 (17.11.1.(a))
		3777.QAC.002	<i>Buyer Inquiry</i>	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
		3777.QAC.003	<i>Co Working Space</i> di Pasar Potensial	Tujuan 9 (9.b.1, 9.b.1.(a))
3756	Pengembangan SDM Bidang Ekspor	3756.SCF.001	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Tujuan 17 (17.11.1.(a))

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
3975	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	3975.UBA.001	Optimalisasi Ekspor Daerah	Tujuan 17 (17.11.1.(a))
		3975.UBA.002	Fasilitas Pelatihan Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM	Tujuan 17 (17.11.1.(a))
		3975.UBA.003	Fasilitas Pengembangan Promosi di Kawasan Perbatasan	Tujuan 17 (17.11.1.(a))
		3975.UBA.004	Workshop Manfaat FTA di Daerah	Tujuan 17 (17.11.1.(a))
3730	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	3730.QDG.001	Fasilitas Penerbitan Dokumen Ekspor Produk Industri Kehutanan	Tujuan 17 (17.11.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 092. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
092.DB Program Kepemudaan				
3080	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3080.QDC.001	Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Tujuan 8 (8.b.1)

Kementerian/Lembaga: 093. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
093.BC Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi				
3848	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan KPK, serta pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah	3848.QKC.003	Pelaksanaan Survey Penelitian Integritas	Tujuan 16 (16.5.1.(a))
5208	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan	5208.QDB.001	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Tujuan 16 (16.5.1.(a))

Kementerian/Lembaga: 103. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
103.FA Program Ketahanan Bencana				
3891	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan sumber daya darurat	3891.QEE.003	Jumlah kegiatan dalam Pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Tujuan 1 (1.5.1*), Tujuan 11 (11.5.1*), Tujuan 13 (13.1.1*)
4285	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang dukungan infrastruktur darurat	4285.UAC.001	Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya	Tujuan 1 (1.5.1*), Tujuan 11 (11.5.1*), Tujuan 13 (13.1.1*)
4286	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	4286.UAC.002	Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi	Tujuan 1 (1.5.1*), Tujuan 11 (11.5.1*), Tujuan 13 (13.1.1*)
4287	Layanan pusat pengendalian operasi	4287.UAC.001	Jumlah personil yang mendapat pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan	Tujuan 1 (1.5.1*), Tujuan 11 (11.5.1*), Tujuan 13 (13.1.1*)
4288	Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB	4288.QEE.002	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan logistik PB	Tujuan 1 (1.5.2*), Tujuan 11 (11.5.2.(a))
		4288.QEG.003	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan Peralatan PB	Tujuan 11 (11.5.2.(a))
3885	Pemulihan dan Peningkatan Pascabencana Bidang Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3885.QAH.001	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi dan SDA	Tujuan 1 (1.5.2*)
3882	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pencegahan melalui kesiapsiagaan	3882.UBB.001	Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Tujuan 1 (1.5.3*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
3893	Layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	3893.QEG.001	Jumlah prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang ditingkatkan	Tujuan 1 (1.5.4*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
		3893.QMB.001	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana	Tujuan 1 (1.5.4*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)
4289	Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB	4289.QEE.002	Jumlah Kegiatan Pengendalian Logistik dan Peralatan PB	Tujuan 11 (11.5.2.(a))
103.WA Program Dukungan Manajemen				
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	3878.SCK.001	Jumlah sumber daya manusia pelaksanaan diklat teknis dan simulasi di daerah	Tujuan 1 (1.5.4*), Tujuan 11 (11.b.2*), Tujuan 13 (13.1.3*)

Kementerian/Lembaga: 104. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
104.DP Program Penempatan dan Pelindungan PMI				
3894	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	3894.QAA.002	Pelayanan Penempatan PMI oleh pemerintah	Tujuan 10 (10.7.2.(b))
		3894.QAA.003	Pelayanan Penempatan PMI oleh non pemerintah	Tujuan 10 (10.7.2.(b))
		3894.QAA.004	Pelayanan Perlindungan terhadap PMI	Tujuan 10 (10.7.2.(b))

Kementerian/Lembaga: 106. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
106.06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (TA 2020)				
3933	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	3933.004	Kegiatan fasilitasi Produk Berkelanjutan untuk digunakan dalam PBJP (TA 2020)	Tujuan 12 (12.7.1*, 12.7.1.(a), 12.7.1.(b))

Kementerian/Lembaga: 110. Ombudsman Republik Indonesia

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
110.CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	5618.QAA.001	Laporan Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan	Tujuan 16 (16.6.2.(a))
		5618.QAA.002	Laporan Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan	
5619	Pencegahan Maladministrasi	5619.QIC.001	Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat	

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
		5619.QIC.002	Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan	

Kementerian/Lembaga: 115. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Program/Kegiatan/Rincian Output				Tujuan dan Indikator
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Rincian Output	Nama Rincian Output	
115.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
4358	Fasilitasi Pengawasan	4358.QDC.001	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Tujuan 10 (10.3.1.(a)), Tujuan 16 (16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	5245.QDC.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	Tujuan 16 (16.7.2.(b), 16.7.2.(c))
4359	Fasilitasi Penanganan Pelanggaran	4359.QAH.001	Pengawasan Netralitas ASN	Tujuan 16 (16.7.2.(b), 16.7.2.(c))

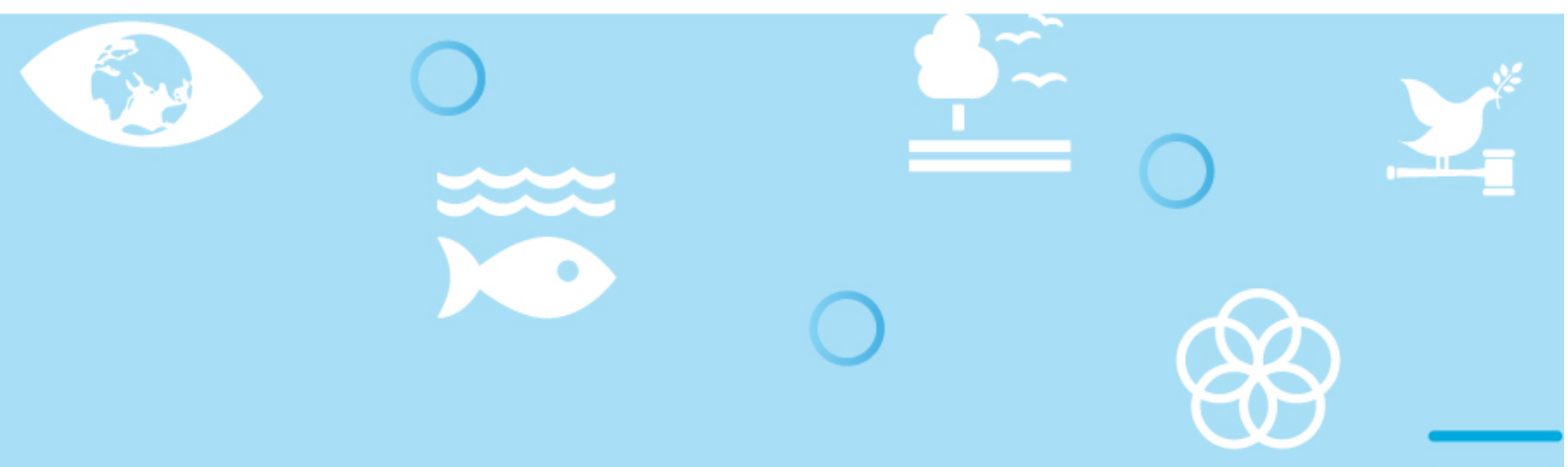
Daftar Rincian *Output* SDGs Menurut Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs

Dapat diunduh pada tautan:

<http://bit.ly/TaggingSDGs>



We support the Sustainable Development Goals



KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Jln. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp. 021 31936207; 021 21394812
Fax. 021 3145374
Email: sekretariat.sdgs@bappenas.go.id